

**KRITERIA-KRITERIA
PEMANFAATAN RUANG KOTA BERLANDASKAN
TATA NILAI TRADISIONAL BALI
DI KAWASAN WARISAN BUDAYA
DI PUSAT KOTA DENPASAR**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh:

**A.A.I.A. GANGGA DEVI MAYUN
L4D 000.181**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

**KRITERIA-KRITERIA
PEMANFAATAN RUANG KOTA BERLANDASKAN
TATA NILAI TRADISIONAL BALI
DI KAWASAN WARISAN BUDAYA
DI PUSAT KOTA DENPASAR**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

A.A.I.A. GANGGA DEVI MAYUN
L4D000181

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 26 September 2002

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik


Semarang, 2 Oktober 2002

Pembimbing Pendamping




Ir. Ragil Haryanto, MSP

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

Untuk dapat melihat cerahnya mentari pagi
harus melalui kelamnya perjalanan malam

Berbagai ujian dan kesabaran

Telah kulalui

Dan kini.....

Aku telah siap menatap cerahnya mentari pagi

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ☐ Kedua orang tuaku
- ☐ Nenekku
- ☐ Seluruh keluargaku
- ☐ Calon pendamping hidupku

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 2 Oktober 2002

A.A.I.A. GANGGA DEVI MAYUN
NIM. L4D 000 181

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, *Ida Sanghyang Widi Wasa*, tesis dengan judul **Kriteria-kriteria Pemanfaatan Ruang Kota Berlandaskan Tata Nilai Tradisional Bali di Kawasan Warisan Budaya di Pusat Kota Denpasar** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tesis ini diangkat sebagai penelitian mengingat pusat Kota Denpasar yang sudah berkembang sedemikian pesatnya, yang mengakibatkan terjadinya perkembangan kebutuhan manusia. Hal ini mengakibatkan terjadinya fungsi-fungsi ruang kota yang bersifat modern. Sedangkan di satu sisi, banyak fungsi-fungsi tradisional yang harus dipertahankan. Maka untuk mengatasi konflik tersebut dilakukanlah penelitian ini yang pada akhirnya dapat menemukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan memanfaatkan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar.

Di dalam menyusun tesis ini digunakan dua buah alat analisis, yaitu *deskriptif kualitatif* dan *Metode Delphi*. Dengan alat analisis tersebut dapat ditemukan kriteria-kriteria yang hendak dicari, yang diuraikan secara deskriptif kualitatif dan dicoba untuk diimplementasikan dalam suatu kawasan di pusat Kota Denpasar.

Tesis ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, baik moril maupun materiil. Pihak-pihak yang telah banyak membantu adalah:

1. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA, selaku mentor.
2. Ir. Ragil Haryanto, MSP, selaku co mentor.
3. Ir. Hadi Wahyono, MA, selaku dosen pembahas.
4. Ir. Nany Yuliasuti, MSP, selaku dosen penguji dan membantu dalam proses bimbingan.
5. Dosen-dosen pengajar di Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP.
6. Para staff tata usaha Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP.
7. Bank Dunia melalui proyek P3KT-BUIPnya yang telah membiaya seluruh perkuliahan.
8. UMT selaku konsultan dari Bank Dunia yang telah mengurus segala keperluan kami selama perkuliahan.
9. Pemkot Denpasar yang telah memberikan kesempatan tugas belajar.
10. Para responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuisener serta wawancara dalam melakukan penelitian.
11. Orang tua serta seluruh keluarga yang sangat mendukung melalui doanya yang tulus dan tak pernah putus.
12. Teman spesial saya yang dengan setia menanti dan mendukung dengan segenap cinta dan kasih sayangnya.
13. Teman-teman rental Terumbu Computer, terutama Mas Cungkring atas waktu dan bantuannya.

14. Teman-teman kuliah di Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP.
 15. Ibu kos yang selalu mendoakan agar berhasil dalam kuliah.
 16. Teman-teman kos yang dengan setia membantu dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
 17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
- Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari kekurangan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu serta kemampuan yang kami miliki. Maka jika ada kritik ataupun saran yang bersifat memberikan masukan bagi penelitian ini akan kami terima dengan senang hati.

Akhir kata, kami mengharapkan agar tesis ini dapat berguna serta dapat menambah wawasan kita dalam bidang pembangunan kota dengan berbagai permasalahannya yang semakin kompleks.

Terima kasih.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Semarang, 2 Oktober 2002
Penyusun,

A.A.I.A. Gangga Devi Mayun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PRIBADI	
LEMBAR PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi	6
1.3.1 Tujuan Studi	6
1.3.2 Sasaran Studi	7
1.3.3 Manfaat Studi	7
1.4 Ruang Lingkup	7
1.4.1 Lingkup Substansial	8
1.4.2 Lingkup Spasial	8
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Metode Deskriptif Kualitatif	10
1.5.2 Metode Delphi	11
1.5.3 Kebutuhan Data	14
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	16
1.5.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data ..	16
1.5.6 Teknik Sampling	17
1.6 Kerangka Pemikiran	18
1.7 Sistematika Penulisan	21
 BAB II. GAMBARAN UMUM PUSAT KOTA DENPASAR	 23
2.1 Sejarah Perkembangan Kota Denpasar (<i>Historis</i>)	23
2.1.1 Denpasar sebagai Kota Kerajaan	23
2.1.2 Denpasar sebagai Kota Kolonial	25
2.1.3 Perkembangan Kawasan Pusat Kota	27
2.2 Kondisi Pusat Kota Denpasar	28
2.2.1 Batas-batas	28

2.2.2	Fungsi-Fungsi yang Berkembang di Pusat Kota Denpasar ..	30
2.2.3	Kegiatan Pendukung (<i>activity support</i>) di Pusat Kota Denpasar	31
2.3	Peruntukan Lahan (<i>Land Use</i>) Pusat Kota Denpasar	32
BAB III.	KAJIAN TATA RUANG	37
	TEORI TRADISIONAL BALI	37
3.1	Tata Ruang Tradisional Bali	37
3.1.1	Latar Belakang <i>Historis</i>	37
3.1.2	Filosofis Penataan Ruang Tradisional Bali	39
3.1.3	Konsep Tata Ruang Tradisional Bali Dalam Konteks Kota	47
3.2	Konsep Catus Patha	49
3.2.1	Pengertian Catus Patha	49
3.2.2	Konsep Catus Patha dan Penataan Desa/Lingkungan di Bali	49
3.2.3	Filosofis Catus Patha	51
3.2.4	Penentuan Titik Pempatan Agung	52
3.3	Pura	53
3.4	Puri	55
3.5	Permukiman Tradisional Bali	56
3.5.1	Konsep Sanga Mandala	57
3.5.2	Konsep Asta Bumi	58
3.5.3	Pola Permukiman Tradisional Bali	59
3.5.4	Pola Nyatur Desa	60
3.6	Fasilitas Sosial (Fasos) Tradisional Bali	62
3.6.1	Wantilan	63
3.6.2	Bale Banjar	63
3.6.3	Bale Kulkul	64
	TEORI RUANG KOTA	65
3.7	Pengertian Kota	65
3.8	Pusat Kota	66
3.8.1	Pengertian Pusat Kota	66
3.8.2	Teori Pusat Kota	67
3.9	Elemen-elemen <i>Urban Design</i>	71
3.10	Teori Konservasi	72
3.10.1	Pengertian Konservasi	72
3.10.2	Prinsip-prinsip Konservasi	74
3.10.3	Tolok ukur Konservasi	75
3.10.4	Masalah Konservasi	77
3.11	Warisan Budaya	77
	RANGKUMAN TEORI	78

BAB IV.	KRITERIA-KRITERIA PEMANFAATAN RUANG KOTA BERLANDASKAN TATA NILAI TRADISIONAL BALI DI KAWASAN WARISAN BUDAYA DI PUSAT KOTA DENPASAR	80
4.1	Kawasan Warisan Budaya di Pusat Kota Denpasar	80
4.1.1	Kawasan Warisan Budaya	80
4.1.2	Indikasi Warisan Budaya	81
4.1.3	Lokasi Kawasan Warisan Budaya	90
4.2	Kehidupan Berbudaya Masyarakat Pusat Kota Denpasar	92
4.3	Fungsi-fungsi Modern di Pusat Kota Denpasar	92
4.4	Kriteria-kriteria Pemanfaatan Ruang Kota Berlandaskan Tata Nilai Tradisional Bali di Kawasan Warisan Budaya Di Pusat Kota Denpasar	94
4.5	Penerapan Pemanfaatan Ruang Kota	118
BAB V.	PENUTUP	122
5.1	Temuan	122
5.2	Kesimpulan	124
5.3	Rekomendasi	125
	Daftar Pustaka	127
	Lampiran (Kuisener dan Rekap Hasil Kuisener)	

DAFTAR TABEL

II.1	Pembagian dan Luasan Sub Kawasan Pusat Kota di Pusat Kota Denpasar ...	34
II.2	Luas Penggunaan Tanah Tiap SKPK di Pusat Kota Denpasar	35
III.1	Tri Hita Karana Dalam Susunan Kosmos	46
III.2	Tri Mandala Dalam Susunan Kosmos	47
III.3	Hirarki Ruang Berdasarkan Sanga Mandala	58
IV.1	Indikasi Warisan Budaya di Pusat Kota Denpasar	81
IV.2	Nama Responden	95
IV.3	Kriteria-kriteria Awal	96
IV.4	Kriteria-kriteria hasil Babak I dan II	97
IV.5	Perhitungan Statistik Babak III	100
IV.6	Prioritas Kriteria Babak III	101
IV.7	Perhitungan Statistik Babak IV	111
IV.8	Prioritas Kriteria Babak IV	112
IV.9	Kriteria Akhir Penelitian	114
V.1	Kondisi Pempatan Agung Dilihat dari Pola Nyatur Desa dan Catus Patha	123

DAFTAR GAMBAR

1.1	Peta Orientasi Penelitian	8
1.2	Lokasi Penelitian	9
1.3	Kerangka Pemikiran	20
2.1	Elemen-elemen di Sekitar Pempatan Agung pada Jaman Belanda	25
2.2	Peta Perkembangan Kawasan Pusat Kota Denpasar	28
2.3	Peta Pusat Kota Denpasar	29
2.4	Pembagian SKPK Kota Denpasar	36
3.1	Kerangka Landasan Konsep Ruang Tradisional Bali	42
3.2	Diagram Landasan Konsep Tata Ruang Tradisional Bali	43
3.3	Hubungan Tata Ruang dengan Konsep Tradisional Bali yang Melandasinya	44
3.4	Fungsi Unsur-unsur Kosmos dalam Konsep Ruang Tradisional Bali	44
3.5	Elemen-elemen di Pempatan Agung	49
3.6	Hirarki Ruang Berdasarkan Sanga Mandala	58
3.7	Pola Nyatur Desa	62
3.8	Pola Cincin Von Thunen	68
4.1	Lokasi Warisan Budaya	91
4.2	Pembagian Pusat Kota Secara Makro	115
4.3	Lokasi Pempatan Agung	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Kuisener
Lampiran B: Rekapitan Kuisener

DAFTAR ISTILAH

- Tri Hita Karana* : tiga penyebab kesejahteraan, yang terdiri dari fisik, tenaga dan jiwa atau hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), hubungan manusia dengan alam (*palemahan*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*pawongan*).
- Rwa Bhineda* : pertentangan tata nilai yang disatukan.
- Tri Angga* : konsep bentuk bangunan, terdiri dari kepala, badan, kaki yang masing-masing merupakan atap, konstruksi pemikul dan konstruksi penerus beban pada tanah dibawahnya.
- Tri Mandala* : konsep tata ruang secara makro berdasarkan tata nilai *utama*, *madya*, *nista*. Tri Mandala merupakan aspek wadah di dalam konsep ruang (ke arah horisontal) arsitektur Bali.
- Utama, Madya, Nista* : pembagian hirarki secara tradisional Bali dengan urutan paling atas, tengah dan rendah.
- Nyatur Muka* atau : pola pembagian desa adat dengan *Pempatan Agung* sebagai pusat desa dengan tata nilai zoningnya masing-masing.
- Nyatur Desa*
- Tri Loka* : *konsepsi kosmologi* yang terbagi dalam tiga bagian vertikal sebagai tiga lapisan bumi berupa *Bhur Loka*, *Bhuah Loka* dan *Swah Loka* atau *hisrosfir*, *litosfir* dan *atmosfir*.
- Asta Dala, Nawa Sanga* : konsepsi penataan zoning dan site plan dalam suatu area.
- dan *Sanga Mandala*

- Panca Maha Buta* : lima unsur pembentuk hubungan manusia dengan alamnya. Merupakan lima unsur pembentuk manusia sebagai mikro kosmos dan makro kosmos.
- Dewata Nawa Sanga* : konsep yang menggambarkan pengendalian ketertiban proses keseimbangan alam, mempengaruhi kehidupan masyarakat dan sebagai jiwa dalam perencanaan fisik/ruang kota.
- Pempatan Agung* : titik perempatan jalan yang ditentukan dari *historis*, yaitu perpotongan tegak lurus sinar matahari dengan tanah/bumi pada *sasih kapat* penanggalan Bali (sekitar Bulan Oktober atau Nopember).
- Catus Patha* : konsep yang digunakan di dalam pempatan agung, dengan elemen-elemen di sekitarnya, yaitu: *Puri*, *wantilan*, pasar dan alun-alun.
- Pura* : tempat suci atau persembahyangan bagi umat Hindu.
- Puri* : rumah tinggal bagi kaum bangsawan.
- Wantilan* : salah satu fasilitas sosial tradisional yang berfungsi sebagai balai pertemuan dengan atap bertumpang.
- Bale Banjar* : salah satu fasilitas sosial tradisional yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya anggota banjar.
- Bale Kulkul* : salah satu fasilitas sosial tradisional berupa kentongan.
- Bhuana Agung* : alam semesta beserta isinya (makro kosmos).
- Bhuana Alit* : badan kasar manusia (mikro kosmos).

Telajakan : ruang antara bagian depan bangunan dengan saluran air, berupa taman.

Tembok penyengker : tembok pembatas bangunan.

Candi bentar atau kori : pintu masuk tradisional Bali.

ABSTRAK

Kota Denpasar yang merupakan ibu kota Propinsi Bali, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik dalam bidang kependudukan, perekonomian, pemerintahan, pariwisata dan lain-lain. Semakin canggihnya teknologi juga menyebabkan pengaruh luar cepat berkembang di Kota Denpasar.

Kota Denpasar berkembang pesat akibat adanya arus urbanisasi. Mereka berdatangan ke Kota Denpasar untuk mengadu nasib mencari pekerjaan. Mereka beranggapan bahwa Kota Denpasar masih menjanjikan masa depan yang cerah. Keadaan ini tentulah menambah semakin sesaknya keadaan di Kota Denpasar. Karena perkembangan tersebut, telah mengakibatkan perubahan pola kota. Pola kota tradisional yang semula bersifat *cosmologi* dan *consentric*, telah berkembang menjadi pola *multiple nuclei*, karena semakin banyak inti baru yang berkembang.

Pusat Kota Denpasar yang merupakan *down town* Kota Denpasar memiliki banyak kawasan yang sarat akan nilai-nilai historis dan filosofis keagamaan. Karena kepatuhan masyarakat dalam menjaga warisan mereka yang berupa tempat pemujaan (tempat suci) dan karena kehidupan berbudaya yang kuat, maka masyarakat melakukan konservasi secara swadaya (*self conservation*), walaupun secara tertulis hal tersebut tidak termuat dalam suatu peraturan (Perda). Maka terbentuklah kawasan budaya yang terdiri dari Pura, Puri dan permukiman tradisional, yang keberadaannya harus dipertahankan yang diperkirakan secara kasar mempunyai luas sekitar 40% dari luas pusat Kota Denpasar.

Dan di satu pihak, seiring dengan perkembangan jaman dan semakin beragamnya kebutuhan, fungsi-fungsi modern juga berkembang di pusat Kota Denpasar. Fungsi-fungsi modern ini juga berada di kawasan warisan budaya. Maka untuk mengatasi konflik antara kepentingan modern yang semakin berkembang dengan fungsi tradisional yang harus tetap bertahan, dilakukan penelitian mengenai kriteria-kriteria pemanfaatan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar.

Dalam penelitian ini digunakan penelitian secara kualitatif dengan alat analisis deskriptif kualitatif dan Metode Delphi. Dalam deskriptif kualitatif diuraikan mengenai kawasan warisan budaya, kehidupan berbudaya masyarakat dan perkembangan fungsi-fungsi modern di pusat Kota Denpasar. Sedangkan Metode Delphi digunakan untuk memanfaatkan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali. Dari analisis ini akan didapat *out put* berupa kriteria-kriteria pemanfaatan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar. Dan dari analisis yang telah dilakukan didapat sembilan kriteria, yaitu: pembagian pusat kota secara makro, pembagian secara mikro dalam satu desa adat, kawasan pemukiman agung, mempertahankan identitas kota, mempertahankan permukiman tradisional, melestarikan kegiatan ritual, pembagian zona bersifat fleksibel, melibatkan peran serta pemerintah dan masyarakat serta menyediakan ruang peralihan berupa ruang kosong.

Dari kriteria-kriteria yang telah didapat dicoba untuk diimplementasikan ke dalam ruang kota di pusat Kota Denpasar. Maka didapat pembagian ruang kota secara makro dibagi mulai dari *core area* sebagai zona utama dan diikuti dengan zona *madya* dan *nista* pada zona berikutnya. Sedangkan pembagian secara mikro berdasarkan pola *nyatur desa* pada setiap desa adat. Diperhatikan juga agar menggunakan identitas kota berkaitan dengan Kota Denpasar sebagai kota budaya.

Kriteria-kriteria yang telah didapat diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan di dalam menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan Kota Denpasar. Dan dengan kriteria-kriteria tersebut diharapkan juga dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar.

ABSTRACT

Denpasar City, which is the Capital City of Bali Province, is growing very fast, either in social, economy, governance, tourism, or others. The developing technology, on the other hand, has caused the foreign effects grow in Bali.

Denpasar City grows due to the fastness of urbanisation. They come to Bali to find jobs. They suppose that Denpasar is promising better future. This condition, of course, makes Denpasar become a densely populated city. Because of this, the city pattern changes. Before, the Traditional City pattern, which is cosmologic, and consentric, has become Multiple Nuclei pattern due to the growing new cores.

The City Center of Denpasar which constitutes the down town of Denpasar city possesses a great number of places full of historic and religious philosophic values. Due to the strong social obedience in keeping cultural living, the society do self conservation although it is not formally written in a Regional Regulation. Therefore, the society form cultural areas such Pura, Puri, and Traditional Settlement, which their existence has to be reserved. These areas have extended roughly about 40 % of Denpasar area.

Besides, parallel to the developing era and the various demand of needs, the modern functions have also developed in the down town of Denpasar. These Cultural function are in cultural heritage areas. In order to overcome the conflict between the growing modern interests and the traditional function that should be reserved, there should be a research on the criteria of area advantage taking based on the traditional values in Bali in the areas of cultural heritage in the center of Denpasar.

In this research, the writer uses qualitative research with a descriptively qualitative as the analysis instrument and Delphi method. In the qualitative description, the writer wrote out about the cultural heritage areas, social cultural living, and the growing modern functions in the down town of Denpasar. Meanwhile, Delphi method is used to make use the city areas based on traditional values in Bali. From this analysis, will result in the criteria of making use the city areas based on traditional values of Bali in cultural heritage areas in the down town of Denpasar. And from analysis that have conducted, there are nine criterion: macro city centre distribution, micro distribution in a custom village, pempatan agung area, maintain city identity, maintain traditional settlement, continuing ritual activity, flexible zone distribution, involving government and community and providing space shifting namely empty space.

The criterion that have resulted were tried to implemented to city centre in Denpasar City Centre. The result was macro city centre distribution divided from core area as a main zone followed respectively by middle zone and nista zone. The micro distribution was based on nyatur desa pattern in every custom village. The attention was give too use city identity in accordance with Denpasar City as a cultural city.

The criterion that have resulted expected to used as a consideration in the making of Denpasar City's structure and environment planning. With the criterion, its expected to used city space at culture heritage area

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wajah kota merupakan manifestasi fisik dari kekuatan-kekuatan organisasi atau jaringan sosial masyarakat. Kota terbentuk sebagai akibat dari akumulasi dari berbagai upaya yang dilakukan banyak pihak dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut menyebabkan kota memiliki karakter dan warisan historis kota, timbul dan diciptakan sesuai dengan norma-norma yang berkaitan dengan budaya dan kemampuan teknologi yang berlaku pada masa itu.

Keberadaan warisan budaya kota akan menampilkan kekayaan visualisasi fisik dan non fisik, merupakan keputusan pernyataan masyarakat yang telah melegitimasi keberadaan warisan budayanya, terhadap perkembangan suatu kota. Dengan terpeliharanya warisan budaya dan lingkungannya, prosesi hidup kehidupan masa lalu dan masa mendatang akan terpelihara dan berkesinambungan. Upaya konservasi atau pelestarian dapat memberikan kekayaan variasi terhadap wajah kota.

Pengembangan kebijaksanaan perancangan kota (*urban design*) belum cukup untuk menunjuk elemen-elemen spesifik dari bentuk kota, tanpa memperhatikan kegiatan konservasi atau pelestarian. Konservasi bisa juga digunakan sebagai suatu usaha pengendalian kota yang mampu meningkatkan kemampuan lahan kota untuk menampung kegiatan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Kota Denpasar yang merupakan ibu kota Propinsi Bali, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik dalam bidang kependudukan, perekonomian, pemerintahan,

pariwisata dan lain-lain. Semakin canggihnya teknologi juga menyebabkan pengaruh luar cepat berkembang di Kota Denpasar. Hal ini juga didukung oleh sifat keterbukaan jaman atau era globalisasi. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kota Denpasar juga mempengaruhi percepatan perkembangan fisik kawasan kota.

Kota Denpasar berkembang pesat akibat adanya arus *urbanisasi*. Mereka berdatangan ke Kota Denpasar untuk mengadu nasib mencari pekerjaan. Mereka beranggapan bahwa Kota Denpasar masih menjanjikan masa depan yang cerah. Keadaan ini tentulah menambah semakin sesaknya keadaan di Kota Denpasar.

Pulau Bali yang terkenal sebagai Pulau Dewata bukan saja merupakan tujuan wisata bagi para wisatawan tetapi juga tujuan untuk mencari pekerjaan bagi kaum pendatang (*migran*). Berhasilnya program keluarga berencana dan *Zero Population Growth* (ZPG) yang dipelopori oleh Widminarko pada tahun 1980-an tidak langsung membuat jumlah penduduk Bali berkurang. Dalam sebuah seminar kependudukan, justru terungkap penduduk Bali tahun 2000 meningkat 1,19% dan lebih banyak karena pendatang dibandingkan dengan angka kelahiran. Para pendatang yang datang ke Bali dengan harapan bisa menerima penghasilan lebih banyak dibandingkan daerah asalnya yang sama-sama merasakan dampak krisis ekonomi.

Karena perkembangan tersebut, telah mengakibatkan perubahan pola kota. Pola kota tradisional yang semula bersifat *cosmologi* dan *consentric*, telah berkembang menjadi pola *multiple nuclei*, karena semakin banyak inti baru yang berkembang.

Denpasar merupakan salah satu dari 7 (tujuh) ibukota kabupaten di Bali yang berkembang dari pusat kerajaan dengan pola **Pempatan Agung** (*crossroad pattern*). Pola ini merupakan implementasi dari konsep tata ruang tradisional Bali yaitu **Catus Patha**, yang

memiliki potensi untuk dilestarikan sebagai salah satu identitas budaya arsitektur kota di Bali (Meganada, 1990: Anindya, 1991). Tata nilai tradisional yang berupa *pempatan agung* tersebut menggunakan *pola catus patha*, dimana di sekitarnya adalah Puri (kediaman raja), wantilan, pasar dan *alun-alun* (lapangan).

Konsep yang sarat akan makna filosofis berdasarkan tata nilai religi agama Hindu dalam implementasi tata ruang sebagai pengendali perkembangan kota masa datang memerlukan penyesuaian. Sehingga fleksibilitas yang dimiliki, yaitu *desa, kala, patra* (situasi, kondisi dan toleransi) mampu mengadaptasi dan mengadopsi kebutuhan kota modern, tanpa harus kehilangan makna atau karakter khas sebagai identitas budaya setempat.

Masuknya pengaruh-pengaruh atau *trend* luar (*modern*) membuat wajah pusat Kota Denpasar semakin beraneka ragam. Pengaruh harga lahan, dimana harga lahan di pusat kota yang semakin tinggi juga menyebabkan pusat kota dipenuhi dengan berbagai kegiatan modern, sehingga hal-hal yang bersifat tradisional semakin tergeser.

Garnham (1984) menyatakan bahwa pemeliharaan jiwa setempat (*spirit of place*) adalah upaya preservasi yang bertujuan untuk revitalisasi suatu kawasan. Metode ini akan efektif jika variabel pembentuk karakter dominan potensi kawasan dapat ditemukeni, sehingga solusi disain yang diusulkan mencerminkan karakter khas tersebut. Sedangkan menurut Danisworo (1989: 5-6) pendekatan peremajaan kota merupakan salah satu upaya dalam proses perencanaan yang diterapkan untuk menata kembali kawasan tertentu dalam kota dengan tujuan mendapat nilai tambah yang lebih memadai.

Sedangkan pusat Kota Denpasar adalah merupakan kawasan yang sarat akan nilai-nilai historis terutama yang mengandung unsur-unsur perjuangan rakyat Denpasar pada jaman dahulu. Hanya saja potensi yang sedemikian berharga baik dari segi *historis* maupun *filosofis*

budayanya belum ditata dengan baik. Tetapi karena pengaruh budaya yang begitu kuat di masyarakat Kota Denpasar, mengakibatkan telah terjadinya kawasan-kawasan konservasi dengan sendirinya (*self conservation*) yang berupa *Pura*, *Puri* dan *permukiman tradisional/adat* yang keberadaannya harus dipertahankan, walaupun secara tertulis hal tersebut tidak termuat dalam suatu aturan. Hal ini disebabkan karena kepatuhan masyarakat dalam menjaga warisan mereka yang berupa tempat pemujaan (tempat suci) dan karena budaya yang begitu kental yang sudah mereka lakukan secara turun temurun (*living culture*). Adanya Perda (Peraturan Daerah) yang membatasi ketinggian bangunan di Bali maksimum setinggi 15 meter atau setinggi pohon kelapa mengakibatkan Kota Denpasar tumbuh ke arah horisontal dan menyebar ke arah pinggiran. Keberadaan budaya yang begitu kuat, disamping merupakan potensi yang dimiliki Kota Denpasar juga merupakan hambatan dalam perkembangan kota. Masuknya fungsi-fungsi modern yang berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan menjadi agak terhambat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari RTRW Kota Denpasar, diperoleh lokasi kawasan warisan budaya berupa *Pura*, *Puri* dan *permukiman tradisional*. Dan jika dihitung dalam prosentasi dibandingkan dengan luas pusat Kota Denpasar, luas kawasan warisan budaya tersebut adalah sekitar 40% dari luas pusat Kota Denpasar. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, dilakukan suatu studi tentang bagaimana memanfaatkan ruang kota yang ada di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar, sehingga kawasan warisan budaya tersebut tetap eksis keberadaannya dan fungsi-fungsi modern juga dapat berkembang di kawasan tersebut. Tentunya hal ini harus disesuaikan dengan aturan-aturan tata ruang tradisional Bali yang berlaku.

Dengan terjadinya *self conservation* di pusat Kota Denpasar, secara implisit membuktikan bahwa masyarakat Kota Denpasar sadar bahwa mereka harus menyelamatkan warisan leluhur dan budaya mereka. Tetapi pada kenyataannya sangat sulit menterjemahkan peraturan tata nilai tradisional Bali di dalam pemanfaatan ruang kota di pusat Kota Denpasar yang semakin sesak, karena secara tertulis belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

Maka melalui penelitian inilah dicoba untuk menemukan kriteria-kriteria tradisional Bali yang dapat digunakan untuk memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan potensi-potensi dan permasalahan yang ada di pusat Kota Denpasar, maka dilakukan penelitian untuk dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat Kota Denpasar.

Permasalahan-permasalahan yang didapat adalah:

1. Melihat secara **historis perkembangan pusat Kota Denpasar**, maka akan dapat dilihat keadaan awal pusat kota. Elemen-elemen apa yang terdapat di sana dan bagaimana keadaannya. Kuatnya kehidupan budaya di masyarakat Kota Denpasar dan terjadinya *self conservation* menjadi potensi bagi Kota Denpasar, karena menjadikan Kota Denpasar berbeda dari kota-kota lain di Indonesia. Tetapi hal ini juga dapat menghambat perkembangan fisik Kota Denpasar. Begitu juga dengan Perda tentang pembatasan ketinggian bangunan yang mengakibatkan Kota Denpasar berkembang secara horisontal dan melebar ke pinggiran.

2. Terjadinya *self conservation* di masyarakat Kota Denpasar membuktikan bahwa mereka telah menyadari pentingnya pelestarian warisan budaya. Tetapi belum adanya peraturan secara tertulis yang mengatur hal tersebut. Sampai saat ini semua dilakukan didasarkan pada budaya dan agama yang mereka anut. Pusat Kota Denpasar sulit berkembang karena faktor budaya tersebut. Untuk menerjemahkan kaidah-kaidah tata nilai tradisional Bali tersebut langsung ke lapangan sangatlah sulit, karena masalahnya sangat kompleks. Maka kiranya perlulah dibuat suatu kriteria-kriteria apa saja untuk dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat Kota Denpasar.

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat diambil satu perumusan masalah atau *Research Question*, yaitu:

- Bagaimana menentukan kriteria-kriteria untuk dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat Kota Denpasar?

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi

1.3.1 Tujuan Studi

Tujuan dari studi ini adalah:

- Untuk mencari kriteria-kriteria yang digunakan untuk dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat Kota Denpasar.

1.3.2 Sasaran Studi

Untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan pada poin 1.3.1, maka dilakukan beberapa cara sistematis, seperti langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengkaji tata ruang berdasarkan tata ruang tradisional Bali.
- Mengkaji kawasan warisan budaya yang ada di pusat Kota Denpasar.
- Mengkaji perkembangan pusat Kota Denpasar.

1.3.3 Manfaat Studi

Manfaat dari studi ini adalah:

- Untuk mendapatkan kriteria secara tertulis tentang pemanfaatan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat Kota Denpasar.
- Sebagai upaya pemanfaatan ruang kota di kawasan warisan budaya yang ada di pusat Kota Denpasar.
- Dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam *urban design* di pusat Kota Denpasar, seperti dalam penyusunan RTBL pusat Kota Denpasar.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam ruang lingkup ini terdiri dari lingkup substansial dan lingkup spasial. Lingkup substansial berisikan tentang hal yang akan diteliti, yaitu kriteria-kriteria yang digunakan untuk dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat Kota Denpasar. Sedangkan lingkup spasial yaitu berupa lokasi penelitian, yaitu pusat Kota Denpasar.

1.4.1 Lingkup Substansial

Lingkup substansial dalam penelitian ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan identifikasi perkembangan yang terjadi di pusat Kota Denpasar pada saat ini, diawali dengan melihat sejarah perkembangan pusat Kota Denpasar, kemudian melihat perkembangan pusat Kota Denpasar pada saat sekarang, serta tata ruang kota berdasarkan nilai tradisional Bali. Lalu dianalisis yang pada akhirnya dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat Kota Denpasar.

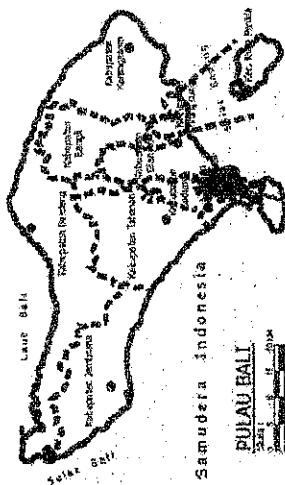
1.4.2 Lingkup Spasial

Lingkup spasial atau keruangan yang akan diteliti berlokasi di pusat Kota Denpasar. Pusat Kota Denpasar (sesuai dengan SK Walikota No. XX tahun 2000, kini sedang direvisi) merupakan bagian dari wilayah Kota Denpasar yang merupakan ibu kota dari Propinsi Bali. Luas pusat kota 1.873,201 ha yang merupakan 15% dari luas Kota Denpasar (12.500 ha). Lokasi penelitian yaitu pusat Kota Denpasar, dapat dilihat pada gambar 1.1, dan 1.2 berikut.

Dan yang merupakan titik Pusat Kota Denpasar adalah pada *Patung Catur Muka*, yang merupakan 0 (nol) km Kota Denpasar. Patung ini terletak di perempatan jalan, yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Veteran, Jalan Surapati dan Jalan Udayana.

Batas-batas wilayah Pusat Kota Denpasar adalah sebagai berikut (nama jalan):

- Sebelah Utara : Jalan Gatot Subroto
- Sebelah Selatan : Jalan Teuku Umar, Jalan Dewi Sartika, Jalan Raya Puputan
- Sebelah Barat : Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Setia Budi,
Jalan Wahidin, Jalan Thamrin dan Jalan Imam Bonjol
- Sebelah Timur : Jalan By Pass Ngurah Rai.




PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

KRITERIA - KRITERIA PEMANFAATAN RUANG KOJA
BERLANDASKAN TATA NILAI TRADISIONAL BALI
DI KAWASAN WARISAN BUDAYA DI PUSAT KOJA DENPASAR

PEIA : ORIENTASI PENELITIAN

LEGENDA:

- 
 = BATAS KABUPATEN
 = IBUKOTA KABUPATEN/KOTA
 = WILAYAH KOTA DENPASAR
 = IBUKOTA KECAMATAN

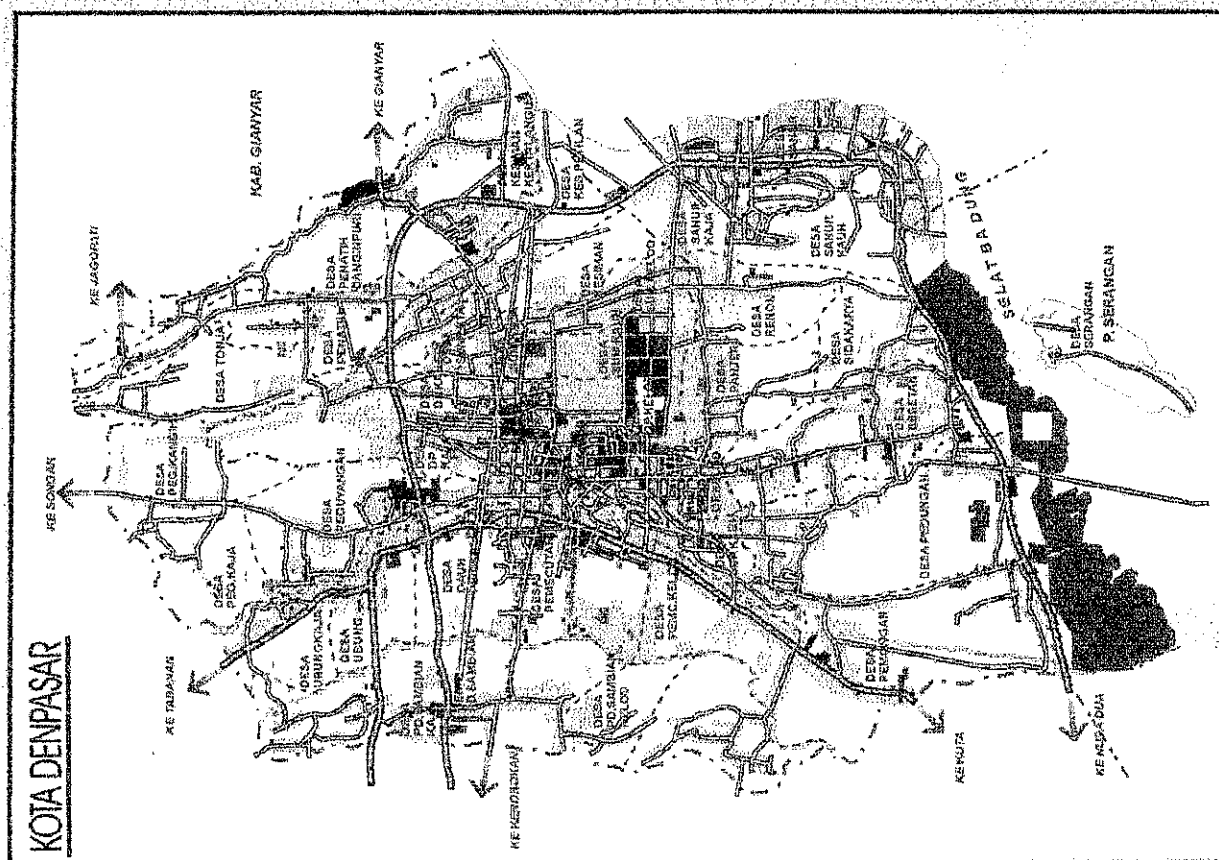
SKALA

0,1 0,2 KM

NO. HAL

SUMBER :

BAPPEDA KOTA DENPASAR





PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

KRITERIA - KRITERIA PEMANFAATAN RUANG KOTA
BERLANDASKAN TATA NILAI TRADISIONAL BALI
DI KAWASAN WARISAN BUDAYA DI PUSAT KOTA DENPASAR

PETA : LOKASI PENELITIAN

LEGENDA :

- = BATAS WILAYAH PUSAT KOTA
■ = LOKASI PENELITIAN

SKALA

0.1 0.2 KM

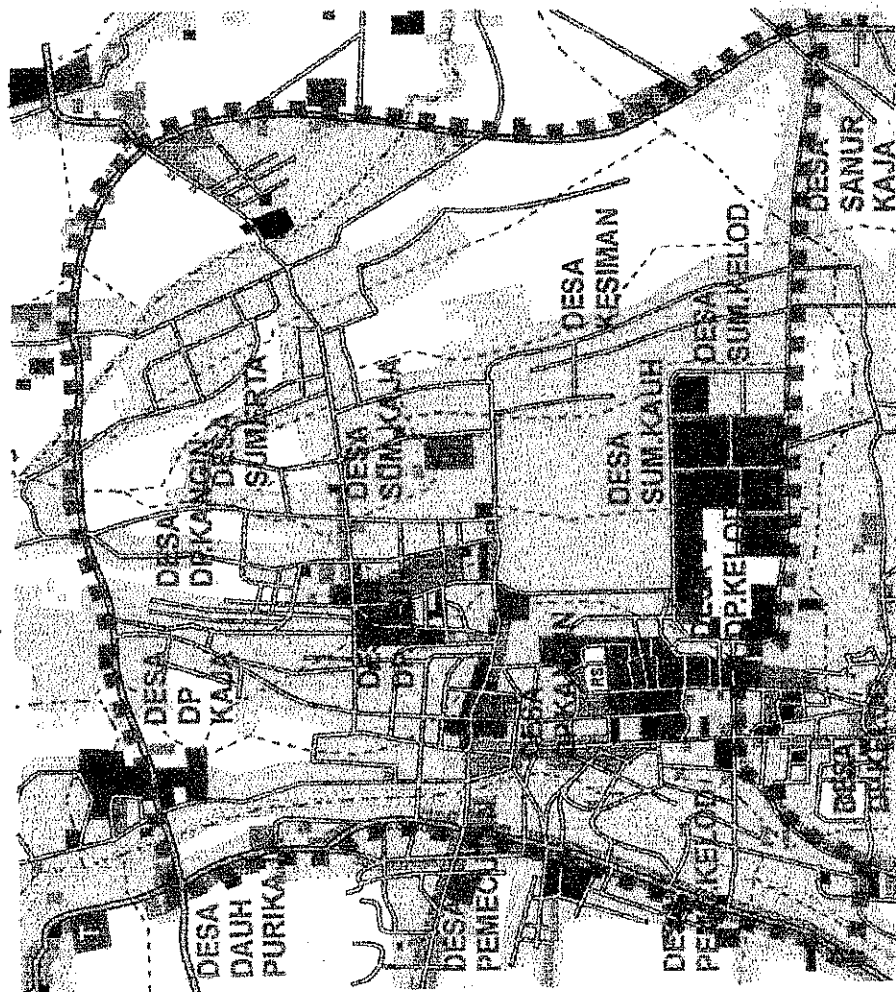
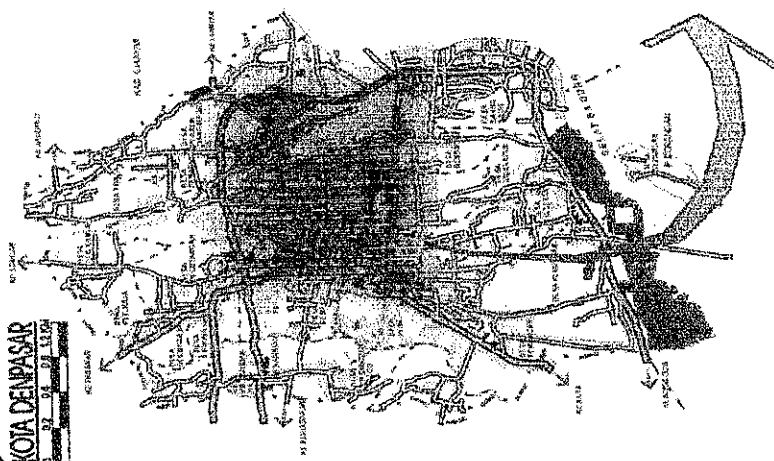
NO. GAMBAR

NO. HAL



SUMBER :

BAPPEDA KOTA DENPASAR



Dalam penelitian ini alasan memilih lokasi di pusat Kota Denpasar, adalah karena:

- Ditinjau dari *historis* kawasan ini merupakan titik awal pertumbuhan kota (*down town*) Denpasar, ditata sebagai implementasi *konsep Catus Patha* secara tradisional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat itu.
- Kawasan pusat kota memiliki makna sebagai pusat orientasi kota, baik secara struktur fisik maupun secara imajiner. Dan kawasan ini pula menjadi tempat dan saksi peristiwa *Puputan Badung*, peristiwa *heroik* masyarakat Badung untuk mempertahankan kedaulatannya dari penjajah Belanda tahun 1906. Hal ini diperkuat lagi dengan keberadaan *pempatan agung*, *Pura Jagatnatha*, *Museum Bali*, *Bali Hotel*, *patung Catur Muka*, *alun-alun* serta *patung Puputan Badung* sebagai potensi aset pariwisata kota bernilai historis.
- *Living culture* yang begitu kental di masyarakat Kota Denpasar dengan *self conservation* yang dilakukan merupakan potensi yang dimiliki Kota Denpasar, yang menjadikan Kota Denpasar kota yang unik dan berbeda dari kota-kota yang lain.
- Di pusat Kota Denpasar terdapat sekitar 40% kawasan warisan budaya yang keberadaannya harus dipertahankan, sedangkan fungsi-fungsi modern mendesak kebutuhan perkembangan kota.

Sedangkan batas-batas kawasan warisan budaya yang diteliti adalah seperti batasan yang telah ditetapkan di dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Denpasar, yang merupakan kawasan permukiman tradisional dimana di dalam batasan kawasan tersebut juga terdapat Pura, Puri atau jero serta bangunan-bangunan warisan budaya berupa peninggalan

sejarah yang memiliki historis. Dan untuk bangunan-bangunan yang dalam penelitian ini dikatakan sebagai warisan budaya, hanya berupa indikasi dengan pertimbangan bahwa: bangunan tersebut memiliki nilai historis atau filosofi agama serta bangunan tersebut memiliki fungsi tradisional dan hingga kini masih berfungsi.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif. Alasan digunakannya metode ini adalah karena aspek yang akan dikaji bersifat kualitatif. Penekanan analisis ini adalah pada ketajaman dan kepekaan berpikir analisis dalam mengkaji suatu masalah atau kecenderungan yang terjadi di lapangan. Alat bantu dalam analisis ini adalah data yang telah disajikan dalam bentuk tabel, peta atau sketsa serta hasil wawancara langsung di lapangan. Dan dalam penelitian ini digunakan dua metode penelitian, yaitu: *deskriptif kualitatif* dan *Metode Delphi*.

1.5.1 Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Keunggulan dari metode deskriptif kualitatif ini adalah:

- Mengumpulkan data yang bernilai statistik
- Melukiskan keadaan suatu obyek pada suatu saat tertentu
- Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa
- Menemukan data yang menunjukkan permukaan (*appearance*) dari suatu realitas

- Mengumpulkan data yang dapat menunjukkan realisasi suatu gagasan/ide atau peraturan.

Sedangkan model penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan adalah: penelitian lapangan (*field research*).

Dan dalam penelitian ini, yang akan dikaji menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah:

- Kondisi pusat Kota Denpasar
- Kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar
- Kehidupan berbudaya masyarakat di pusat Kota Denpasar
- Perkembangan fungsi-fungsi modern di pusat Kota Denpasar.

1.5.2 Metode Delphi

Metode Delphi merupakan peralatan dalam panel konvensional yang pertama kali diperkenalkan oleh Helmer, Rescher, Gordon, Dalkey dan kawan-kawan dalam Kerjasama Rand (*Rand Corporation*) dan metode ini merupakan bentuk dari *brainstorming* yang dispesialisasikan. Ada beberapa variasi dari teknik panel, tetapi Metode Delphi merupakan metode yang terbaik (Roberts, 1974: 35).

Pada prinsipnya, Metode Delphi merupakan teknik peramalan intuitif yang digunakan untuk mencapai suatu konsensus dari suatu kelompok ahli (*expert*). Dalam penelitian ini, Metode Delphi akan digunakan untuk meminta pendapat para pakar mengenai kriteria-kriteria tradisional Bali yang digunakan dalam pemanfaatan ruang berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar, melalui kuisener yang disebar sebanyak 4 (empat) babak atau putaran.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah Metode Delphi yang dilakukan adalah:

1. Merumuskan Issue Permasalahan.

Issue yang disampaikan kepada responden adalah perkembangan pusat Kota Denpasar yang semakin pesat, menyebabkan berkembangnya fungsi-fungsi modern. Sedangkan di satu sisi ada suatu kawasan warisan budaya yang keberadaannya harus dipertahankan. Maka, dimohon bantuan kepada responden untuk mendapatkan dasar-dasar yang bisa digunakan sebagai kriteria di dalam pemanfaatan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan tersebut. Dan pada pelaksanaan awal ini, analis memberikan 7 (tujuh) kriteria pada babak I. Selanjutnya responden, diminta untuk memberikan pendapatnya, boleh setuju, tidak setuju, menambah, mengurangi atau bahkan memberikan kriteria lain.

2. Memilih Responden (*Advocates*).

Dalam penelitian ini, untuk menentukan para responden yang akan dipilih, dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Mengerti tentang topik permasalahan yang diangkat, yaitu menerjemahkan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar.
- Pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan ini, yaitu yang mengerti tentang perkembangan keruangan yang terjadi di pusat Kota Denpasar dan kaidah-kaidah tentang tata nilai tradisional Bali.
- Responden adalah beragama Hindu, karena lebih mengerti mengenai filosofis keagamaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka responden yang dipilih adalah pengamat atau pemerhati budaya Bali, pejabat pemerintah yang terlibat dalam pembangunan dan penataan pusat Kota Denpasar, tenaga pengajar yang berkecimpung dalam arsitektur dan budaya Bali serta tokoh-tokoh masyarakat pemerhati budaya Bali, dalam hal ini adalah tokoh-tokoh LSM.

3. Menyusun Kuisener Babak Pertama.

Tipe kuisener yang digunakan pada babak pertama dalam penelitian ini adalah *item pilihan*, yaitu meminta responden untuk mengungkapkan kriteria-kriteria tradisional Bali apa yang dapat digunakan dalam memanfaatkan ruang di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar. Identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tujuan penelitian, yaitu dapat mencari kriteria-kriteria pemanfaatan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar.

4. Analisis Hasil Babak Pertama.

Dari hasil babak I, didapatkan sembilan kriteria. Dan dari sembilan kriteria tersebut dianalisis kemudian disebar kembali di dalam kuisener babak II. Dari hasil babak II ini juga didapatkan sembilan kriteria. Kriteria-kriteria kemudian ditentukan prioritasnya di dalam babak III dan IV.

5. Menyusun Kuisener untuk Tahap-tahap Selanjutnya.

Dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 4 (empat) babak atau putaran dalam penyebaran kuisener untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Di dalam penyebaran kuisener babak III dan IV ini digunakan *item issue* untuk menentukan prioritas kriteria yang diungkapkan.

Dari hasil kuisener babak IV inilah didapatkan hasil akhir berupa prioritas kriteria-kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar.

6. Organisasi Kelompok Pertemuan.

Salah satu langkah terakhir adalah mempertemukan para responden bersama-sama untuk diskusi tatap muka mengenai alasan, asumsi dan argumen terhadap berbagai pendapat mereka. Tahapan dalam ke 6 dalam Metode Delphi ini tidak wajib dilaksanakan. Adanya keterbatasan waktu untuk mengantisipasi kesulitan dalam menentukan waktu yang tepat dimana seluruh responden memiliki waktu luang untuk mengikuti diskusi tatap muka dalam aplikasi Metode Delphi, maka dalam penelitian ini langkah keenam ditiadakan.

7. Menyiapkan Laporan Final.

Prioritas dari kriteria yang didapat dalam babak IV merupakan laporan final dalam peneletitan dengan Metode Delphi, yang dalam penghitungan dibantu dengan program komputer statistik Delphi. Dalam laporan final ini juga diuraikan secara deskriptif tentang kriteria-kriteria yang telah didapatkan.

1.5.3 Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer maupun data sekunder. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Mencari gambaran mengenai kondisi pusat Kota Denpasar, data yang dibutuhkan adalah :

- Kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar, berupa: lokasi pusat Kota Denpasar, lokasi kawasan warisan budaya, kondisi warisan budaya. Data-data tersebut dalam bentuk peta maupun foto. Sedangkan datanya dapat berupa primer dan sekunder. Sumber data diperoleh dari: Bappeda Kota Denpasar, Diparda Kota Denpasar, literatur dan survey langsung ke lapangan.
 - Kehidupan berbudaya masyarakat pusat Kota Denpasar, berupa: bagaimana masyarakat pusat Kota Denpasar dalam menjalani kehidupan kebudayanya. Data tersebut diuraikan dalam bentuk analisis deskriptif. Data bisa bersifat primer maupun sekunder. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari: literatur dan survey lapangan.
 - Fungsi-fungsi modern di pusat Kota Denpasar, berupa: fungsi-fungsi modern apa saja yang berkembang di pusat Kota Denpasar. Data tersebut diuraikan dalam bentuk analisis deskriptif. Data bisa bersifat primer maupun sekunder. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari: literatur dan survey lapangan.
- 2 Mencari kriteria-kriteria pemanfaatan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar. Data yang dibutuhkan adalah:
- Teori tata ruang tradisional Bali, yaitu: konsep catus patha, konsep sanga mandala, konsep asta bumi, pola permukiman tradisional Bali, pola nyatur desa. Dan teori ruang kota meliputi: teori pusat kota, teori urban design dan teori konservasi. Untuk mencari kriteria-kriteria tersebut, data dianalisis menggunakan Metode Delphi. Bentuk data berupa literatur dan kuisioner babak I dan II. Data bersifat primer dan sekunder dan berasal dari buku-buku literatur dan para pakar.

3. Mencari prioritas kriteria-kriteria pemanfaatan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar. Data yang dibutuhkan adalah:
 - Kriteria-kriteria yang didapat dari hasil kuisener babak I dan II. Analisis yang digunakan juga dengan Metode Delphi. Bentuk data berupa hasil kuisener babak III dan IV. Data bersifat primer dan berasal dari para pakar.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dalam wilayah pengamatan, yaitu kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar dan pusat Kota Denpasar pada umumnya. Data yang dikumpulkan adalah berupa:

- Data primer: melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan menampilkan foto-foto, mengamati langsung obyek penelitian dan melakukan sketsa di lokasi. Data primer yang dikumpulkan meliputi: peta kawasan budaya, peta pusat Kota Denpasar, serta foto mengenai pusat Kota Denpasar dan warisan budayanya.
- Data sekunder: mendatangi instansi yang terkait dengan penelitian, melakukan wawancara dengan pakar di bidang budaya dan tata ruang tradisional Bali, seperti: peraturan serta Undang-undang yang berlaku serta dari literatur terkait.

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Selanjutnya adalah data tersebut diolah, dipilah-pilah dan disajikan dalam bentuk seperti tabel, gambar atau foto sesuai dengan kebutuhan dan agar jelas terbaca (*informatif*).

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Verifikasi: pemeriksaan data secara umum dengan mengacu kepada daftar yang sudah disusun.
- Klasifikasi: pengelompokan data berdasarkan kepentingan atau tujuan ingin dicapai atau berdasarkan kesamaan dalam aspek tertentu.
- Validasi: penilaian apakah data-data yang sudah ada cukup kompeten dan *representatif* mewakili kondisi yang diamati.
- Tabulasi: proses akhir dalam penyusunan data agar mudah dibaca, direview dan dipergunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Keluaran dari tahapan ini adalah kompilasi data yang siap untuk dianalisis.

1.5.6 Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian atau bagian populasi yang menjadi sumber data penelitian, atau individu yang diselidiki dalam penelitian. Dalam suatu penelitian, sampel yang diperlukan adalah (Sudjana, 1994): diharapkan mampu digeneralisasi pada populasinya, ditarik dari populasi melalui teknik sampling terpilih dan kemungkinan bias sebagai resiko diusahakan sekecil mungkin.

Penentuan sampel ini dilaksanakan bukan berdasar sensus karena ada keterbatasan tenaga, waktu, biaya dan dana. Adapun keuntungan sampel penelitian adalah:

- Biaya dapat diperkecil (*reduced cost*)
- Lebih cepat diperoleh data (*greater speed*)
- Materi dapat diperluas (*greater scope*)
- Ketepatan dapat dipertinggi (*greater accuracy*)

Dalam hal ini, teknik atau metode sampling yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah: *Purposive Sampling*. Purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi. Dalam penelitian ini, purposive sampling dengan cara mengambil sampel dan mewawancarai 10 (*sepuluh*) responden yang akan dimintai pendapat atau informasi mengenai kriteria-kriteria tradisional Bali dalam pemanfaatan ruang kota di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar melalui Metode Delphi.

Dalam purposive sampling, penentuan jumlah responden sepenuhnya tergantung dari peneliti. Karena dalam hal ini yang dipilih sebagai responden adalah para pakar, maka peneliti menentukan sendiri para pakar dan jumlah pakar yang dipilih. Hal ini juga disebabkan karena kriteria pakar, dalam hal ini adalah pakar budaya Bali secara resmi belum ada. Begitu pula dengan jumlah populasinya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menyusun penulisan tesis ini, untuk mengetahui gambaran secara garis besarnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

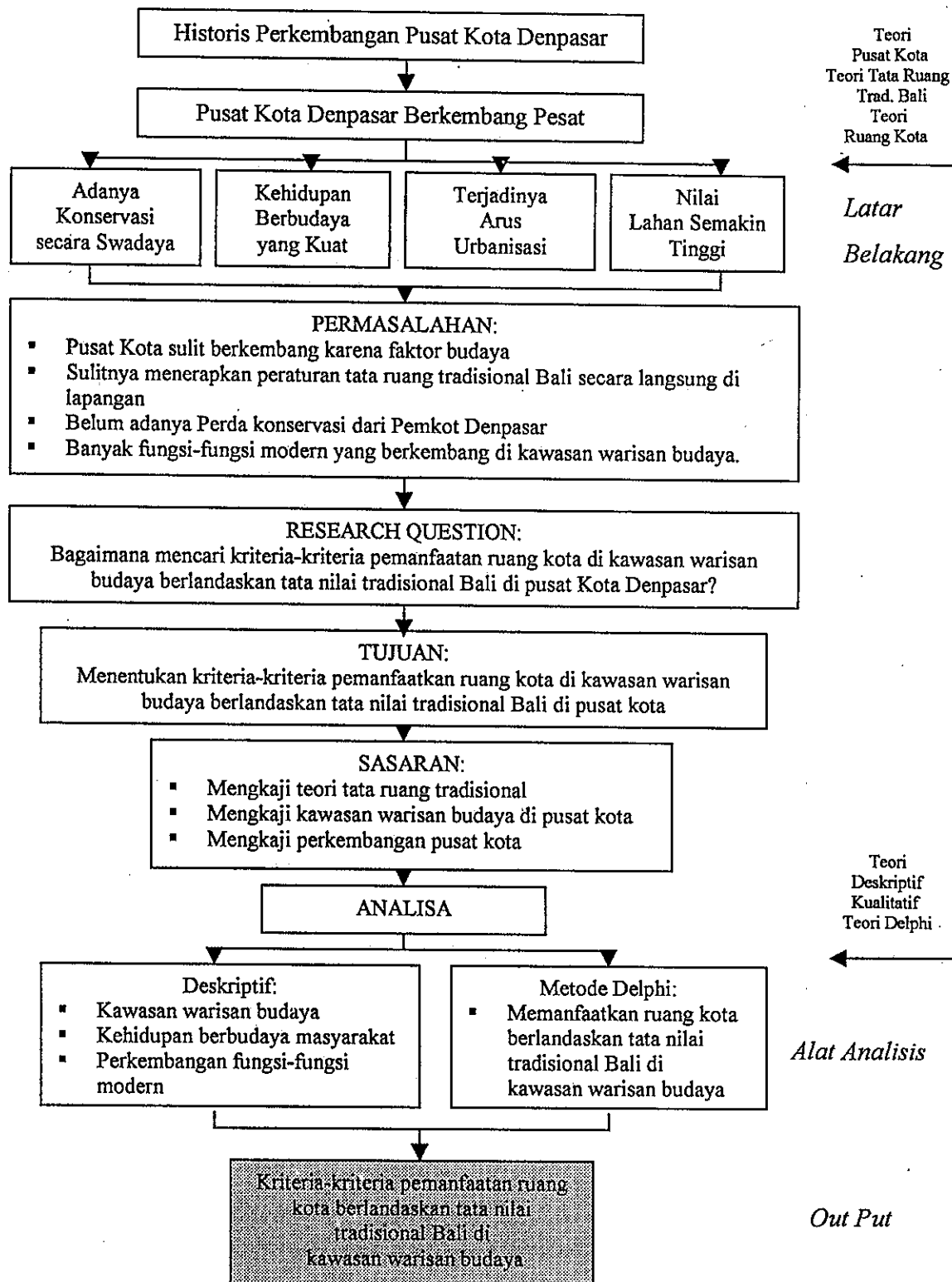
- Secara historis, perkembangan Kota Denpasar bermula dari pusat Kota Denpasar (sejak jaman kerajaan). Dan seiring dengan perkembangan jaman, pusat Kota Denpasar juga mengalami perkembangan pesat.
- Melihat perkembangan pusat Kota Denpasar yang sedemikian pesat, baik dalam bidang perekonomian, kependudukan (karena arus *urbanisasi*) dan lain-lain, menyebabkan banyak pengaruh luar yang masuk ke pusat Kota Denpasar dan nilai lahan di pusat kota yang semakin tinggi. Sedangkan kehidupan masyarakat

Kota Denpasar sangat kental dengan budaya yang ada, sehingga sudah melakukan konservasi secara swadaya. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya kawasan warisan budaya berupa Pura, Puri dan permukiman tradisional yang keberadaannya masih eksis hingga sekarang.

- Adanya Peraturan Daerah tentang pembatasan ketinggian maksimum bangunan juga mengakibatkan Kota Denpasar berkembang secara horisontal dan melebar ke pinggir.
- Tetapi di lain pihak, seiring dengan kemajuan dan perkembangan jaman, kebutuhan juga semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan tumbuhnya fungsi-fungsi modern di pusat Kota Denpasar.
- Untuk dapat menggambarkan bagaimana keadaan dan perkembangan pusat Kota Denpasar dan kawasan warisan budaya, digunakan *metode deskriptif kualitatif*.
- Walaupun sudah terjadi konservasi secara swadaya di masyarakat Kota Denpasar, perlu kiranya dibuat suatu peraturan atau ketentuan tertulis berupa kriteria-kriteria untuk dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional di pusat Kota Denpasar, karena walaupun sudah ada batasan secara tidak langsung berdasarkan budaya dan agama yang mereka anut secara tertulis sangat sulit menerapkannya di lapangan.
- Dengan kriteria-kriteria tersebut diharapkan dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar yang semakin penuh sesak.

Untuk lebih jelasnya, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyusunan penulisan tesis ini dapat dilihat pada kerangka pemikiran berikut:

GAMBAR 1.3
KERANGKA PEMIKIRAN



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang menjelaskan tentang perkembangan pusat Kota Denpasar yang begitu pesat. Di samping itu kehidupan budaya yang begitu kuat yang merupakan potensi dapat pula menghambat perkembangan pusat kota. Terjadinya konservasi secara swadaya di pusat Kota Denpasar membuktikan masyarakat Denpasar sudah peduli akan pelestarian warisan budaya. Konservasi secara swadaya yang mereka lakukan adalah berdasarkan kehidupan budaya dan agama yang mereka anut. Maka perlu kiranya ditentukan kriteria-kriteria yang dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar secara tertulis dan baku karena sampai saat ini sangat sulit atau masih terjadi kesenjangan antara kaidah-kaidah tradisional yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Diuraikan pula perumusan masalah yang didapat, tujuan, sasaran dan manfaat dari penulisan ini, ruang lingkup, baik lingkup substansial maupun lingkup spasial, metode analisis yang digunakan untuk dapat mengetahui kriteria-kriteria yang digunakan untuk memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat Kota Denpasar, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan yang memuat urutan dari penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PUSAT KOTA DENPASAR

Bab II yang berisikan gambaran umum mengenai pusat Kota Denpasar, mulai dari sejarah perkembangan pusat Kota Denpasar, kondisi pusat Kota Denpasar, serta peruntukan lahan (*land use*) di pusat Kota Denpasar tersebut.

BAB III : KAJIAN TATA RUANG

Dalam bab ini diuraikan tentang teori tradisional Bali dan teori kota modern, yang meliputi: tata ruang tradisional Bali, *konsep catus patha*, *Pura*, *Puri*, fasos tradisional Bali, pengertian kota, pengertian pusat kota, teori pusat kota, teori *urban design*, serta teori-teori mengenai konservasi, juga mengenai teori tentang warisan budaya. Dan pada tahap terakhir diuraikan rangkuman teori, serta hipotesis yang didapat dari kajian teoritis yang nantinya dapat digunakan dalam melakukan analisis pada Bab IV.

BAB IV : PEMANFAATAN RUANG KOTA BERLANDASKAN TATA NILAI TRADISIONAL BALI DI KAWASAN WARISAN BUDAYA DI PUSAT KOTA DENPASAR

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diungkapkan mengenai temuan, kesimpulan akhir dari penelitian ini serta rekomendasi yang dapat diberikan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

PUSAT KOTA DENPASAR

2.1 Sejarah Perkembangan Kota Denpasar (Historis)

Denpasar merupakan ibukota Propinsi Bali, berkembang dari bekas kota kerajaan dengan penataan ruang, sosial masyarakat diatur sesuai sistem budaya yang menjadi tradisi adat istiadat dengan berlandaskan pada budaya Bali. Falsafah budaya *Tri Hita Karana* sebagai landasan *konsep Catus Patha* adalah salah satu pedoman dasar penataan lingkungan/desa di Bali.

Sebagai daerah pariwisata disadari bahwa kedatangan wisatawan ke Bali adalah untuk mencari keunikan atau kekhasan Bali yang menjadi identitas serta daya tarik wisatawan. Sadar akan potensi yang dimiliki, dalam bidang arsitektur (tata bangunan) dan tata kota oleh pemerintah daerah Bali ditetapkan Perda no. 2, 3 dan 4 tahun 1974 yang diantaranya mengandung arahan-arahan untuk mendukung pariwisata budaya, sebagai pola dasar pengembangan tata ruang kota di Bali.

2.1.1 Denpasar sebagai Kota Kerajaan

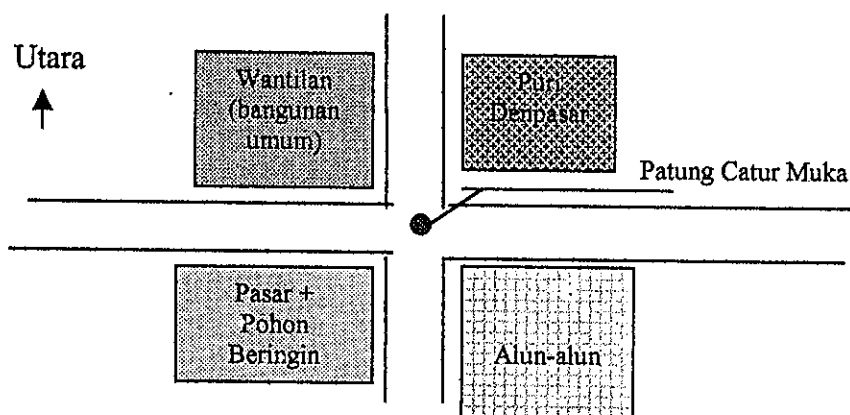
Pada mulanya, Kota Denpasar adalah merupakan bagian dari Kabupaten Badung. Pada tahun 1996, Denpasar berdiri sendiri sebagai Kotamadya dan sekarang telah berubah menjadi Kota Denpasar. Denpasar merupakan salah satu kota di Bali yang secara historis berkembang dari sistem pemerintahan kerajaan, sebagaimana dikisahkan oleh Agung (1989:392) bahwa:

- Semenjak tahun 1850 di Bali Selatan berkuasalah 7 (tujuh) kerajaan yang mempunyai kedaulatan penuh untuk memerintah ke dalam berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja bersangkutan dan Undang-Undang Bali yang diwariskan oleh nenek moyang rakyat Bali dari zaman bahari. Kerajaan-kerajaan itu adalah: Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Bangli dan Negara. Pada awal abad ke 20 hanya 4 (empat) kerajaan saja yang masih memiliki status politik dan kebebasan sebagaimana dijamin oleh kontrak yang ditanda tangani pada tahun 1849 (kerajaan tidak di bawah pemerintahan Hindia Belanda), yaitu: Klungkung, Bangli, Tabanan dan Badung.
- Kerajaan Badung sebenarnya diperintah secara kolektif oleh tiga raja, yaitu: Raja Denpasar, Raja Pemecutan dan Raja Kesiman. Karena Raja Pemecutan sudah lanjut usia dan sakit-sakitan, pimpinan politik di Kerajaan Badung dialihkan ke tangan Raja Denpasar, yaitu Gusti Gede Ngurah Denpasar.
- Sampai pada saat yang sangat bersejarah bagi Kota Denpasar (Kabupaten Badung), peristiwa yang dikenal sebagai Puputan Badung pada tanggal 20 September 1906. Peristiwa itu menunjukkan jiwa kepahlawanan Raja Badung dan Raja Pemecutan beserta seluruh pengikutnya untuk lebih baik berkorban dan gugur di medan laga membela kehormatan dan keadilan daripada menyerah kepada Belanda. Peristiwa yang terjadi di sekitar Puri Denpasar hingga saat ini diperingati setiap tahun. Dan tempat tersebut menjadi saksi peristiwa yang dinamakan *alun-alun* atau *Lapangan Puputan Badung*.
- Denpasar seperti keenam kota kabupaten lainnya di Bali merupakan kota kerajaan yang tumbuh menjadi kota kabupaten. Sebagai pusat kota kerajaan, penataan

lingkungan di sekitar Puri secara konseptual direncanakan mengikuti pola penataan *Pempatan Agung* yang merupakan implementasi *konsep Catus Patha*.

- Nama Puri Denpasar berarti istana kerajaan yang terletak di sebelah Utara pasar (Den = sebelah Utara, Pasar = pasar). Dengan pusat orientasi adalah pertemuan silang dari jalan yang membujur Timur – Barat dan Utara – Selatan yang disebut *Pola Pempatan Agung*. Elemen-elemen yang ada di seputar Pempatan Agung yaitu:

GAMBAR 2.1
ELEMEN-ELEMEN DI SEKITAR
PEMPATAN AGUNG PADA JAMAN BELANDA



2.1.2 Denpasar sebagai Kota Kolonial

Semenjak runtuhnya Kerajaan Badung dan mulai berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda, diikuti oleh perubahan sistem pemerintahan yang berpusat di Kota Denpasar. Sebagai kota kolonial, Denpasar dapat diamati dari beberapa aspek seperti ditulis oleh F. X. Soenaryo (1989: 80-103) sebagai berikut:

- Sistem birokrasi.

Jabatan tinggi seperti *residen*, *asisten residen* dan *kontrolir* dipegang oleh Belanda. Sedangkan untuk menjembatani dengan masyarakat jabatan sebagai *punggawa*, *perbekel* dan *kelian* diijinkan dipegang oleh pribumi. Residen sebagai kepala pemerintahan berkedudukan di Singaraja yang merupakan ibukota keresidenan Bali-Lombok. Sedangkan yang berkedudukan di Denpasar adalah asisten residen yang membawahi *afdeling* Bali Selatan melingkupi; Badung, Karangasem, Klungkung, Gianyar dan Bangli. *Regen* merupakan jabatan tertinggi yang dipegang pribumi, diserahkan pada raja-raja yang memerintah di Bali (berjumlah delapan) yang selanjutnya pada masa kemerdekaan menjadi ibukota kabupaten.

- Perubahan sosial budaya.

Mulai tahun 1914 sampai 1941 dibangun sekolah-sekolah untuk mendapat tenaga kerja yang lebih terampil, seperti HIS, *Tweede Indishe School* dan lain-lain sejumlah sembilan buah, ditambah dengan sebuah sekolah pribumi Taman Siswa. Dalam hal kebudayaan, dengan masuknya Belanda selain terjadi konflik juga menimbulkan akulturasi. Munculnya gereja, pembangunan dan perbaikan jalan, saluran irigasi, bangunan kantor, tangsi atau penjara dan juga tempat rekreasi seperti Museum Bali (1910) dan Museum Le Mayeur di Sanur (1937). Dan juga fasilitas akomodasi seperti Bali Hotel yang merupakan hotel pertama di Bali.

2.1.3 Perkembangan Kawasan Pusat Kota

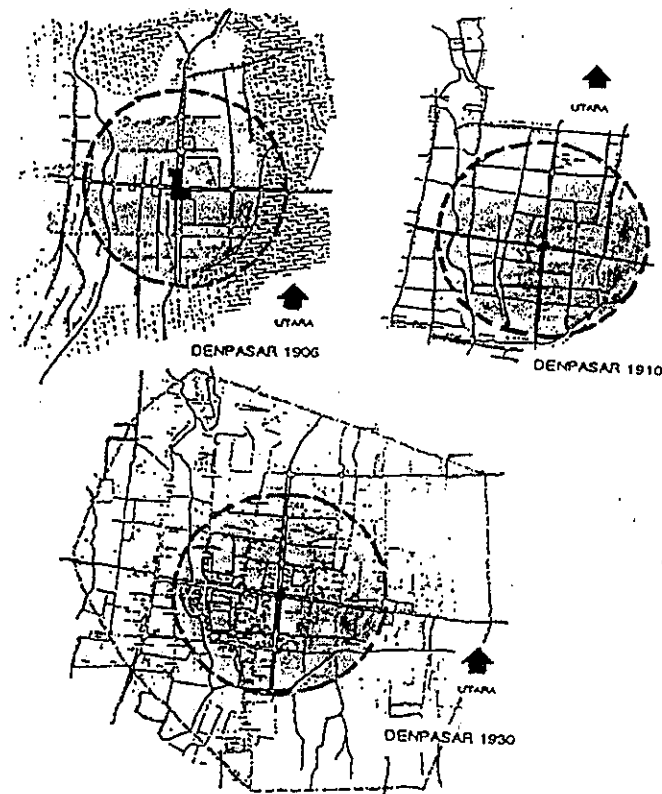
Perkembangan diamati mulai tahun 1906 (masa kolonial Belanda) sampai tahun 1930. Perkembangan kawasan pempatan agung tahun 1906 sudah membentuk sumbu silang pempatan yang demikian dominan. Pada pempatannya terjadi pelebaran ruang membentuk *core* atau inti yang berfungsi terutama untuk kegiatan ritual dan pasar/keramaian di pusat kerjaan.

Setelah diduduki oleh Belanda terjadi perubahan fisik, terutama pada sudut Tenggara pempatan yang semula masih area Puri. Saat terjadi puputan, Puri hancur hancur dan dijadikan alun-alun. Sedangkan pada sudut Timur Laut dibangun kembali untuk kantor residen.

Nampak jelas intervensi kolonial dalam menata kawasan pusat kota *mengikuti pola Grid*. Walaupun sumbu saling silang utama tetap dipertahankan dengan bentukan dimensi berbeda. Namun terlihat adanya pergeseran peran dari filosofi *Catus Patha* sebagai titik pusat kota digantikan oleh dominasi alun-alun. Gejala ini diperkuat dengan berpindahnya pusat kegiatan masyarakat di ruang terbuka, sebab sumbu silang yang sarat makna religi tersebut diprioritaskan untuk lancarnya arus kendaraan, tidak lagi mendahulukan kepentingan kegiatan adan dan budaya setempat.

Untuk melihat perkembangan kawasan pempatan agung/pusat Kota Denpasar, dapat dilihat pada peta berikut:

GAMBAR 2.2
PETA PERKEMBANGAN
KAWASAN PUSAT KOTA DENPASAR



Sumber: Dep. PU Kanwil Prop. Bali, 1995

2.2 Kondisi Pusat Kota Denpasar

2.2.1 Batas-batas

Titik Pusat Kota Denpasar adalah pada *Patung Catur Muka*, yang merupakan 0 (nol) km Kota Denpasar. Patung ini terletak di perempatan jalan, yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Veteran, Jalan Surapati dan Jalan Udayana.

Yang dimaksud dengan **Pusat Kota Denpasar** adalah seperti dapat dilihat pada gambar 2.3 dengan batas-batas sebagai berikut:



KRITERIA-KRITERIA PEMANFAATAN RUANG KOTA
BERLANDASKAN TATA NILAI TRADISIONAL BALI
DI KAWASAN WARISAN BUDAYA
DI PUSAT KOTA DENPASAR

PETA :

LEGENDA:

----- = BATAS WILAYAH PUSAT KOTA

SKALA

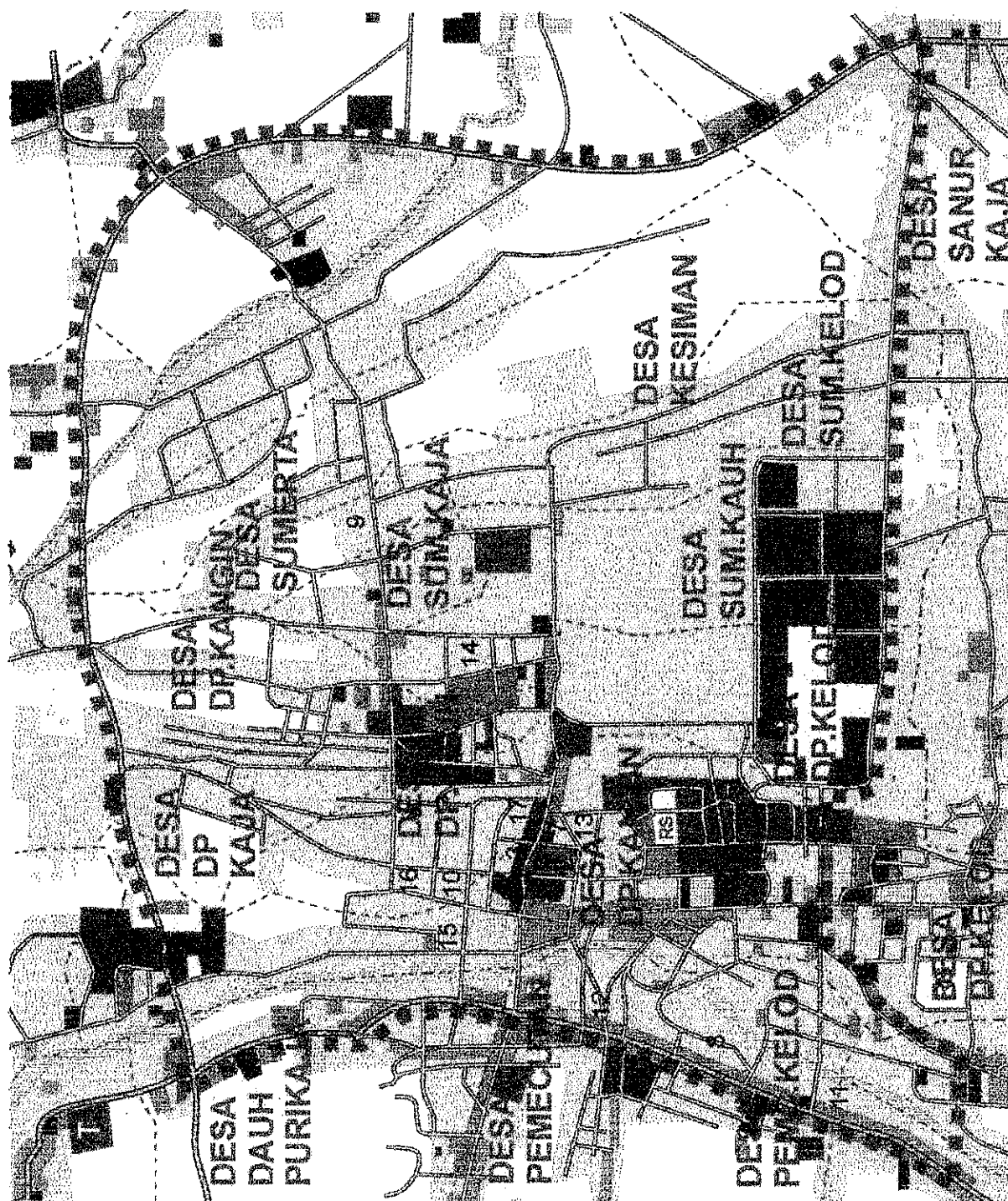
0,1 0,2 KM

NO. GAMBAR

NO. 141

SUMBER :

BAPPEDA KOTA DENPASAR



- Sebelah Utara : Jalan Gatot Subroto
- Sebelah Selatan : Jalan Teuku Umar, Jalan Dewi Sartika,
Jalan Raya Puputan
- Sebelah Barat : Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Setia Budi,
Jalan Wahidin, Jalan Thamrin dan Jalan Imam Bonjol
- Sebelah Timur : Jalan By Pass Ngurah Rai.

2.2.2 Fungsi-fungsi yang Berkembang di Pusat Kota Denpasar

Melihat lokasi dan fungsinya sebagai pusat kota, maka kegiatan *urban* yang diwadahnya cukup kompleks. Kompleksnya fungsi-fungsi yang berkembang di pusat Kota Denpasar pada satu sisi merupakan daya tarik untuk terus dikembangkan. Sedangkan pada sisi lain hal ini perlu dikendalikan untuk mengurangi intensitas pusat kota yang tergolong padat.

Fungsi-fungsi yang berkembang di pusat Kota Denpasar adalah:

1. Fungsi perdagangan dan jasa.

Fungsi perdagangan dan jasa yang paling berkembang adalah pada koridor-koridor utama pusat kota, baik koridor Utara, Timur, Selatan dan Barat.

2. Fungsi perkantoran.

Pusat Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan Pemkot Denpasar. Kantor Walikota dan instansi Pemkot yang lain juga terletak disana. Selain fungsi perkantoran pemerintah juga terdapat fungsi perkantoran militer (Kantor Kodam) dan kantor-kantor swasta lainnya. Juga fungsi-fungsi jasa seperti bank, travel atau penginapan/hotel.

3. Fungsi permukiman.

Di pusat Kota Denpasar sudah dipenuhi dengan fungsi-fungsi permukiman yang berasal dari pendatang. Hal ini ditandai dengan banyak kawasan perumahan yang tumbuh. Di samping itu, permukiman tradisional atau asli masyarakat juga masih banyak terdapat di pusat kota.

4. Fungsi peribadatan.

Fungsi ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari (rutin), mingguan, bulanan atau tahunan (periodik). Kegiatan ritual biasanya dilakukan di Pura. Tetapi keberadaan alun-alun Puputan Badung tepat di pusat kota juga digunakan untuk menampung fungsi ritual, seperti persembahyangan pada saat *tawur agung* (sehari sebelum Hari Nyepi), *sholat Ied* dan *sholat Idul Adha*.

5. Fungsi rekreasi atau wisata.

Wisata kota yang ada di pusat Kota Denpasar didukung dengan adanya alun-alun Puputan Badung sebagai *open space*, yang bisa digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga. Juga keberadaan obyek-obyek wisata lainnya.

6. Fungsi pendidikan.

Aktifitas pendidikan juga terdapat di pusat Kota Denpasar. Mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi.

2.2.3 Kegiatan Pendukung (*activity support*) di Pusat Kota Denpasar

Di sisi Barat pusat kota terdapat 2 (dua) buah pasar tradisional yang merupakan pasar terbesar di Kota Denpasar, yaitu Pasar Badung dan Kumbasari. Pasar ini pada jaman kerajaan berlokasi di Barat Daya pempatan agung (yang merupakan salah satu elemen *catus patha*)

yang sekarang menjadi Kantor Walikota. Tetapi karena habis terbakar pada masa penjajahan Belanda, lokasi pasar pindah ke arah Barat, di lokasi yang sekarang. Pasar Badung dan Kumbasari merupakan pusat kegiatan perdagangan tingkat regional, yang sangat potensial untuk mendukung kawasan perdagangan pusat kota.

Kegiatan pertokoan di sisi Barat pusat kota yang menyerupai daerah pecinan secara historis merupakan daerah pusat perdagangan kota. Kawasan ini mempunyai ciri khas yang dapat menjadi potensi dengan type toko berderet di sepanjang kanan dan kiri Jalan Gajah Mada.

Sedangkan di sisi Utara, Timur dan Selatan pusat kota juga berkembang sebagai daerah komersial, berupa warung dan rumah makan/restaurant. Keberadaan dan perkembangan kawasan ini akan memberikan dampak yang positif dan dapat merupakan potensi sebagai pusat bisnis dan wisata kota terpadu sehingga dapat mendukung keberadaan Denpasar sebagai pusat kota.

2.3 Peruntukan Lahan (*Land Use*) Pusat Kota Denpasar

Penggunaan tanah di pusat Kota Denpasar tersebar dalam beberapa bentuk dan karakteristiknya. Dimana jenis penggunaan tanah dapat mencirikan kegiatan pada kawasan pusat Kota Denpasar yang didominasi oleh perumahan dan perdagangan jasa.

Penggunaan lahan di pusat Kota Denpasar dibagi dalam beberapa SKPK (Sub Kawasan Pusat Kota). Pembagian SKPK ini sesuai dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Denpasar.

Maksud dan tujuan dari sub kawasan pusat kota adalah untuk menciptakan keseimbangan, kelestarian dan pendayagunaan arahan pengembangan kota, sehingga akan

lebih memudahkan dalam pengenalan karakter kawasan dan spesifikasi dalam pengadaan fasilitas serta utilitas kota.

Sub kawasan pusat kota merupakan salah satu jenjang dalam hirarki pelayanan kota.

Secara umum hirarki pelayanan kota akan meliputi:

- Pelayanan kawasan kota.
- Pelayanan sub kawasan kota.

Secara teknis proses penentuan sub kawasan pusat kota dilakukan klasifikasi kawasan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan faktor kepusatan, letak yang strategis, faktor penduduk dan tingkat kemudahan pencapaian yang tinggi. Sehingga dengan adanya ketentuan proses penetapan ini, sub kawasan pusat kota merupakan sub sistem dari seluruh aktivitas kota yang dapat mencirikan:

- Sub kawasan pusat kota sebagai satu kesatuan kegiatan, yang berarti harus mencerminkan homogenitas kegiatan fungsional, penduduk dan homogenitas kepadatan perumahan.
- Sub kawasan pusat kota merupakan suatu lingkup kawasan dengan batas fisik yang jelas dan spesifik sehingga mudah dikenali berupa jalan utama, sungai maupun bentuk fisik alamiah lainnya. Penggunaan tanah di setiap sub kawasan pusat kota mencerminkan kesatuan yang terpadu dan teratur sesuai dengan kondisi serta potensi fungsionalnya.

Pusat Kota Denpasar terdiri dari 5 (lima) sub kawasan pusat kota (lihat gambar nomor 2.4), dimana setiap sub kawasan pusat kota diharapkan akan menjadi kesatuan lingkungan atau kesatuan permukiman pengembangan. Penentuan fungsi pada masing-masing

sub kawasan pusat kotadibuat berdasarkan arahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Denpasar.

Fungsi dan peranannya adalah:

- Pusat perdagangan kota, wilayah dan sub wilayah.
- Pusat pemerintahan Tingkat I dan Tingkat II.
- Pusat pendidikan tinggi dan kebudayaan.
- Kawasan permukiman kepadatan 300-400 jiwa/Ha.
- Kawasan RTH, taman kota, budaya dan bangunan kuno.
- Bangunan suci.

Luas keseluruhan pusat Kota Denpasar adalah 1.873,201 ha. Sedangkan pembagian dan luasan sub kawasan pusat kota di pusat Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.1
PEMBAGIAN DAN LUASAN SUB KAWASAN PUSAT KOTA
DI PUSAT KOTA DENPASAR

No.	Sub Kawasan Pusat Kota	Luas (Ha)	Fungsi Sub Kawasan Pusat Kota (SKPK)
1	I	299,688	Pusat kebudayaan, perdagangan kota, RTH, bangunan kuno
2	II	349,062	Pusat pemerintahan Tk. I dan II, pendidikan
3	III	428,126	Pusat perdagangan wilayah/sub wilayah, RTH
4	IV	409,940	Pengembangan kebudayaan tradisional Bali, perdagangan
5	V	386,385	RTH, taman kota, pendidikan tinggi, industri kecil
TOTAL		1.873,201	

Sumber: RTRW Kota Denpasar

Penggunaan tanah pada SKPK I lebih didominasi oleh perumahan dan perdagangan jasa, untuk SKPK II didominasi oleh perkantoran dan perumahan, pada SKPK III didominasi oleh perdagangan dan jasa serta perumahan. Sedangkan pada SKPK IV dan V, terdapat

banyak tanah kosong yang merupakan area pengembangan untuk wilayah kota. Untuk luas penggunaan tanah di tiap SKPK dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.2
LUAS PENGGUNAAN TANAH TIAP SKPK
DI PUSAT KOTA DENPASAR

No	Penggunaan Tanah	SKPK I (Ha)	SKPK II (Ha)	SKPK III (Ha)	SKPK IV (Ha)	SKPK V (Ha)
A.	Terbangun					
1.	Perdagangan	18.04	8.245	12.576	16.52	9.6655
2.	Jasa dan Akomodasi Wisata	5.72	0.8875	2.985	1.105	1.9625
3.	Perumahan	204.68	143.38	255.687	142.0815	126.5015
4.	Perkantoran	11.77	64.93	11.725	6.72	3
5.	Pendidikan	8.46	3.73	9.1575	4.015	3.18
6.	Industri	4.625	0.61	7.24	0.364	2.827
7.	Peribadatan	6.1385	0.5	18.2180	6.95	5.1675
8.	Bale Banjar	1.75	-	4.25	2.1525	0.18
9.	Art Center	-	-	-	4.64	-
10.	Kesehatan	5.0625	-	3.9725	-	-
11.	Pom Bensin	-	0.915	0.5	-	-
12.	Museum	1.07	-	-	-	-
13.	Terminal	0.325	-	0.9325	-	-
14.	Gudang Militer	-	-	-	-	0.4275
B.	Non Terbangun					
1.	RTH	0.09	4.36	-	4.22	5.55
2.	Tanah kosong	-	58.875	36.23	141.729	138.3015
3.	Lap. Olah Raga	9.201	15.1	6.551	-	-
4.	Kuburan	0.93	-	2.51252.24	0.48	1.38
5.	Sungai	1.82	2.999	1	4.81	4.38
C.	Infra Struktur					
1.	Jalan	20.006	45.25	53.3475	74.153	83.162
	Jumlah	299.688	349.062	428.126	409.940	386.385
	TOTAL			1.873.201		

Sumber: RTRW Kota Denpasar

Untuk lebih jelasnya, pembagian SKPK di pusat Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut.




PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

KRITERIA - KRITERIA PEMANFAATAN RUANG KOTA
BERLANDASKAN TATA NILAI TRADISIONAL BALI
DI KAWASAN WARISAN BUDAYA DI PUSAT KOTA DENPASAR

PETA : PEMBAGIAN SKPK

LEGENDA :

 = BATAS WILAYAH PUSAT KOTA

SKALA

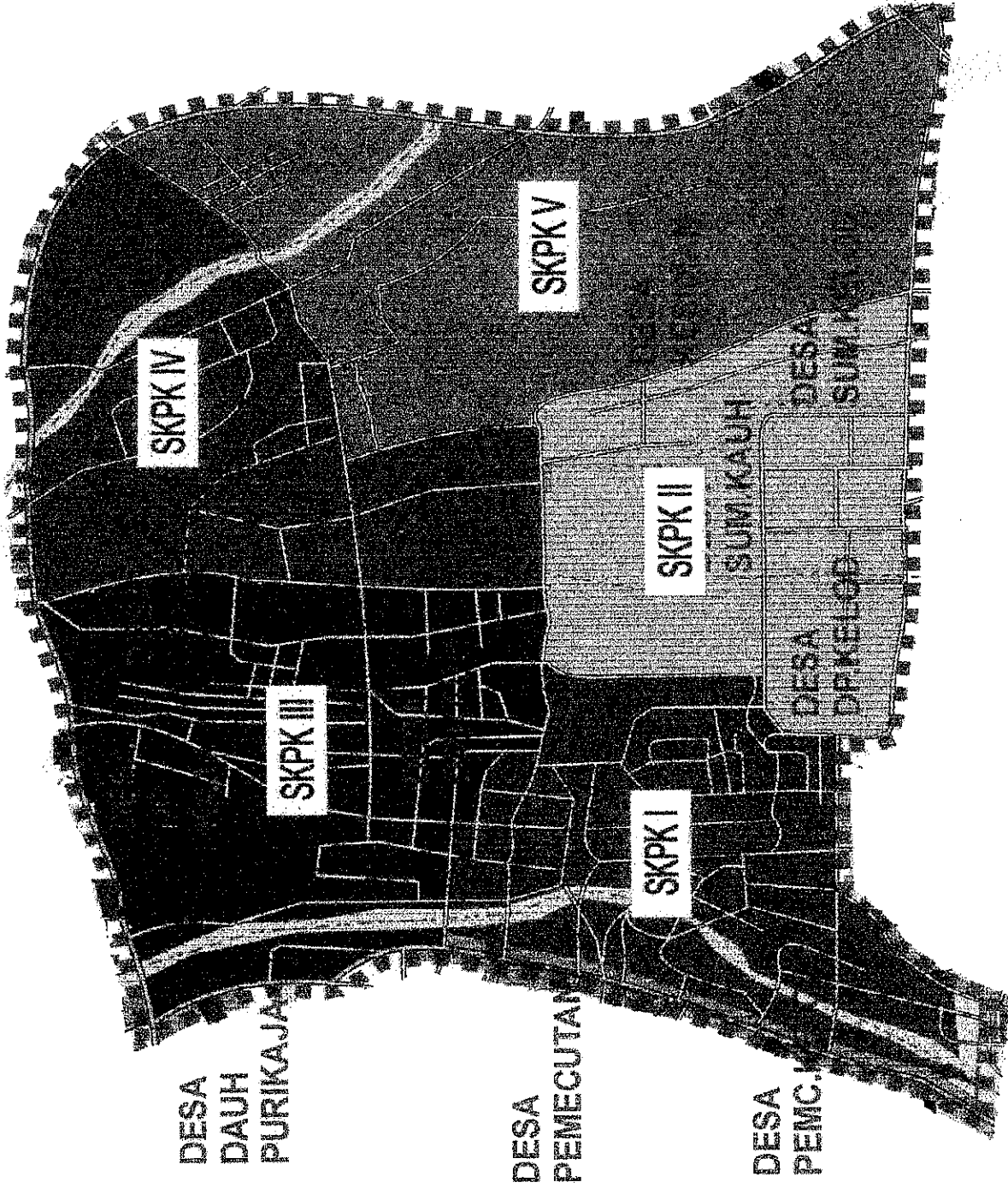
0.1 0.2 KM

NO. GAMBAR

NO. HAL

SUMBER :

BAPPEDA KOTA DENPASAR



BAB III

KAJIAN TATA RUANG

TEORI TRADISIONAL BALI

3.1 Tata Ruang Tradisional Bali

3.1.1 Latar Belakang Historis

Secara historis, bila ditinjau dari segi pengaruh arsitekturnya, Budaya Bali dikelompokkan menjadi beberapa zaman, yaitu:

- **Zaman Bali Kuna.**

Mulai diperkenalkan istilah Pura, Puri, Parahyangan dan Pawongan.

- **Zaman Majapahit.**

Sekitar awal abad 14, sebagai raja Bali pertama adalah Sri Kresna Kepakisan setelah Bali dikuasai pasukan dibawah pimpinan Patih Gajah Mada, dengan pusat kerajaan di Samprangan (Gianyar). Digantikan oleh Dalem Waturenggong sekitar abad 16. Pada masa itu datang pula Dang Hyang Nirartha yang dikenal dengan sebutan Pedanda Sakti Wawu Rawuh dari Jawa Timur. Beliaulah yang memperkenalkan penyempurnaan penataan Pura, Bali Banjar dan wantilan sebagai bangunan umum.

- **Zaman Kedatangan Orang Asing.**

Diketahui telah ada semenjak abad ke 8, seperti bangsa Cina dan Arab serta suku Bugis yang kemudian diberi tempat daerah pinggir pantai dan daerah perbatasan

kerajaan oleh Raja Bali. Menyusul kemudian kedatangan bangsa Belanda di Bali Utara pada tahun 1849 dan menguasai Bali Selatan pada tahun 1908. Mulai dikenal adanya bangunan *loteng*, kantor, *loji/lodge*, bangunan berjendela/*gedong betel* yang disebut juga Balisering. Serta dimulai dengan pemanfaatan bahan bangunan berupa porselin dan looster.

- Zaman Kemerdekaan.

Perubahan total terjadi pada sistem pemerintahan, pola berpikir dan cara hidup masyarakat Bali. Selanjutnya Bali dikenal sebagai daerah wisata. Perubahan yang terjadi paralel dengan keinginan adanya modernisasi yang tentu berpengaruh pada tata ruang, arsitektur serta wajah fisik kotanya.

Kebudayaan **Bali Mula**, merupakan kelanjutan dari masa pra sejarah dengan bentuk-bentuk arsitektur yang sederhana dan masih primitif. Masuknya kebudayaan Hindu mengembangkan **Bali Age** yang membentuk benda-benda alam dalam suatu susunan yang harmonis, dalam fungsinya menjaga keseimbangan manusia dengan alam lingkungannya.

Peninggalan perwujudan dapat ditemukan pada beberapa tempat seperti Gunung Kawi, Tirta Empul, Goa Gajah dan Bedulu (sebagai pusat kerajaan masa Bali Age). Dalam perkembangan selanjutnya sekitar abad 14, Bali dikuasai Majapahit yang dikenal sebagai orang-orang **Bali Arya**. Sampai berakhir dengan masa kerajaan di Bali dikuasai pemerintah kolonial Belanda (1906) yang menganggap orang Bali Mula, Bali Age dan Bali Arya adalah penduduk asli yang mengembangkan kebudayaan Bali.

Kebo Iwa merupakan arsitek besar pada masa Bali Age. Peninggalannya dalam bentuk bangunan antara lain konsep Bale Agung yang merupakan bagian dari kahyangan tiga. Sedangkan budayawan besar Mpu Kuturan yang mendampingi Anak Wungsu memerintah

Bali pada abad 11, merupakan tokoh arsitek yang banyak meninggalkan teori arsitektur, sosiologi, adat dan agama. Pola desa adat dengan konsep **Tri Hita Karana**, *kahyangan tiga*, *sanggah kemulan rong tiga*, *meru* dan pedoman upacara keagamaan lainnya adalah merupakan karya beliau.

Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong dari Majapahit pada abad 14, disebut pula Dang Hyang Nirartha/Dwijendra merupakan budayawan besar yang meninggalkan konsep-konsep arsitektur dan agam seperti konsep *Padmasana*. Setelah para Arya dari dinasti Waturenggong memerintah di delapan wilayah Bali (sekarang menjadi ibukota kabupaten), pedoman arsitektur dikembangkan oleh para *undagi* sebagai arsitektur tradisional Bali.

Kata *Kota* dalam Bahasa Bali berasal dari kata *Kuta*, yang berarti *benteng*. Sama halnya dengan kata Pura/Puri yang juga artinya benteng, istana, kerajaan. Kesan yang dikandung oleh kata kota itu pertama-tama adalah pusat keramaian disusul dengan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pertahanan. Penataan ini sudah dapat dikategorikan cikal bakal sebuah perancangan kota di Bali. Pada perkembangan selanjutnya setelah Bali dikuasai Belanda.

3.1.2 Filisofis Penataan Ruang Tradisional Bali

Konsep ruang tradisional Bali pada dasarnya bersumber dari **filosofi relegi kosmos**, yang memandang manusia dan alam sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur sama. Sehingga untuk menjelaskan antara alam kejiwaan dengan alam dunia fana diwujudkan melalui simbol-simbol.

Konsep Rwa Bhinneda, bentuk hubungan antara makro kosmos (*buana agung*) atau alam semesta dan mikro kosmos (*bhuana alit*) atau badan kasar manusia sebagai dua unsur

yang berbeda dan selalu ada, dimana satu sama lain saling mempengaruhi. Kosmos selalu mengalami suatu proses yang terus menerus sebagai akibat dari ketidakseimbangan kondisi. Proses ini mengandung dimensi waktu yang disebut dengan **konsep Tri Masa** (*Atita*/masa lalu, *Nagata*/masa kini dan *Wartamana*/masa datang) serta **konsep Nemu Gelang** (proses kembali ke asal tapi dalam kedudukan yang lebih tinggi).

Tetapi dalam kesimbangannya, makro kosmos dan mikro kosmos diatur melalui unsur-unsurnya yang disebut *Panca Maha Butha*: *apah*, *teja*, *bayu*, *akhasa*, *pertiwi* (cairan, sinar angin, udara dan zat padat). Sehingga kondisi setempat, iklim, fisik lingkungan dan sosial budaya sangat dipertimbangkan sebagai dasar penataan lingkungan (*desa*, *kala*, *patra*).

Melalui pemahaman keselarasan makro kosmos dan mikro kosmos atau yang disebut *Bhuana Agung* dan *Bhuana Alit*, yang dibedakan atas *purusa*/atma/jiwa dan *prakerti*/raga, maka dari filosofi tersebut diturunkan **konsep Tri Hita Karana** yang terdiri dari unsur-unsur *jiwa*, *tenaga* dan *fisik*. Serta adanya *prakerti* dalam penataan ruang sebagai perwujudan bentuk diturunkan **konsep Tri Angga**, yang terdiri dari unsur *utama angga*/sakral, *madya angga*/netral dan *nista angga*/provan.

Sedangkan sifat kosmos atau alam yang disimbolkan dengan *huruf suci Panca Brahma*. Filosofi inilah yang melahirkan **konsep Catus Patha**, yang memberi pengertian bertemunya pengaruh yang datang dari empat arah mata ngain (Timur, Selatan, Barat dan Utara). Jika konsep Catus Patha digabung dengan *Panca Aksara* maka akan melahirkan *konsep Dasa Aksara*. Filosofi ini kemudian menjiwai *konsep Astha Dala* (delapan penjuru mata angin) dengan satu inti di tengah, yang akhirnya melahirkan **konsep Dewata Nawa Sanga**. Konsep ini merupakan kristalisasi filosofi yang menggambarkan *pengendalian ketertiban proses kesimbangan alam, mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan*

sebagai jiwa dalam perencanaan fisik/tata ruang yang melahirkan konsep Nawa Sanga (sembilan pengendali).

Sifat kosmos yang mengandung *utpati*, *srhiti* dan *pralina* (dicipta, dipelihara dan dilebur) dalam konteks proses alam juga memberikan arti simbolis sebagai terbitnya matahari (Timur/*utpati*), teriknya matahari (Tengah/*shruti*) dan terbenamnya matahari (Barat /*pralina*). Hal tersebut yang digabungkan dengan konsepsi *Tri Angga* yang mewujudkan konsep tata ruang Bali, yang disebut **Sanga Mandala** (*sembilan zona*).

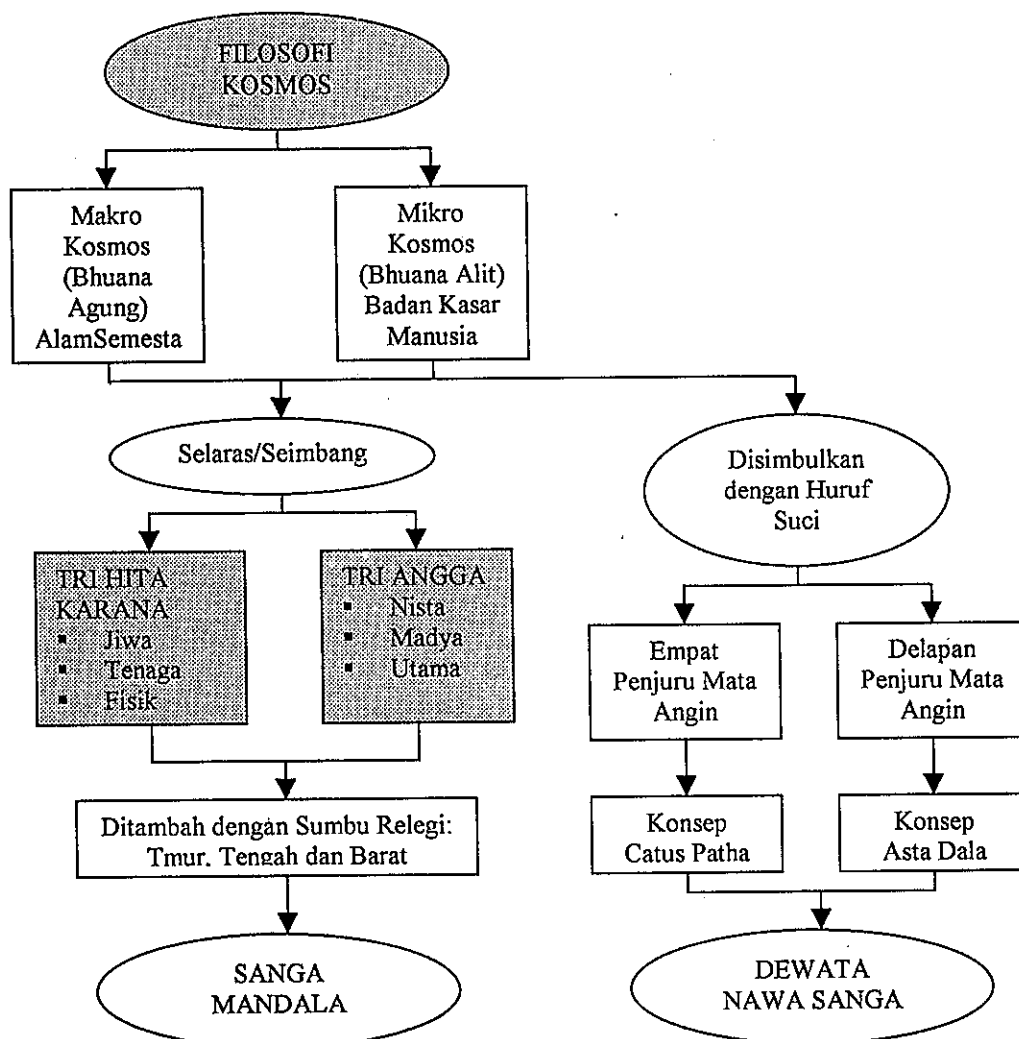
Secara konseptual tata ruang tradisional Bali didasarkan pada nilai yang dibentuk oleh 3 (tiga) sumbu, yaitu:

- Sumbu cosmos: *bhur loka*, *bhuah loka* dan *swah loka* (hidrosfir, litosfir dan atmosfer).
- Sumbu religi/ritual: *kangin* – *kauh* (arah terbit dan terbenamnya matahari).
- Sumbu natural/bumi: *kaja* – *kelod* (arah gunung dan laut).

Masing-masing dengan daerah tengah yang bernilai *madya*.

Untuk lebih jelasnya, landasan konsep ruang tradisional Bali dapat dilihat pada kerangka berikut ini:

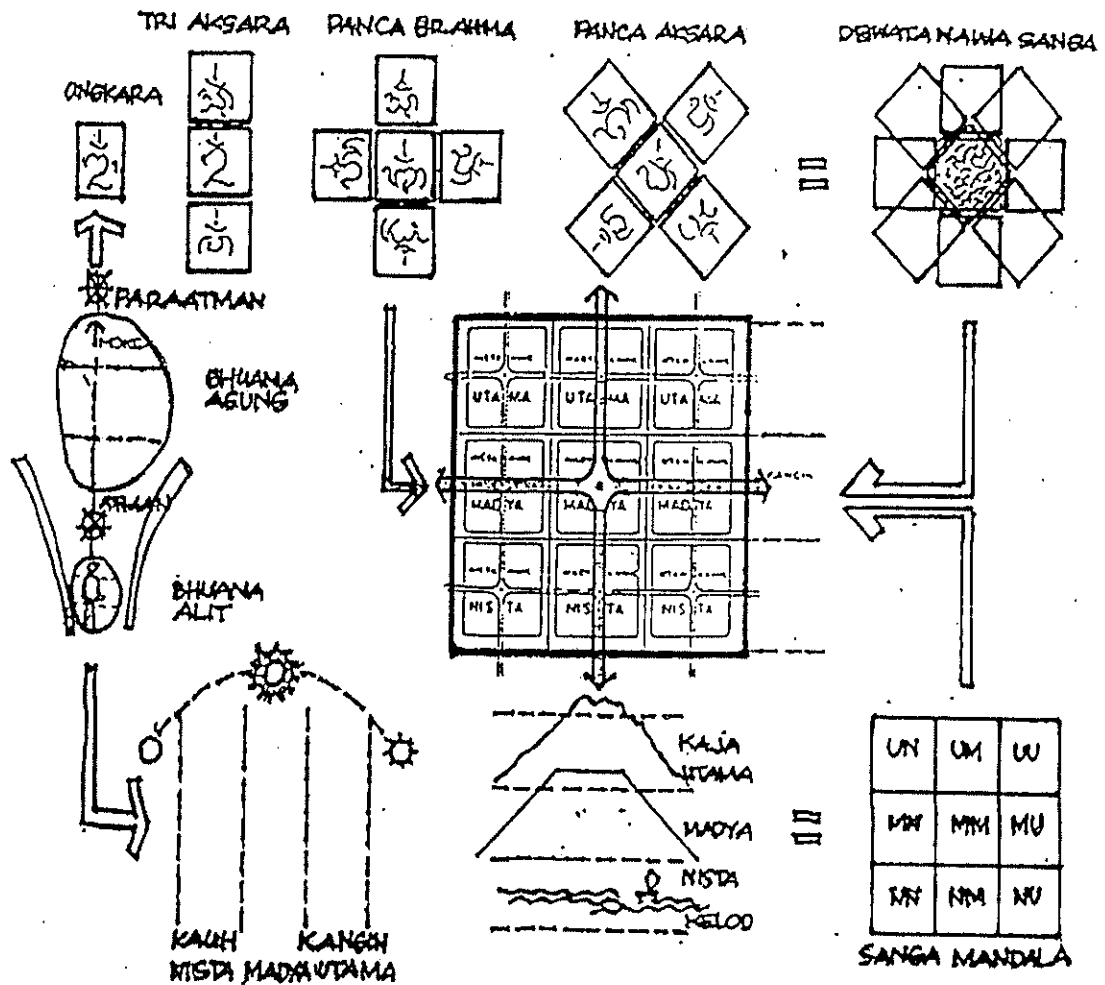
GAMBAR 3.1
KERANGKA LANDASAN
KONSEP RUANG TRADISIONAL BALI



Sumber: Meganada, 1990; Anindya P. 1991; RUTR. Dps. 1994

Sedangkan secara diagramatis, landasan konsep tata ruang tradisional Bali dapat digambarkan sebagai berikut:

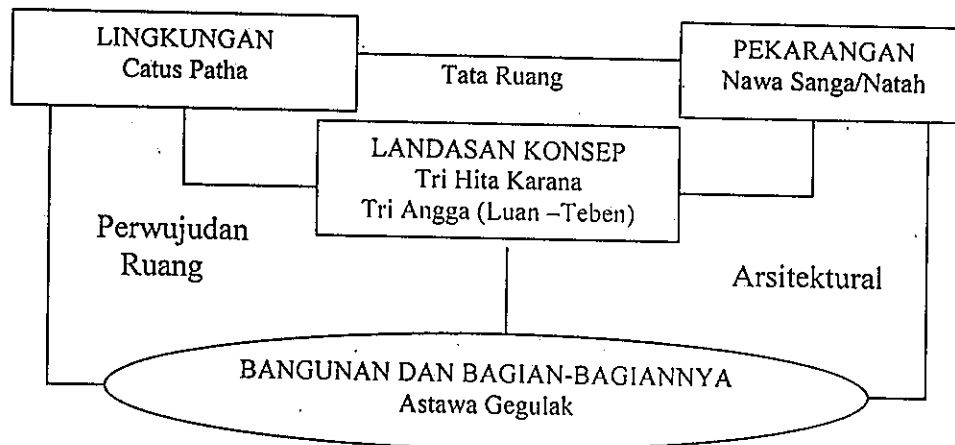
GAMBAR 3.2
DIAGRAM LANDASAN
KONSEP TATA RUANG TRADISIONAL BALI



Sumber: Meganada, 1990; Anindya P. 1991; RUTR. Dps. 1994

Penjabaran konsep tradisional ini teraplikasi dalam penataan ruang maupun perancangan bangunan. Hubungan tata ruang dengan konsep yang melandasinya dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut:

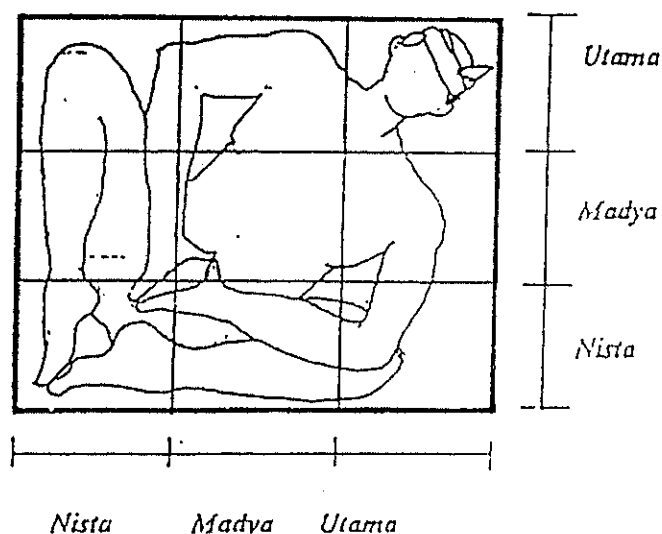
GAMBAR 3.3
HUBUNGAN TATA RUANG DENGAN
KONSEP TRADISIONAL BALI YANG MELANDASINYA



Sumber: Anindya P, 1991

Hal ini juga dapat dilihat pada fungsi unsur-unsur kosmos dalam konsep ruang tradisional Bali, yang dapat dilihat dalam gambar 3.4 berikut:

GAMBAR 3.4
FUNGSI UNSUR-UNSUR KOSMOS DALAM
KONSEP RUANG TRADISIONAL BALI



Sumber: Gelebet, Arsitektur Tradisional Bali

Konsepsi tradisional umumnya merupakan pengendapan filosofi ke dalam suatu kenyataan, demikian pula dalam arsitektur tradisional. Konsepsi tradisional dalam arsitektur tradisional Bali, dari pola-pola lingkungan, bentuk-bentuk arsitektur dan elemen ruangnya. Filosofi konsepsi tradisional merupakan dasar untuk perancangan, perencanaan dan detail arsitektur tradisional. Konsep dasar filosofi antara lain:

- *Rwa Bhineda* atau *semara ratih*, sebagai pertentangan tata nilai yang disatukan dalam suatu bangunan.
- *Tri Hita Karana*, yaitu tiga unsur yang menjadikan suatu kehidupan masing-masing fisik, tenaga dan jiwa.
- *Tri Angga*, yaitu konsep bentuk bangunan, terdiri dari kepala, badan, kaki yang masing-masing merupakan atap, konstruksi pemikul dan konstruksi penerus beban pada tanah bawahnya.
- *Tri Mandala*, yaitu konsep tata ruang secara makro berdasarkan tata nilai *utama*, *madya*, *nista*. Tri Mandala merupakan aspek wadah di dalam konsep ruang (ke arah horisontal) arsitektur Bali.
- *Nyatur Muka* atau *Nyatur Desa* yang merupakan *Pempatan Agung* sebagai pusat desa dengan tata nilai zoningnya masing-masing.
- *Tri Loka*, yaitu *konsepsi kosmologi* yang terbagi dalam tiga bagian vertikal sebagai tiga lapisan bumi berupa *Bhur Loka*, *Bhuah Loka* dan *Swah Loka* atau hisrosfir, litosfir dan atmosfer.
- *Panca Maha Buta*, yaitu lima unsur pembentuk hubungan manusia dengan alamnya. Merupakan lima unsur pembentuk manusia sebagai mikro kosmos dan makro kosmos.

- *Asta Dala, Nawa Sanga* dan *Sanga Mandala*, merupakan konsepsi penataan zoning dan site plan dalam suatu area.

Landasan kosnep dasar yang diturunkan dalam filosofi ini secara terus menerus sampai pada elemen terkecil yang pada hakekatnya merupakan penjabaran keselarasan kosmos melalui keseimbangan unsur-unsur *Tri Hita Karana* sebagai aspek isi/pola massa (*parhyangan/jiwa, palemahan/fisik, pawongan/prana*) dengan *Tri Mandala* sebagai aspek wadah/pola ruang (*utama mandala/ulu, madya mandala/netral, nista mandala/teben*). Adapun kedudukan filosofi dan landasan konsep ini bersifat kontekstual, dimana di dalam penjabarannya timbul keragaman bentuk tatanan lingkungan dan tatanan sosial. Hubungan filosofi relegi kosmos sampai konsep ruang tradisional dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL III.1
TRI HITA KARANA DALAM SUSUNAN KOSMOS

Susunan/Unsur	Jiwa	Tenaga	Fisik
Alam Semesta	Parama Atman	Tenaga yang menggerakkan alam	Unsur-unsur Panca Maha Butha
Lingkungan	Kahyangan Tiga	Sima Krama Desa	Palemahan/ Teritorial Desa
Tempat tinggal	Sanggah/Pemerajan	Manusia Penghuni	Pekarangan
Manusia	Atman/jiwa	Prana/tenaga	Sarira/badan

Sumber: Gelebet, Arsitektur Tradisional Bali

Filosofi *Tri Hita Karana* dan *Tri Mandala* sebagai landasan konsep ruang tradisional Bali menjelaskan tentang keselarasan hubungan kosmos (alam), mulai dari unsur kosmos yang terkecil diturunkan dari unsur kosmos yang lebih besar. Dimana dalam setiap unsur kosmos melambangkan adanya tiga aspek yang mempengaruhi bentuk hubungan keselarasan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL III.2
TRI MANDALA DALAM SUSUNAN KOSMOS

Susunan/unsur	Sakral/Utama/Ulu	Netral/Madya	Nista/Kotor/Teben
Alam semesta	Alam atas/ Swah Loka	Alam tengah/ Bhuah Loka	Alam bawah/ Bhur Loka
Wilayah	Gunung	Daratan	Laut
Kota	Kahyangan Tiga	Permukiman	Setra/kuburan
Tempat tinggal	Sanggah/Pemerajan	Bangunan rumah	Pintu masuk
Bangunan	Atap	Kolom/dinding	Lantai
Manusia	Kepala	Badan	Kaki
Kala/waktu/masa	Masa depan/ Warthamana	Masa kini/ Nagata	Masa lalu/ Atita

Sumber: Gelebet, Arsitektur Tradisional Bali

3.1.3 Konsep Tata Ruang Tradisional Bali dalam Konteks Kota

Dalam kosnep ruang tradisional Bali, pada dasarnya tidak menunjukkan adanya perbedaan antara kota dan desa. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut terlihat adanya perkembangan pola-pola lingkungan dan fungsi-fungsi yang menyertainya terdapat dua bentuk perkembangan, yaitu:

1. *Lingkungan desa* yang berkembang menjadi *pusat kerajaan*. Pada lingkungan ini ditandai dengan adanya *Puri* sebagai pusat pemerintahan, *pasar* sebagai pusat perdagangan/perekonomian, *wantilan* sebagai fasilitas hiburan dan *lapangan* sebagai fasilitas sosial/tempat berkumpul, *Tri Kahyangan*/kahyangan tiga (*Pura Desa, Puseh, Dalem*), *Pemerajan Agung* di dalam lingkungan Puri.
2. *Lingkungan Desa* yang perkembangannya tetap sebagai lingkungan permukiman. Ruang permukiman yang berada di sekeliling pusat kerajaan merupakan tempat tinggal para pembantu raja dan keluarga raja, sedangkan rakyat berdiam di desa-desa sekitar kerajaan.

Melihat pola-pola lingkungan pusat kerajaan yang berkembang menjadi ibukota kabupaten dan kota di Bali, terkandung 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Adanya elemen-elemen yang sama namun perletakannya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, yaitu: Puri, wantilan, pasar dan lapangan dengan pohon beringinnya.
2. Adanya pola yang sama yaitu Pempatan Agung yang mengikat elemen-elemen di atas.
3. Adanya beberapa lingkungan permukiman yang berada di sekitar pusat kerajaan membentuk teritorial kerajaan.

Ketiga aspek tersebut menunjukkan keragaman dalam penerapan konsep ruang tradisional Bali pada tempat yang berbeda (ini juga sesuai dengan *Konsep Tri Premana*, yaitu *desa/tempat, kala/waktu, patra/keadaan*).

Sedangkan tata letak suatu Puri di Bali tertuang dalam prasasti *Eka Pretamaning Brahmana Sakti Ujangga*, yang menyebutkan bahwa posisi Puri berada pada pojok *kaja kangin* (Timur Laut) dari pempatan agung.

Pada umumnya kota-kota di Bali bermula sebagai pusat kerajaan dengan titik pusatnya bermula pada *pempatan agung*. Pempatan Agung diberi nama untuk suatu batasan wilayah setingkat kerajaan/kota. Pempatan lainnya tanpa sebutan agung adalah sebatas melayani suatu desa adat. Dalam suatu desa adat terdapat beberapa banjar adat yang melayani 100 sampai 200 *pengarep*/warga desa. Luas area pelayanan suatu pempatan agung adalah sama dengan luas wilayah kerajaan.

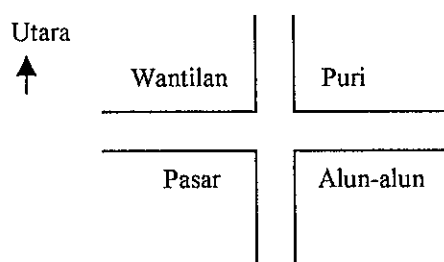
3.2 Konsep Catus Patha

3.2.1 Pengertian Catus Patha

Karakter khas *Catus Patha* yang pada tradisi tata ruang tradisional Bali disebut *Caturmuka* atau *simpang empat*. Pada posisi ini bangunan-bangunan negara yang penting berada. Simpang empat ini menjadi pedoman orientasi arah-arrah yang akan diambil ke dalam atau keluar kota (Wiryomartono, 1995:56). Selaras dengan ungkapan Ketut Alit (1995, II-31) bahwa *pola Pempatan Agung* adalah tempat untuk masuk dan keluar, dapat memiliki arti sakral maupun profan.

Elemen-elemen yang terdapat di pempatan agung adalah:

GAMBAR 3.5
ELEMEN-ELEMEN DI PEMPATAN AGUNG



Sumber: Gelebet, Arsitektur Tradisional Bali, tahun 1981/1982

3.2.2 Konsep Catus Patha dan Penataan Desa/Lingkungan di Bali

Dalam lingkungan tradisional Bali tidak dikenal adanya istilah kota. Istilah kota di Bali disebut dengan desa, yang walaupun pada masa yang sudah berkembang seperti sekarang ini, dimana Denpasar tumbuh sebagai kota metropolitan dan merupakan tujuan wisata dunia, tetapi wilayah-wilayah perkotaan di Bali tetap saja menggunakan istilah desa untuk kota-kota tersebut.

Terdapat 2 (dua) pengertian desa yang sempat saat ini masih berlaku di Bali, yaitu:

1. Desa Adat.

Desa adat adalah suatu daerah teritorial masyarakat yang warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan kegiatannya berkaitan dengan urusan adat serta keagamaan untuk memelihara kesucian desanya. Dalam hal ini yang mengikat warga adalah Karang Desa (Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem). Syarat untuk adanya suatu desa adat adalah lengkapnya *Tri Hita Karana*: *atma*, *angga* dan *khaya* (jiwa, fisik dan tenaga). Sedangkan *Kahyangan Tiga* adalah sebagai *atma*/jiwa, teritorial desa sebagai *angga*/fisik dan *sima krama desa*/penduduk yang berkepemerintahan) sebagai *khaya*/tenaga.

2. Desa Dinas.

Desa dinas adalah suatu kesatuan wilayah administratif di bawah kecamatan. Yang mengikat warga adalah kesatuan fungsi yang dijalankan oleh aparat pemerintah (struktur vertikal). Umumnya berkaitan dengan administrasi pemerintahan menyangkut batas-batas fisik secara jelas dan mengatur kependudukan.

Miguel Covarubias (1950) menyatakan bahwa masyarakat Bali membedakan daerah perumahan dengan bagian desa yang diperuntukkan untuk kegiatan umum, seperti Pura, bale pertemuan, pasar, kuburan dan tempat mandi umum. Desa merupakan kesatuan organisme yang setiap bagiannya adalah sel yang hidup dan setiap lembaga yang ada adalah satu bagian. **Jantung desa adalah alun-alun.** Alun-alun merupakan pusat yang lokasinya selalu mengambil tempat di pusat desa, terbagi atau terbelah oleh dua jalan besar yang membujur arah Utara – Selatan dan berpotongan dengan jalan arah Timur – Barat, sehingga membentuk

jalan silang (cross road). Pola seperti inilah yang disebut dengan **Pempatan Agung**, yang mempunyai arti penting sebagai **pusat orientasi desa**.

Kawasan *Pempatan Agung* yang merupakan implementasi dari konsep penataan lingkungan *Catus Patha* dengan segala atribut budaya yang dikandungnya adalah sebagai identitas kota-kota di Bali. Kawasan pusat kota dengan karakter tradisional ditata dari sistem budaya lokal (setempat), sebagai perwujudan perilaku masyarakat tercermin pada tatanan fisiknya. Makna kawasan yang menjadi pusat orientasi telah terwujud selama ratusan tahun sebagai akumulasi dari sistem budaya lokal yang sampai saat ini masih dapat dirasakan.

3.2.3 Filosofis Catus Patha

Pempatan agung yang merupakan implementasi dari konsep *catus patha* merupakan orientasi ritual bagi umat Hindu, maksudnya jika mereka akan melakukan kegiatan ritual mereka akan berpatokan dari pempatan agung tersebut.

Pempatan agung dapat memiliki arti sakral maupun profan, artinya apabila suatu zona terletak di daerah Timur Laut dari pempatan agung, maka zona tersebut bersifat *utama* (kepala), karena daerah tersebut mempunyai nilai kesucian yang paling tinggi. Peruntukan zona ini adalah sebagai bangunan sakral. Sedangkan pada daerah Tenggara dan Barat Laut dari pempatan agung adalah merupakan zona yang bersifat *madya* (badan). Zona ini mempunyai nilai kesucian lebih rendah dibandingkan dengan zona utama. Daerah ini diperuntukan bagi fasilitas-fasilitas yang bersifat sosial. Dan pada daerah Barat Daya pempatan agung adalah merupakan daerah *nista* (kaki). Zona ini memiliki nilai kesucian paling rendah. Pada zona ini biasanya diperuntukan sebagai daerah komersial atau daerah *service*.

3.2.4 Penentuan Titik Pempatan Agung

Di dalam lontar *Kuna Drstha* (*Loka Drstha*) terdapat kesepakatan-kesepakatan yang diakui secara turun temurun oleh warga masyarakat di Bali untuk menentukan titik pusat *pempatan agung*. Dasar pertimbangan penentuan titik “*as*” *pempatan agung* tersebut meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Arah lintasan matahari.

Lintasan matahari (*kangin-kauh*/timur-barat) sebagai faktor penentu dimana titik pusat *pempatan agung* tersebut diletakan. Ketika posisi matahari berada tepat tegak lurus pada suatu kawasan, maka di tempat itulah ditetapkan sebagai titik pusat *pempatan agung*. Posisi matahari tegak lurus hanya terjadi pada *sasih kapat* (bulan ke empat hitungan Bali, biasanya jatuh pada Bulan Oktober atau Nopember), sehingga pada saat itu dapat ditentukan daerah mana yang tepat dilintasi sinar matahari secara tegak lurus dengan bumi/tanah. Setelah ditetapkan titik lintasan tegak lurus tersebut, selanjutnya ditarik garis *kaja-kelod*/utara-selatan yang berposisi tegak lurus dengan lintasan tadi untuk menemukan titik perpotongan sehingga dapat diketahui posisi titik “*as*” *pempatan agung* secara pasti. Arah *kaja-kelod* untuk daerah dataran rendah dapat ditentukan berdasarkan posisinya yang saling tegak lurus dengan lintasan matahari pada *sasih kapat*.

2. Letak geografis.

Untuk menentukan *pempatan agung* juga ditentukan oleh letak geografis suatu daerah, apakah daerah tersebut termasuk pegunungan/dataran tinggi atau dataran rendah. Jika lokasi suatu kawasan berada di daerah pegunungan, maka yang dijadikan acuan pertama kali adalah arah *kaja kelod*/utara selatan, yaitu

pandangan ke arah puncak gunung sebagai titik pusat *kaja*. Sedangkan jika lokasi suatu kawasan berada di daerah dataran rendah terjadi kesulitan untuk melihat ke arah puncak gunung (*arah kaja*) yang sering tertutup awan, pepohonan atau berada di balik perbukitan. Pada daerah pegunungan, setelah diketahui arah ke puncak gunung tersebut adalah *kaja*/utara, secara langsung akan diketahui pula arah *kelod*/selatan. Selanjutnya ditarik garis *kangin-kauh*/timur-barat yang berposisi tegak lurus dengan garis *kaja-kelod*/utara-selatan yang telah lebih dahulu ditetapkan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa ketentuan di atas hanya untuk melakukan penetapan satu titik pusat pempatan agung saja. Sedangkan titik-titik pempatan agung pada tingkat di bawahnya ditentukan berdasarkan titik sumbu utama site/tapak, namun tetap saling tegak lurus sebagai pertemuan *sumbu bumi* (*kaja-kelod*/utara-selatan) dengan *sumbu relegi* (*kangin-kauh*/timur-barat). Jadi akan terdapat banyak alternatif pola-pola pempatan agung yang berada pada pusat-pusat unit lingkungan di bawahnya.

3.3 Pura

Pura merupakan tempat ibadah atau persembahyangan bagi umat Hindu. Tempat ibadah atau tempat pemujaan adalah bangunan-bangunan suci yang dibangun di tempat suci atau tempat-tempat yang disucikan.

Pura dalam berbagai bentuk dan fungsi pemujaannya terdiri dari beberapa masa bangunan yang ditata dalam suatu susunan komposisi di pekarangan yang dibagi menjadi tiga zona, yaitu:

- Zona utama disebut *jeroan*, tempat pelaksanaan pemujaan persembahyangan.

- Zona tengah disebut *jaba tengah*, tempat persiapan dan pengiring upacara.
- Zona depan disebut *jaba sisi*, merupakan tempat peralihan dari areal luar Pura ke areal dalam Pura.

Bangunan Pura pada umumnya menghadap ke Barat, dan orang yang akan memasuki Pura masuk menuju ke arah Timur. Demikian pula terhadap persembahyangan yang dilakukan, yaitu menghadap ke arah Timur, arah terbitnya matahari.

Ada beberapa jenis Pura yang dikenal di Bali, yaitu:

- Pamerajan.

Merupakan Pura tempat pemujaan keluarga dari satu unit keluarga rumah tangga sampai keluarga besar. Letaknya termasuk di dalam areal rumah tinggal mereka. Untuk tempat pemujaan keluarga dari kasta Brahmana dan Ksatria disebut *Pamerajan* sedangkan untuk pemujaan dari kasta lainnya disebut *Sanggah*.

- Kahyangan Tiga.

Merupakan Pura untuk tempat pemujaan warga sedesa yang terdiri dari beberapa banjar. Kahyangan Tiga terdiri dari tiga unit Pura yang merupakan bagian dari desa adat, yang mencerminkan konsep Tri Hita Karana. Pura-pura yang termasuk Kahyangan Tiga adalah: *Pura Desa*, *Pura Puseh* dan *Pura Dalem*, dengan fungsinya masing-masing sebagai tempat pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai *Dewa Brahma*, *Wisnu* dan *Siwa* (pencipta, pemelihara dan pelebur).

Pura Desa dan Pura Puseh terletak di pusat desa di bagian zoning utama (kaja kagin dari perempatan pusat desa). Pura Dalem terletak di dekat kuburan di bagian teben desa pada arah kelod atau kelod kauh desa.

- Kahyangan Jagat.

Merupakan Pura-pura yang bersifat umum, tidak terbatas pada desa-desa tertentu, keluarga tertentu, profesi tertentu ataupun kasta tertentu. Umat pemujanya bukan hanya mereka yang berada di wilayah tersebut, tetapi merupakan kewajiban mereka dari semua daerah untuk bersembahyang di Pura-pura Kahyangan Jagat. Di Bali terdapat 18 (delapan belas) Pura yang termasuk Pura Kahyangan Jagat, termasuk diantaranya *Pura Besakih* dan *Pura Jagatnatha*.

- Sad Kahyangan.

Merupakan 6 (enam) dari 18 Pura yang tergolong Pura Kahyangan Jagat. Sad Kahyangan mulai ditetapkan pada masa pemerintahan Sri Uga Sena abad ke 10, Anak Wungsu abad ke 11, dengan Mpu Kuturan sebagai pembina pengembangan agama sampai masuknya kekuasaan Majapahit di Bali.

3.4 Puri

Puri merupakan rumah tempat tinggal untuk kasta ksatria yang memegang pemerintahan. Puri umumnya terletak di bagian *kaja kangin* (Timur Laut) dari perempatan agung pusat desa. Penghuni Puri berperan sebagai pelaksana pemerintahan dan puri sendiri adalah merupakan pusat pemerintahan. Dengan demikian Puri dibangun sesuai dengan keperluan ruang, pola dan suasana ruang yang menunjang kewibawaan pemerintah.

Umumnya Puri dibangun dengan tata zoning yang berpola *Sanga Mandala* (pola papan catur). Dan menggunakan *pola natah*, yaitu di antara satu bangunan dengan bangunan yang lain yang terletak di dalam Puri diikat oleh suatu open space yang disebut *natah*.

Sedangkan rumah tempat tinggal untuk kasta ksatria yang tidak memegang pemerintahan secara langsung disebut *Jero*. Pola ruang, penataan zoning dan bangunannya umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan Puri.

3.5 Permukiman Tradisional Bali

Di Bali, desa adat merupakan suatu bentuk permukiman dengan pola *Tri Hita Karana*, yaitu terdiri dari unsur jiwa, fisik dan tenaga, yang masing-masing diwujudkan dalam bentuk tempat ibadah, teritorial/fisik desa dan warga desa dengan segala peraturannya.

Rumah sebagai tempat tinggal merupakan unit-unit perumahan yang diatur dalam kelompok-kelompok banjar sebagai unit sub lingkungan dalam sebuah desa. Tingkatan kasta, status sosial dan peranannya di masyarakat merupakan faktor-faktor tingkat perwujudan rumah tempat tinggal menjadi *utama*, *madya* dan *nista* (sederhana). Pengelompokan ini dinilai berdasarkan luas pekarangan, susunan ruang, type bangunan, fungsi, bentuk dan material yang digunakan.

Sedangkan ditinjau dari nama, rumah tempat tinggal dibedakan sesuai dengan tingkatan kasta pemiliknya. *Puri* merupakan tempat tinggal utama. Sedangkan rumah yang lain tergolong ke tingkatan *madya* atau *nista*.

Suatu kawasan permukiman dapat dikatakan termasuk ke dalam permukiman tradisional Bali, jika permukiman tersebut masih menggunakan pola-pola tradisional Bali yang berlaku. Pola tersebut adalah: permukiman menggunakan *pola natah* (ruang kosong) pada bagian tengahnya sebagai pengikat bangunan-bangunan di sekitarnya. Sedangkan bangunan-bangunan yang ada memiliki fungsi tradisional yang berkaitan dengan upacara yang dilakukan umat Hindu. Bangunan-bangunan tersebut adalah: *Bale Daja* (gedong), *Bale Dangin*, *Bale*

Delod dan *Bale Dauh*. Sedangkan fungsi-fungsi tradisional lain yang terdapat di dalam lahan perumahan adalah *jineng* (lumbung padi), dapur tradisional dan *teba* (pekarangan yang digunakan untuk berkebun dan memelihara ternak). Dan hal prinsip yang harus terdapat di permukiman tradisional Bali adalah *merajan/sanggah wayah* (tempat suci/ibadah keluarga yang keberadaannya paling tua dan dihormati). Keberadaan tempat suci inilah yang mengikat penghuni rumah untuk tetap mempertahankan keberadaan rumah tradisional mereka, yang biasanya mereka sebut dengan *umah tua* (rumah tua).

Yang termasuk di dalam permukiman tradisional Bali adalah Puri atau Jero dan rumah-rumah yang masih menggunakan pola tradisional Bali.

3.5.1 Konsep Sanga Mandala

Sanga Mandala yaitu Tata Nilai Rumah Tinggal berdasarkan sembilan penjuru mata angin sesuai dengan hirarki ruang *utama*, *madya*, *nista*. Pada posisi *kaja kangin* (timur laut) merupakan daerah dengan tata nilai paling tinggi (*utamaning utama*), yaitu peruntukan sebagai Pura, Puri, rumah pejabat atau perkantoran. Pada posisi *kaja kauh* (barat laut) merupakan daerah dengan tata nilai *utamaning nista*, yang diperuntukan sebagai wantilan, balai pertemuan serta tempat hiburan masyarakat. Pada posisi *kelod kangin* (tenggara) merupakan daerah dengan tata nilai *nistaning utama*, yang diperuntukan sebagai lapangan atau fasilitas sosial. Sedangkan pada posisi *kelod kauh* (barat daya) merupakan daerah dengan tata nilai *nistaning nista*, yang diperuntukan sebagai pasar atau kawasan perdagangan.

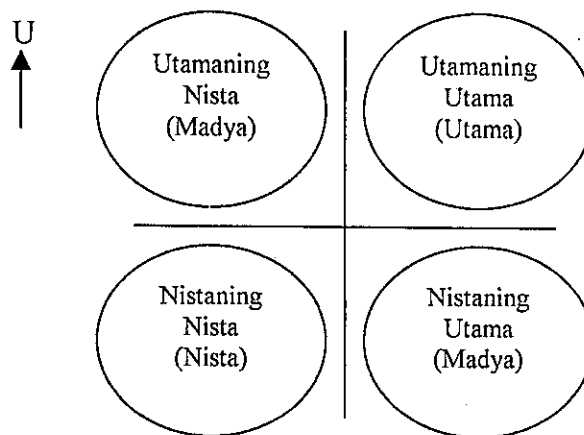
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan sketsa berikut:

TABEL III.3
HIRARKI RUANG BERDASARKAN SANGA MANDALA

No.	Arah Mata Angin	Hirarki Ruang	Peruntukan
1.	Kaja Kangin (Timur Laut)	Utamaning Utama (Utama)	Pura, Puri, rumah pejabat, perkantoran
2.	Kaja Kauh (Barat Laut)	Utamaning Nista (Madya)	Wantilan, balai pertemuan, tempat hiburan
3.	Kelod Kangin (Tenggara)	Nistaning Utama (Madya)	Lapangan, fasilitas sosial
4.	Kelod Kauh (Barat Daya)	Nistaning Nista (Nista)	Pasar, kawasan perdagangan

Sumber: Gelebet, Arsitektur Tradisional Bali

GAMBAR 3.6
HIRARKI RUANG BERDASARKAN SANGA MANDALA



Sumber: Gelebet, Arsitektur Tradisional Bali

3.5.2 Konsep Asta Bumi

Norma-norma dan prinsip *Asta Bumi* yang terkandung dalam tata cara mengatur pekarangan dan tata letak bangunan dalam suatu ruang atau areal permukiman dilatar belakangi oleh filosofis *Tri Hita Karana*, dengan konsep-konsepnya:

- Konsep wadah (*Tri Mandala*): *utama, madya, nista* (kepala, badan, kaki).
- Konsep *Tri Loka*: *bhur, bwah, swah* (bawah, tengah, atas).
- Konsep Hirarki Tata Nilai: *utama, madya, nista* (ulu, tengah, teben).
- Arah mata angin (*Dewata Nawa Sanga*).

- Sumbu bumi (*kaja-kelod*) dan sumbu relegi (*kangin-kauh*).
- Pengider-ider berupa *aksara suci*.

Norma-norma yang berlaku di atas dilandasi oleh Adat dan Agama Hindu di Bali yang penerapannya disesuaikan dengan *Desa* (tempat), *Kala* (waktu) dan *Patra* (keadaan). Desa atau tempat sangat mempengaruhi pola tata ruang perumahan dan permukiman. Misalnya pada daerah landai dapat diterapkan *pola grid* atau *linear*. Sedangkan pada daerah miring dapat diterapkan *pola linear*. Dan untuk *kala* serta *patra* dapat mempengaruhi tata ruang, namun terjadinya melalui suatu evolusi.

3.5.3 Pola Permukiman Tradisional Bali

Ada 3 (tiga) tipologi lingkungan permukiman di Bali, yaitu:

1. *Linear kontinyu*, adalah pola memanjang dimana pada bagian tengahnya merupakan area bersama yang berfungsi sebagai fasilitas sosial.
2. *Perempatan/grid* atau *Nyatur Desa/Catus Patha*, dimana pada areal di sekelilingnya merupakan area bersama yang berfungsi sebagai fasilitas sosial.
3. *Kombinasi* antara keduanya, yang melahirkan berbagai keragaman pola-pola lingkungan.

Konsepsi Tri Premana (desa, kala, patra) menjelaskan adanya fleksibilitas yang tetap terarah pada konteks dasar filosofinya. Dan hal ini ditunjukkan dalam keragaman pola-pola desa di Bali yang secara garis besar dibedakan atas 5 (lima) tipologi desa, yaitu: *Desa Bali Kuno*, *Desa Bali Pegunungan*, *Desa Bali Dataran*, *Desa Bali Pantai* dan *Desa Pusat Kerajaan*.

Ketiga jenis pola permukiman tradisional Bali di atas (linear kontinyu, catus patha dan kombinasi) tersebut memiliki latar belakang sebagai berikut:

- Pola permukiman linear kontinyu dijumpai di desa-desa nelayan atau desa-desa pertanian. Dikembangkan oleh petani pada umumnya berorientasi ke arah tengah dengan ruang-ruang terbuka (jalan utama, plaza) sebagai fasilitas sosial.
- Pola permukiman berbentuk grid/pempatan agung diperkirakan dikenal dan diterapkan pada jaman Majapahit (abad XIV), dimana pusat-pusat pemerintahan berpindah dari daerah pegunungan ke daerah dataran. Umumnya pola ini berkembang dan dipakai pada wilayah pusat-pusat pemerintahan 'Puri' pada saat itu, dengan areal yang luas dan relatif datar.
- Pola kombinasi terjadi dari adanya perkembangan atau pun pemekaran wilayah kota atau pun desa.

3.5.4 Pola Nyatur Desa

Menurut Gelebet dalam Arsitektur Tradisional Bali, yang dimaksud *Desa* dalam kontekstual Bali adalah suatu lingkungan permukiman yang memenuhi filosofi *Tri Hita Karana* dan *Tri Mandala*, dengan unsur-unsur *Kahyangan Tiga* sebagai perwujudan *utpati*, *sthiti* dan *pralina*; *palemahan desa* sebagai perwujudan *bhuana agung*/makro kosmos yang membentuk pola-pola ruang sesuai dengan landasan *Konsep Sanga Mandala*; serta *pawongan desa* atau *sima krama desa* sebagai perwujudan *Catur Purusa Artha* (empat tingkah laku yang baik terhadap sesama manusia) melalui *Panca Yadnya* (lima upacara suci umat Hindu), membentuk struktur masyarakat berdasarkan *Catur Asrama* (empat tingkatan kehidupan manusia) dan *Catur Warna* (empat penggolongan masyarakat berdasarkan profesi), sehingga

terbentuk organisasi kemasyarakatan sebagai pengelola kesatuan dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Disana dapat terlihat keterkaitan antara konsep ruang dengan tata kehidupan masyarakatnya.

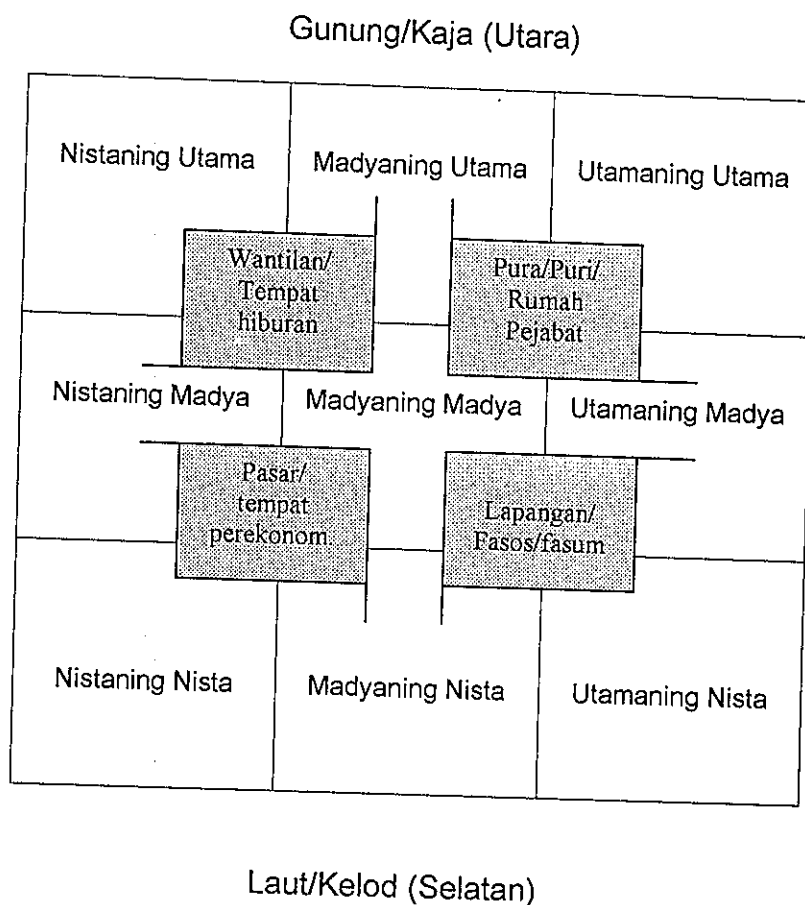
Titik pusat desa yaitu pada titik persilangan *pempatan agung*. Pada keempat arah di ujung-ujung jalan terbentuk sub-sub lingkungan unit *banjar* sebagai sistem pengaturannya. Dengan adanya empat sub lingkungan, disebut pula dengan *Pola Nyatur Desa* yang berarti empat unit lingkungan dengan pusat lingkungan pada unit kelima, yaitu pada bagian tengahnya.

Dari persilangan dua lintasan jalan terjadi empat zona dengan tingkatan nilainya masing-masing. Nilai *utama* pada zona *kaja kangin* (Timur Laut), nilai *madya* pada zona *kaja kauh* (Barat Laut) dan *kelod kangin* (Tenggara) dan nilai *nista* pada zona *kelod kauh* (Barat Daya) sebagai zona terendah.

Tata lingkungan tradisional menetapkan persil di sekitar *pempatan agung* tidak diperkenankan untuk perumahan, demikian pula persil yang berada di ujung-ujung jalan. Zona *utama kaja kangin* untuk lokasi *Pura Desa* dan *Pura Puseh* atau *Puri*, zona *madya kaja kauh* untuk *bale banjar*, zona *madya kelod kangin* untuk *lapangan* dan zona *nista kelod kauh* untuk *pasar*.

Perumahan dibangun di luar ke empat zona tersebut dengan suatu lorong pemisah antara pekarangan perumahan dengan zona di sudut perempatan. Antara tembok pekarangan dan jalan di sepanjang sisi-sisi jalan ada jalur *rooy* atau sempadan yang disebut *telajakan*, yang biasanya ditanami tanaman hias.

GAMBAR 3.7
POLA NYATUR DESA



Sumber: Gelehet, Arsitektur Tradisional Bali

3.6 Fasilitas Sosial (Fasos) Tradisional Bali

Kehidupan masyarakat di Bali diatur dalam ikatan-ikatan keluarga, ikatan banjar dan ikatan desa yang terbentuk dalam desa adat dan desa dinas (administratif). Masing-masing ikatan dalam menata kehidupannya bermusyawarah dalam suatu tempat sesuai dengan ruang-ruang yang diperlukannya.

Kelompok-kelompok profesional yang disebut *sekha* atau organisasi sekerja seperti *sekha manyi* (kelompok memanen padi), *sekha mekidung* (kelompok menyanyi), *sekha tabuh* (kelompok gamelan) dan lain-lain. Ada beberapa fasilitas sosial (fasos) tradisional Bali yang masih berfungsi hingga kini, antara lain: *wantilan*, *bale banjar* dan *bale kulkul*.

3.6.1 Wantilan

Bangunan wantilan merupakan perkembangan dari ruang-ruang yang bersifat sementara, seperti lapangan atau halaman yang diteduhi pohon atau atap yang bersifat sementara. Bangunan wantilan terdiri dari konstruksi utama 4 (empat) tiang utama, 12 (dua belas) tiang jajar sekeliling sisi atau lebih. Atap wantilan umumnya bertingkat (*metumpang*). Bangunan tidak berdinding atau terbuka di keempat sisinya. Lantainya datar atau berterap rendah di bagian tengahnya. Wantilan biasanya terdapat di halaman banjar atau halaman Pura dan terletak agak di tepi halaman. Luas wantilan tergantung dari lahan yang tersedia dan kegiatan yang ditampung. Biasanya memiliki luas sekitar 200 m².

Mengikuti perkembangan jaman yang menuntut berbagai kebutuhan, fungsi wantilan juga mengalami perkembangan. Tidak saja sebagai tempat musyawarah atau latihan para *sekha*, tetapi juga digunakan sebagai balai pertunjukan. Maka banyak wantilan yang kini dilengkapi dengan tempat duduk dan ruang pentas.

3.6.2 Bale Banjar

Kelompok organisasi Desa Adat yang juga dijadikan kelompok pengaturan administratif Desa Dinas disebut *Banjar*. Sebuah banjar terdiri dari anggota banjar dan bangunan *Bale Banjar*. Fungsi utama bale banjar adalah sebagai tempat rapat para anggota

banjar, yang biasanya dilakukan bertepatan pada hari raya yang telah mereka sepakati bersama. Di samping itu, bale banjar juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan kegiatan ritual berupa persembahyangan bersama. Bale banjar terdiri dari beberapa bangunan, termasuk di antaranya Pura dan wantilan.

Bale banjar juga mengalami perkembangan fungsi. Pada pagi hari, digunakan sebagai Taman Kanak-kanak (TK), siang hari sebagai tempat istirahat dan sore hari sebagai tempat olah raga atau latihan kesenian. Tetapi kegiatan yang ditampung masih dalam konteks bale banjar sebagai fasilitas sosial (fasos).

3.6.3 Bale Kulkul

Kulkul atau kentongan merupakan alat komunikasi yang disepakati setiap banjar. Dengan suara-suara tertentu sebagai isyarat, kulkul yang dipukul dapat memanggil anggota banjar untuk datang ke banjar atau melakukan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan. Isyarat suara kulkul juga dapat berarti peringatan suatu bencana, kematian atau acara perkawinan anggota banjar.

Agar suara kulkul dapat didengar anggota banjar sebagai sumber informasi, kulkul digantungkan pada bangunan tinggi semacam manara beratap, yang disebut Bale *Kulkul*. Setiap kegiatan banjar yang diinformasikan dengan memukul kulkul adalah merupakan peristiwa banjar. Untuk memukul kulkul juga harus dilakukan *sesajen*. Jadi kulkul tidak boleh dipukul sembarangan. Bale kulkul terletak di sudut depan pekarangan atau halaman banjar atau Pura.

TEORI RUANG KOTA

3.7 Pengertian Kota

Ada beberapa pengertian kota yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:

- Administratif, kota adalah:
suatu wilayah kewenangan yang dibatasi oleh suatu batas wilayah administrasi, yaitu suatu garis batas yang semu.
- Fungsional, kota adalah:
suatu pemusatan sebagai kegiatan fungsional, yang pada dasarnya ditekankan kepada fungsi jasa koleksi, distribusi dan produksi non pertanian.
- Sosial ekonomi, kota adalah:
konsentrasi penduduk yang kegiatan usahanya didominasi oleh sektor non pertanian.
- Sosial budaya, kota adalah:
pusat perubahan budaya yang dapat mempengaruhi pola nilai budaya yang ada.
- Fisik, kota adalah:
suatu lingkungan terbangun (*built up environment*) yang didominasi oleh struktur fisik binaan.
- Geografis, kota adalah:
suatu pemusatan penduduk dan kegiatan usaha yang secara geografis akan menempatkan dirinya pada suatu lokasi yang secara ekonomis, sosial maupun geografis mempunyai nilai strategis.
- Demografis, kota adalah:

suatu tempat dimana terdapat konsentrasi penduduk yang besarnya ditentukan berdasarkan suatu batasan statistik tertentu.

Beberapa pengertian kota yang lain adalah:

- Menurut R. Bintarto (1977), kota adalah:

Suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen dengan coraknya yang materialitis.

- Menurut Hofmeister (1969), seorang ahli geografi Jerman, kota adalah:

Suatu pemusatan spasial dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya di sektor ekonomi sekunder dan tersier, dengan pembagian kerja ke dalam dan arus lalu lintas yang beraneka, antara bagian-bagiannya dan pusatnya, yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasa bagi wilayah yang jauh letaknya.

3.8 Pusat Kota

3.8.1 Pengertian Pusat Kota

Ada beberapa pengertian dari pusat kota, yaitu:

- Bagian dari kota dimana pada daerah tersebut berakumulasi segala kegiatan pelayanan kota bagi masyarakatnya. (Mauro P. R. 1985: 3).
- Pusat kota didakan atas 3 macam, yaitu: *administrative centre*, *bussines centre*, and *entertainment and cultural centre* (F. Gilbert, Town Design, 1970: 67).

- Bagian dari kota yang dikarakteristikan dengan lokasi yang berada di pusat dengan bermacam-macam fungsi serta identitas penggunaan lahan yang maksimum dan batasnya sangat sulit didefinisikan (Cook, 1940: 5).
- Mempunyai fungsi pendorong dan penarik kekuatan sosial ekonomi yang dapat menciptakan perubahan pesat pada suatu kota. Lokasi pusat kota cenderung ditentukan oleh transportasi. Karakter lain juga terlihat dari adanya kecenderungan aktifitas sejenis komersial, administrasi, perdagangan, eceran, jasa, rekreasi dan aktifitas sosial budaya (Cook, 1940: 7).
- Merupakan pusat dari pertumbuhan dan perkembangan suatu kota (Gottman, 1980: 17).

3.8.2 Teori Pusat Kota

3.8.2.1 Teori Von Thunen

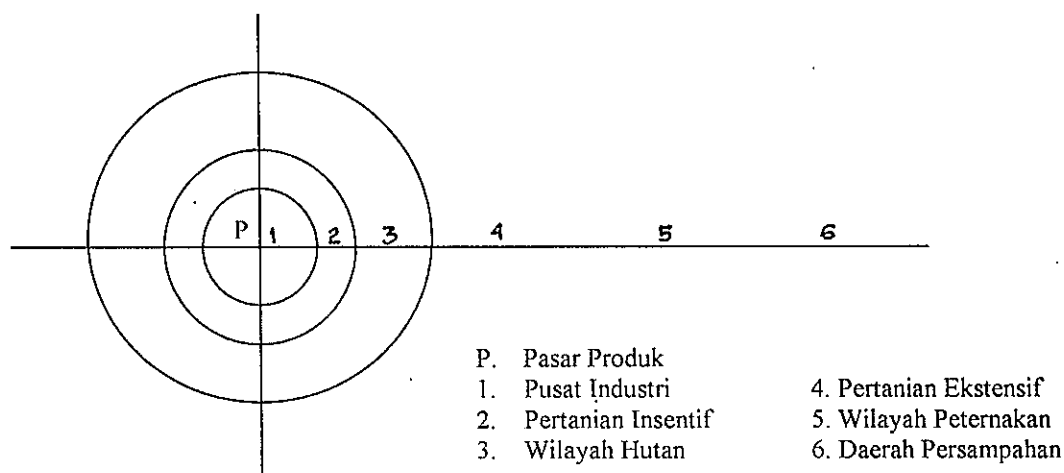
Teori Von Thunen lebih dikenal dengan nama *teori lokasi*. Von Thunen adalah warga Jerman yang hidup sekitar tahun 1826. Ia merupakan seorang ahli ekonomi yang memiliki tanah pertanian yang luas. Apa saja ditanam di tanah pertaniannya asalkan laku terjual. Tanah pertanian tersebut terletak di pusat kota yang diberi istilah "*O City*". Asumsi dari Teori Von Thunen adalah:

- Bebas dari pengaruh pasar kota-kota lain.
- Wilayah model membentuk tipe permukiman perkampungan, yang merupakan permukiman terpusat, bukan menyebar.
- Keadaan iklim, tanah dan topografi dianggap sama.
- Produktifitas lahan, yang menyangkut kesuburan tanah dianggap homogen.

- Fasilitas transportasi yang digunakan adalah transportasi tradisional dan dianggap relatif seragam.
- Faktor-faktor alamiah lain yang mempengaruhi *land use* dianggap *konstan*.

Maka didapat analisa bahwa: semakin dekat dengan pasar produk, harga sewa lahan akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya biaya transportasi. Dari analisa tersebut didapat hasil teori Von Thunen berupa Diagram Cincin-cincin Pola Penggunaan Tanah (*concentric zone hypothesis*) adalah sebagai berikut:

GAMBAR 3.8
POLA CINCIN VON THUNEN



Sumber: Central Place Theory

Kelemahan dari Teori Von Thunen ini adalah: lahan pertanian sebagai *input* tidak dihargai karena lahan pertanian tersebut adalah milik pribadi (milik Von Thunen).

3.8.2.2 Teori W. Christaller

Teori Christaller dikenal dengan nama *Teori Central Place*. Yang dimaksud dengan central place adalah: tempat melakukan kegiatan memiliki sentral atau kumpulan kegiatan.

Teori ini berkembang tahun 1933 pada negara-negara berkembang di Jerman Selatan. Horizontal.

Kelemahan dari Teori Christaller, adalah:

- Model tidak menunjukkan adanya spesialisasi atau pembagian kerja antara pusat-pusat.
- Wilayah perdagangan tidak seluruhnya dapat terlayani, karena terbatasnya fasilitas transportasi dan hambatan geografis.

Agar Teori Central Place dari Christaller dapat bersifat lebih dinamis, maka diperlukan teori tambahan, yaitu: Teori Growth Pole. Sedangkan keterbatasan Teori Central Place yang lain, adalah:

- Tidak mampu menjelaskan pertumbuhan kota secara lengkap.
- Lebih menekankan pada peran sektor perdagangan dan kegiatan jasa manufaktur.
- Pertumbuhan kota terus meningkat. Pada suatu tingkat tertentu diperlukan tambahan sumber daya dari luar wilayah hirarki/nodal.

Teori Central Place ini menghasilkan hirarki suatu kota. Maka teori tersebut dapat berguna karena:

- Relevan bagi perencanaan kota dan wilayah, karena sistem hirarki merupakan sarana yang efisien untuk perencanaan wilayah dan kota.
- Dimensi tata ruang dan pusat-pusat kota merupakan unsur penting dalam struktur wilayah nodal/hirarki.
- Mudah dimengerti dan mampu menjelaskan perubahan hirarki kota dan ketergantungan antar pusat kota dengan wilayah hinterlandnya.

Dalam mengembangkan sistem hirarki, ada 3 (tiga) prinsip yang dikemukakan oleh Christaller, yaitu:

- Prinsip pasar/market ($K=3$).
- Prinsip Transport, dimana muncul pusat di jalur transportasi ($K=4$).
- Prinsip Administratif, berlaku untuk pelayanan pemerintahan saja ($K=7$).

3.8.2.3 August Losch

August Losch mengemukakan model *regional spatial equilibrium*, yang merupakan perluasan dari teori Christaller pada tahun 1944. Dasar dari teori Losch adalah pasar persaingan monopolistik. Hasil analisis dari Teori Losch adalah: *Cerobong Harga*.

Keterbatasan dari Teori Losch adalah:

- Kesederhanaan asumsi dan tidak sesuai dengan kondisi empirik lapangan.
- Meremehkan penghematan-penghematan aglomerasi industri dan tidak menjelaskan secara komprehensif adanya titik-titik nodal dalam ekonomi tata ruang.
- Analisisnya kurang relevan untuk industri yang berorientasi pada bahan mentah yang terlokalisasi.

Keistimewaan dari Teori Losch, adalah:

1. Losch merupakan perintis analisis tata ruang.
2. Memberi kontribusi besar dalam konsep-konsep pengembangan wilayah:
 - Wilayah-wilayah yang membentuk sistem jaringan wilayah dasar dikonotasikan sebagai wilayah ekonomi.

- Pusat-pusat wilayah pasar yang mempunyai kedudukan sebagai unit produksi dikonotasikan sebagai pusat kota.
- Hubungan antar pusat-pusat wilayah pasar berkaitan dengan rumusan: hirarki kota dan hubungan fungsional antar pusat-pusat kota.

3.9 Elemen-elemen *Urban Design*

Elemen-elemen *urban design* atau perancangan kota adalah: (Shirvani, Hamid, 1985)

1. Penggunaan lahan (*land use*).

Tiap kawasan, guna lahannya berbeda-beda sesuai dengan: daya tampung, aksesibilitas, sistem penggerakkan dan penggunaan lahan individual. Penggunaan lahan mengacu kepada kebijaksanaan pemerintah dan menjadi pedoman dari pembangunan fungsi kawasan. Permasalahan selama ini: perencanaan guna lahan kurang optimal dari memanfaatkan ruang yang ada serta kurang memperhatikan faktor lingkungan dan fisik alam.

2. Bentuk dan Massa Bangunan (*Building Form dan Massing*).

Bentuk dan massa bangunan dapat menjadi ciri kawasan. Memperhatikan kesesuaian dengan lingkungan sekitar. Berorientasi pada pembentukan citra kawasan, manusiawi dan sesuai dengan fungsi/aktifitasnya.

3. Sirkulasi dan Parkir (*Circulation and Parking*).

Membuat arah pengembangan serta mengendalikan pola aktivitas kota melalui sistem jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan transit/perhentian.

4. Jalur Pejalan Kaki (*Pedestrian Ways*).

Mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan di pusat kota. Lingkungan menjadi lebih nyaman dan manusiawi. Menciptakan kegiatan pendukung: PKL dan perdagangan eceran (*window shopping*).

5. Penunjang Kegiatan (*Activity Support*).

Meliputi semua kegiatan yang membantu memperkuat penggunaan ruang publik, seperti: PKL, bazaar serta festival. Berfungsi untuk menghidupkan kawasan setiap waktu dan menunjang terciptanya interaksi para pelaku.

6. Penandaan (*Sinages*).

Sebagai penunjuk arah/fungsi bangunan (termasuk *billboard/baliho*). Penandaan dapat pula melalui pembedaan bentuk atau ciri visual lain, seperti melalui warna, tekstur dan lain-lain.

7. Pelestarian (*Preservation*).

Meliputi upaya pelestarian lingkungan yang telah ada dan ruang-ruang kawasan yang sudah terbentuk, khususnya yang memiliki *nilai historis*. Preservasi juga dilakukan terhadap aktivitas yang sudah berlangsung dengan memperhatikan aspek sejarah kawasan serta relevansinya dengan tuntutan modernitas.

3.10 Teori Konservasi

3.10.1 Pengertian Konservasi

Konservasi merupakan usaha untuk melindungi benda bersejarah. Perlindungan benda bersejarah tidak lagi merupakan unsur pelengkap dalam perencanaan perkotaan, tetapi

telah berubah sebagai bidang substansif dari teori dan praktek. Konservasi merupakan komponen utama dalam perencanaan kota (Attoe dalam Catanese, 1992).

Dalam Piagam Burra, hasil dari konferensi Burra 1981, disepakati berbagai pengertian tentang pelestarian. Konservasi berarti segenap pengelolaan suatu tempat, agar makna kultural yang dikandung terpelihara dengan baik. Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Kegiatan konservasi dapat berupa konservasi suatu kawasan atau bangunan. Konservasi kawasan adalah suatu kegiatan konservasi yang menangani kawasan, seperti kawasan permukiman kumuh, perdagangan atau lainnya. Hal-hal yang dilakukan dalam konservasi kawasan atau yang dikenal dengan nama peremajaan kawasan adalah *urban renewal* (yang mengkonservasi kawasan secara fisik dan sosial) dan *urban development* (yang mengkonservasi kawasan secara fisik saja). Contohnya: pembangunan rumah susun, KIP atau konsolidasi lahan. Sedangkan konservasi bangunan adalah upaya pelestarian yang dilakukan terhadap bangunan-bangunan, yang biasanya meliputi bangunan kuno dan memiliki nilai sejarah. Dan kegiatan konservasi bangunan biasanya diikuti dengan konservasi lingkungannya.

Adapun pengertian dari kegiatan-kegiatan konservasi adalah (Pontoh dalam Kautsari, 1996):

1. *Preservasi*: adalah pemeliharaan suatu bangunan/tempat sesuai dengan aslinya serta mencegah proses kerusakan (Piagam Burra, artikel 1.6).
2. *Restorasi*: merupakan upaya mengembalikan kondisi bangunan seperti sediakala dengan menghilangkan elemen tambahan serta memasang kembali elemen orisinil yang telah hilang tanpa penggunaan bahan baru.

3. Rehabilitasi: yaitu mengembalikan kondisi bangunan rusak atau menurun sehingga berfungsi lagi seperti sedia kala. Dalam hal ini kelangsungan sejarah dan kesan khas harus tetap terjaga. Rehabilitasi lebih bersifat pada kondisi fisik.
4. Renovasi: yaitu upaya merubah sebagian atau seluruh interior bangunan, sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan tersebut terhadap fungsi baru.
5. Rekonstruksi: yaitu upaya mengembalikan atau membangun kembali penampilan orisinal suatu bangunan sesuai dengan informasi kesejarahan yang diketahui. Bangunan ini dapat menggunakan bahan baru atau lama.
6. Adaptasi: yaitu segala upaya dalam mengubah suatu tempat agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang lebih sesuai (Piagam Burra, artikel 1.9).
7. Revitalisasi: adalah upaya mengembalikan kondisi bangunan yang rusak atau menurun. Fungsi bangunan bisa tetap, tapi dapat pula berbeda dari fungsi semula. Biasanya dalam revitalisasi 80% fungsi lama masih digunakan. Bersifat fisik dan non fisik.
8. Demolisi: upaya konservasi dengan menghancurkan atau menghilangkan bangunan yang lama dan membangun dengan bangunan yang baru.

3.10.2 Prinsip-prinsip Konservasi

Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam konservasi adalah:

1. Konservasi dilandasi atas penghargaan terhadap keadaan semula suatu tempat dan sedikit mungkin melakukan intervensi fisik bangunan, agar tidak mengubah bukti-bukti sejarah.

2. Maksud dari konservasi adalah untuk menangkap kembali makna kultural dari suatu tempat, harus bisa menjamin keamanan dan pemeliharannya di masa mendatang.
3. Konservasi pada suatu tempat harus mempertimbangkan segenap aspek yang berkaitan dengan makna kulturalnya, tanpa menekankan pada salah satu aspek saja dan mengorbankan aspek lain.
4. Suatu bangunan hasil karya harus tetap berada pada lokasi historisnya. Pemindahan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan atau hasil karya tidak diperkenankan, kecuali bila hal tersebut merupakan satu-satunya cara guna menjamin kelestariannya.
5. Untuk konservasi yang mensyaratkan terpeliharanya latar visual yang cocok seperti bentuk, skala, warna, tekstur dan bahan bangunan maka perubahan perubahan baru akan berakibat negatif terhadap latar visual harus dicegah.
6. Kebijakan konservasi yang sesuai untuk suatu tempat didasarkan atas pemahaman terhadap makna kultural dan kondisi fisik bangunannya.

3.10.3 Tolok Ukur Konservasi

Dalam *Snyder dan Catanese* (1992) diberikan enam tolok ukur dalam mengkaji kelayakan suatu bangunan atau lingkungan bersejarah dikonservasi. Tolok ukur itu meliputi:

1. Estetika.

Bangunan-bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili prestasi khusus dalam suatu gaya sejarah tertentu. Bisa juga karena memiliki keindahan bentuk, struktur dan ornamen yang berbeda.

2. Kejamakan.

Merupakan karya yang tipikal, mewakili suatu jenis atau ragam tertentu.

3. Kelangkaan.

Merupakan karya yang sangat langka, hanya ada satu dari jenisnya, tidak dimiliki daerah lain atau merupakan contoh terakhir yang masih ada.

4. Kesejarahan.

Merupakan lokasi bagi peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting untuk dilestarikan sebagai kaitan simbolis antara peristiwa dahulu dan sekarang.

5. Kualitas Pengaruh.

Keberadaannya akan meningkatkan citra lingkungan sekitar dan juga investasi yang ditanamkan didalamnya akan mempengaruhi kawasan-kawasan di sekitarnya.

6. Superlativitas.

Bangunan-bangunan atau lingkungan kota yang dilindungi karena memiliki keistimewaan, misalnya: tertua, tertinggi atau terpanjang.

Sedangkan menurut *Budihardjo* (1997), tolok ukur yang dapat digunakan dalam penggalan, pelestarian dan pengembangan identitas kota dilihat dari kacamata perencanaan kota, adalah:

1. Nilai kesejarahan, baik dalam arti sejarah perjuangan nasional maupun sejarah perkembangan kota. Seperti: Gedung Proklamasi, Tugu Pahlawan, Pura Besakih dan lain-lain.
2. Nilai arsitektur lokal/tradisional, seperti keraton, puri, kanjengan dan lain-lain.
3. Nilai arkeologis, seperti candi-candi, gua atau benteng.

4. Nilai religiositas, berupa tempat-tempat peribadatan.
5. Nilai kekhasan dan keunikan setempat, baik dalam kegiatan sosial ekonomi maupun sosial budaya. Seperti: acara dug-deran, sekaten, mepeed, ukiran Bali dan lain-lain.
6. Nilai keselarasan antara lingkungan buatan dengan potensi alam yang dimilikinya. Seperti: Condet dengan kebun buahnya.

Dalam Budihardjo (1997) dijelaskan bahwa rasa memiliki masyarakat merupakan salah satu tolok ukur tambahan yang tak kalah penting.

3.10.4 Masalah Konservasi

Kegiatan konservasi untuk menjaga suatu karya seni dan kesaksian sejarah adalah suatu kegiatan yang sudah seharusnya dilakukan. Akibatnya kegiatan konservasi menjadi permasalahan yang kompleks.

Kritik yang paling sering dilontarkan adalah karena konservasi sering dianggap sangat menghambat perubahan dan kemajuan, baik dari segi material maupun imajinasi. Para developer dan ahli ekonomi memandang konservasi sebagai suatu yang menghambat pertumbuhan alam dan perubahan dari suatu daerah kehidupan modern. Argumentasi ini terutama ditujukan pada kawasan perdagangan, yaitu pada lokasi-lokasi pusat kota yang bertepatan dengan daerah inti sejarah (*historic core*).

3.11 Warisan Budaya

Warisan budaya adalah benda atau kegiatan yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)

tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. (*Sumber UU No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya*).

Semakin berkembangnya jaman dan era globalisasi dewasa ini, menyebabkan terjadinya orientasi yang condong pada pembangunan yang serba baru, modern dan canggih. Segala sesuatu yang berkesan kuno dianggap menghambat dan dirasa perlu untuk dihancurkan. Padahal jika kita perhatikan lebih jauh, dari warisan-warisan budaya yang ada tidak saja hanya meninggalkan bentuk berupa bangunan tetapi banyak hal yang dapat kita pelajari terutama yang menyangkut tentang konsep dan filosofis dasar perencanaan warisan budaya tersebut. (*Budihardjo, 1997*).

Jadi warisan budaya disini merupakan peninggalan dari nenek moyang atau leluhur kita yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi yang harus kita hargai dan kita lestarikan. Seperti misalnya: Candi Borobudur, Candi Prambanan dan lain-lain.

RANGKUMAN TEORI

Dari teori-teori yang telah diuraikan, baik mengenai teori tradisional Bali maupun teori ruang kota, akan dirangkum menjadi rangkuman teori yang nantinya akan digunakan dalam melakukan analisis pada bab selanjutnya. Berdasarkan rangkuman teori ini, dapat disusun pertanyaan-pertanyaan berupa kuisener yang kemudian disebar kepada responden. Rangkuman teori yang didapat adalah sebagai berikut:

Kota-kota di Bali terbentuk dari kota-kota pusat kerajaan dengan pola *consentric*. Titik pusat kotanya berupa titik perempatan agung, yang menggunakan *pola catus patha*.

Konsepsi tradisional umumnya merupakan pengendapan filosofi ke dalam suatu kenyataan, demikian pula dalam arsitektur tradisional. Konsepsi tradisional dalam arsitektur tradisional Bali, dari pola-pola lingkungan, bentuk-bentuk arsitektur dan elemen ruangnya. Filosofi konsepsi tradisional merupakan dasar untuk perancangan, perencanaan dan detail arsitektur tradisional. Konsep dasar filosofi antara lain:

- *Rwa Bhineda* atau *semara ratih*
- *Tri Hita*
- *Tri Angga*
- *Tri Mandala*
- *Nyatur Muka* atau *Nyatur Desa*
- *Tri Loka*
- *Panca Maha Buta*
- *Asta Dala, Nawa Sanga* dan *Sanga Mandala*

Sedangkan untuk permukiman tradisional Bali, dalam penataannya menggunakan Konsep Sanga Mandala, Konsep Asta Bumi dan Pola Nyatur Desa.

Norma-norma dan prinsip *Asta Bumi* yang terkandung dalam tata cara mengatur pekarangan dan tata letak bangunan dalam suatu ruang atau areal permukiman dilatar belakangi oleh filosofis *Tri Hita Karana*.

Tata lingkungan tradisional menetapkan persil di sekitar pempatan agung tidak diperkenankan untuk perumahan, demikian pula persil yang berada di ujung-ujung jalan. Zona utama kaja kangin untuk lokasi *Pura Desa* dan *Pura Puseh* atau *Puri*, zona madya kaja kauh untuk *bale banjar*, zona madya kelod kangin untuk lapangan dan zona nista kelod kauh untuk pasar.

BAB IV

KRITERIA-KRITERIA PEMANFAATAN RUANG BERLANDASKAN TATA NILAI TRADISIONAL BALI DI KAWASAN WARISAN BUDAYA DI PUSAT KOTA DENPASAR

4.1 Kawasan Warisan Budaya di Pusat Kota Denpasar

4.1.1 Kawasan Warisan Budaya

Di pusat Kota Denpasar, yang dikatakan sebagai kawasan warisan budaya adalah suatu kawasan yang terjadi akibat dari kegiatan konservasi yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat tanpa adanya Perda (Peraturan Daerah) tentang konservasi yang mengatur (*self conservation*). Hal ini dapat terjadi karena kentalnya adat dan budaya yang dianut oleh masyarakat.

Kawasan warisan budaya terdiri dari: *Pura* (tempat persembahyangan), *Puri* (tempat kediaman kaum bangsawan) dan *rumah tua* (yang merupakan rumah yang masih menggunakan pola tradisional Bali). Dilihat dari data RTRW Kota Denpasar, maka dapat diasumsikan luasan kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar mencakup kurang lebih 40% dari luas pusat kota.

Hal ini tentu saja dapat menjadi potensi bagi pusat Kota Denpasar sendiri, karena tanpa adanya Perda tentang konservasi, masyarakat sudah melakukan pelestarian warisan budaya dengan sendirinya. Akan tetapi keadaan ini juga menjadi permasalahan, karena dengan tetap bertahannya kawasan warisan budaya yang ada maka perkembangan pusat Kota Denpasar akan terhambat. Terlebih lagi diperkuat dengan Perda tentang pembatasan maksimum ketinggian bangunan setinggi 15 meter. Sedangkan seiring dengan perkembangan

jaman, kebutuhan juga semakin bertambah. Hal ini menyebabkan semakin banyak pula berkembangnya fungsi-fungsi modern di pusat Kota Denpasar. Perkembangan antara kepentingan modern dan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional inilah yang menimbulkan konflik dalam penataan ruang kota selanjutnya. Maka karena semakin sesaknya pusat kota dan terbentur oleh nilai-nilai tradisional dan budaya menyebabkan perkembangan pusat Kota Denpasar berkembang ke arah horisontal dan ke daerah pinggiran.

4.1.2 Indikasi Warisan Budaya

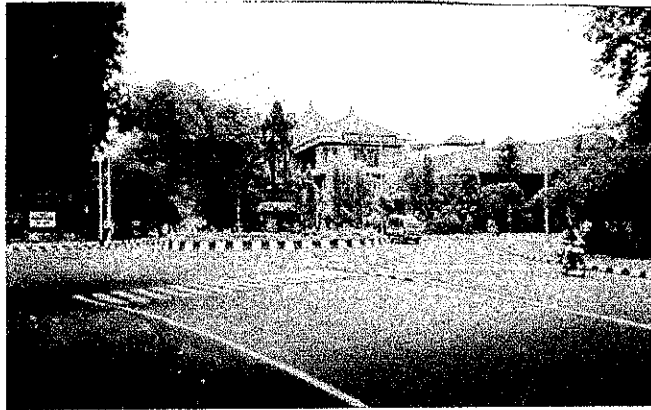
Di pusat Kota Denpasar, masih banyak terdapat warisan budaya yang mengandung nilai historis dan filosofis keagamaan. Penetapan suatu bangunan atau kawasan sebagai warisan budaya belum tertuang secara resmi di dalam suatu Surat Keputusan di Pemkot Denpasar. Tetapi dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar didapatkan bangunan atau kawasan yang dapat diindikasikan sebagai warisan budaya di pusat Kota Denpasar, yaitu:

TABEL IV.1
INDIKASI WARISAN BUDAYA DI PUSAT KOTA DENPASAR

NO.	INDIKASI WARISAN BUDAYA
	KAWASAN PEMPATAN AGUNG
1	Alun-alun Puputan Badung
2	Rumah Dinas Gubernur (Jaya Sabha)
3	Kantor Walikota
4	Bank Dagang Bali
5	Patung Catur Muka
6	Patung Puputan Badung
	WARISAN BUDAYA
1	Pura Jagatnatha
2	Pura Mahospahit
3	Pura Pengerebongan and Wantilan
4	Puri Satria
5	Puri Pemecutan
6	Jero Kuta
7	Museum Bali
8	Taman Budaya

9	Bali Hotel
10	Pasar Burung
11	Pasar Kereneng
12	Kawasan Permukiman Tradisional

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar



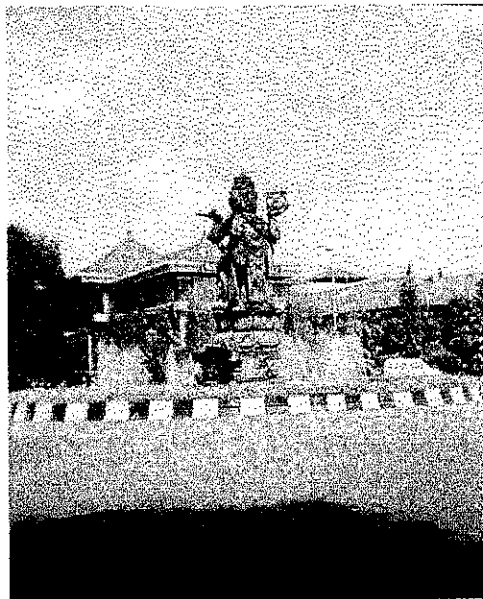
KAWASAN PEMPATAN AGUNG
CATUR MUKA

Alun-alun Puputan Badung:

- Alun-alun Puputan Badung atau yang dikenal dengan alun-alun terletak di jantung Kota Denpasar. Pada jaman dahulu alun-alun ini merupakan bagian dari pola perempatan tradisional Bali (*Catus Patha*), yang letaknya bersebelahan dengan Puri dan pasar.
- Di alun-alun yang merupakan lapangan terbuka tersebut, digunakan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat dan tempat bermain bagi anak-anak, terutama pada hari libur. Alun-alun tersebut juga digunakan sebagai tempat upacara adat pada saat sehari sebelum Hari Raya Nyepi, yaitu *tawur agung kesanga* dan pusat pawai *ogoh-ogoh*. Dan juga digunakan untuk upacara persembahyangan umat Islam, yaitu pada hari raya *Idul Adha* dan *sholat Ied* pada hari Lebaran.

Patung Catur Muka:

- Patung Catur Muka terletak tepat di jantung Kota Denpasar, yang merupakan titik pusat kota. Patung Catur Muka merupakan simbol dari manifestasi *Dewa Brahma*, dewa pencipta alam semesta. Patung ini memiliki 4 (empat) muka, yang juga lambang dari 4 (empat) arah mata angin. Terbuat dari batu padat dengan tinggi 5 (lima) meter dan dikelilingi air mancur di sekitarnya. Patung Catur Muka juga merupakan *landmark* dari Kota Denpasar.



PATUNG CATUR MUKA
MERUPAKAN TITIK PUSAT KOTA
DAN LANDMARK KOTA DENPASAR

Patung Puputan Badung:

- Patung Puputan Badung terletak di sebelah Utara dari alun-alun. Patung ini melambangkan perjuangan rakyat Bali melawan penjajah Belanda pada perang Puputan Badung tanggal 20 September 1906. Hari tersebut selalu diperingati sebagai Hari Puputan Badung setiap tahunnya.



PATUNG PUPUTAN BADUNG

Pura Jagatnatha:

- Pura Jagatnatha terletak di jantung Kota Denpasar. Berfungsi sebagai tempat peribadatan bagi umat Hindu, terutama pada hari-hari raya, seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, Purnama atau Tilem. Bangunan ini sangat berarsitektur tradisional Bali, dengan ukiran di berbagai tempat. Hal yang paling menonjol adalah bangunan *Padmasananya*, yang merupakan padmasana terbesar dan tertinggi di Bali.
- Sebagai salah satu bangunan kuno, keasrian Pura dan lingkungannya sangat dipelihara. Walau pun terletak di pusat kota yang sarat dengan kebisingan dan suasana globalisasi, namun sampai kini eksistensinya masih bertahan.



PURA JAGATNATHA

Pura Mahospahit:

- Pura Mahospahit juga termasuk salah satu tempat peribadatan. Terletak di Jalan Dr. Sutomo. Pura ini juga menggunakan arsitektur tradisional Bali dan termasuk salah satu pura tertua di Bali. Di pura tersebut juga terdapat peninggalan arkeologi, berupa patung terakota yang mengingatkan kita pada peninggalan purbakala, yaitu pada jaman Kerajaan Majapahit di Jawa Timur.

Pura Pengerebongan dan Wantilan:

- Pura Pengerebongan terkenal karena adanya atraksi adat *ngerebong*, yaitu tarian sakral berupa penusukan diri dengan keris yang dipadu dengan *tarian barong* dan *rangda*. Atraksi sakral tersebutlah yang menjadi daya tarik Pura Pengerebongan. Bentuk Pura yang masih kental menggunakan arsitektur tradisional Bali juga merupakan penambah daya tarik tersendiri.

Puri Satria:

- Puri ini juga tempat kediaman anggota kerajaan di Kota Denpasar. Terletak di Jalan Veteran. Puri ini masih menggunakan perpaduan antara arsitektur tradisional Bali dan arsitektur kolonial Belanda. Hal ini dapat dilihat pada kori agung (pintu masuk utama) puri yang masih menggunakan *style* Belanda. Begitu juga bangunan *hall* berupa *pendopo* yang sering digunakan untuk rapat.

Puri Pemecutan:

- Puri pemecutan merupakan tempat kediaman keturunan Raja Pemecutan. Bentuk Puri kental dengan arsitektur tradisional Bali yang telah berdiri sejak abad ke 16. Saat ini fungsi puri telah berkembang atau bertambah menjadi hotel. Salah satu daya tariknya adalah dalam melakukan atraksi kesenian tradisional di puri, ditambah dengan makan siang atau makan malam bersama keturunan raja.

Jero Kuta:

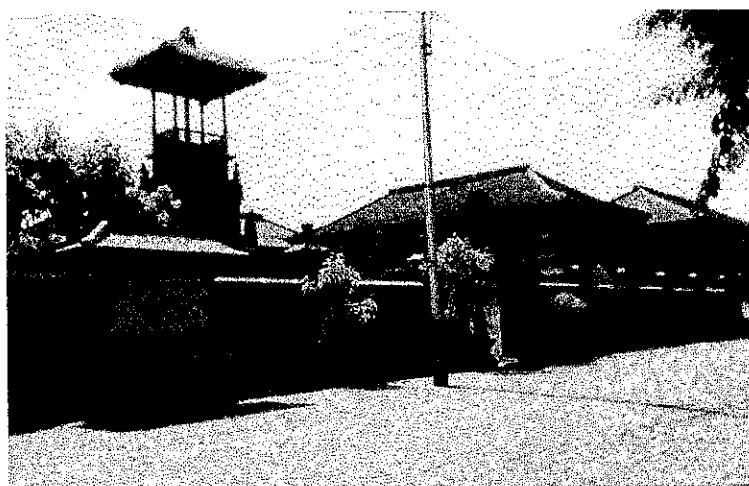
- Jero Kuta juga merupakan tempat kediaman anggota kerajaan di Kota Denpasar. Terletak di Jalan Kumbakarna. Jero Kuta merupakan salah satu puri yang memiliki fasilitas bangunan penunjang tradisional Bali yang lengkap, seperti: Ancaksaji, Semanggan, Ranggi, Pewaregan, Saren Raja, Saren Kangin, Pesaban, Pemerajan Agung dan Pekandelan. Jero Kuta menggunakan arsitektur tradisional Bali yang kental.

Museum Bali:

- Museum Bali juga terletak di jantung Kota Denpasar, yaitu bersebelahan dengan lokasi Pura Jagatnatha. Mulai berdiri pada tanggal 8 Desember 1932. Terdiri dari

4 (empat) buah bangunan besar, yaitu: Gedung Timur, Gedung Buleleng, Gedung Karangasem dan Gedung Tabanan. Gedung Timur memamerkan benda-benda jaman pra sejarah dan sejarah yang ada di Bali. Gedung Buleleng memamerkan industri kerajinan yang ada di Bali dan pakaian adat daerah di Bali. Gedung Karangasem memamerkan rangkaian upacara adat Bali, yaitu upacara Panca Yadnya. Dan Gedung Tabanan memamerkan peralatan-peralatan kesenian tradisional Bali.

- Bangunan museum ini juga sangat bercirikan khas tradisional Bali. Lingkungannya juga ditata dengan asri. Wisatawan dapat berkunjung kesana setiap hari, kecuali hari libur.



MUSEUM BALI

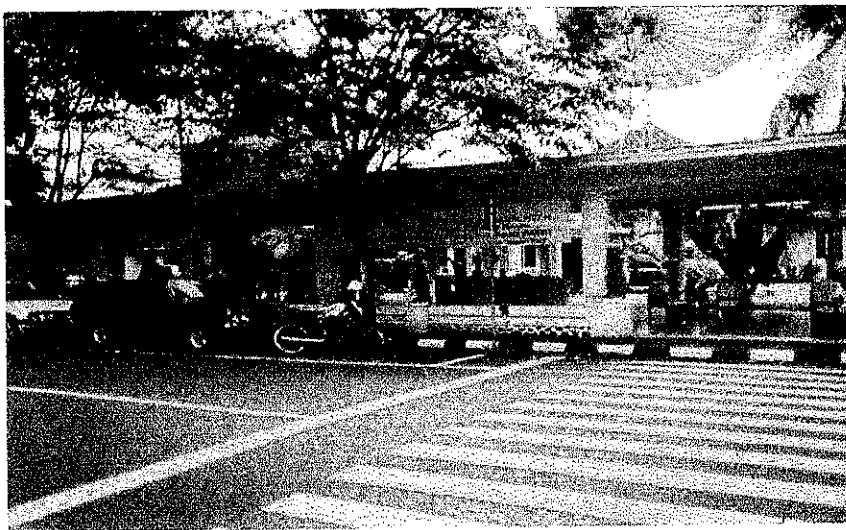
Taman Budaya:

- Taman Budaya atau yang lebih dikenal dengan nama *Art Centre*, terletak di Jalan Nusa Indah. Taman budaya ini terdiri dari gedung-gedung dengan ciri tradisional Bali yang kental. Terletak di area seluas 5 (lima) hektar. Berdiri pada tanggal 14

Februari 1973 sebagai proyek Dirjen Kebudayaan yang ketika itu dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, mantan Rektor Unud dan Gubernur Bali (1978-1988). Kompleks Taman Budaya ini terdiri dari: panggung terbuka (Ardha Chandra), panggung tertutup (Ksirarnawa) dan beberapa panggung kecil-kecil yang terbuka dan berupa wantilan. Taman budaya juga terbuka setiap hari bagi wisatawan, tapi yang menjadi puncak keramaiannya adalah pada saat diselenggarakannya Pesta Kesenian Bali setiap setahun sekali.

Bali Hotel:

- Bali Hotel, yang merupakan salah satu group Bali Natour Hotel, merupakan hotel tertua di Bali, yang didirikan pada tahun 1925. Terletak di Jalan Veteran. Bali Hotel menggunakan gaya arsitektur kolonial Belanda yang menyebabkan masih terkesan kuno. Hal ini dapat terlihat pada *lobby* di pinggir jalan dengan hiasan menggunakan *pilar* dan *level* ciri khas kolonial.



**MERUPAKAN HOTEL PERTAMA DI BALI
MASIH MENGGUNAKAN ARSITEKTUR BELANDA**

Pasar Burung:

- Pasar burung dengan nama Pasar Burung Satria ini terletak di Jalan Veteran yang bersebelahan dengan Puri Satria. Pada jaman dahulu, areal pasar burung ini adalah merupakan bagian dari areal puri, dimana letak puri selalu berdekatan dengan pasar.
- Di pasar burung ini dijual beraneka jenis binatang, mulai dari burung, ikan hias, ayam, anjing, kelinci dan lain-lain. Di belakang areal pasar burung juga terdapat pura, dimana pada saat hari raya di pura tersebut dilakukan upacara sabung ayam (*tabuh rah*). Pasar burung ini juga menggunakan arsitektur tradisional Bali.

Pasar Kereneng:

- Pasar Kereneng juga merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Denpasar. Terletak di Jalan Kamboja. Disini dijual segala kebutuhan sehari-hari. Pasar Kereneng hanya buka sampai siang hari, karena pada waktu sore hingga malam harinya, Pasar Kereneng berubah menjadi pasar malam, yang menjual aneka makanan dan pakaian dengan harga relatif murah. Pasar Kereneng juga menggunakan arsitektur tradisional Bali.

Permukiman tradisional:

- Walaupun merupakan pusat kota yang sudah tergolong maju, tetapi pusat Kota Denpasar masih memiliki permukiman tradisional yang luasnya hampir mencapai 40% dari luas pusat Kota Denpasar.
- Permukiman tradisional memang sepantasnya dikonservasi. Tetapi di pusat Kota Denpasar, walaupun Pemkot Denpasar belum memiliki Perda tentang konservasi,

keberadaan permukiman tradisional tersebut hingga kini masih bertahan (terjadi *self conservation*). Hal ini dapat terjadi karena keluarga penghuni rumah di permukiman tradisional tersebut mempunyai tanggung jawab moral mempertahankan warisan berupa rumah tua tersebut karena di dalamnya terdapat tempat suci keluarga, yang keberadaannya tidak boleh diganggu gugat.

- Permukiman tradisional meliputi: rumah-rumah yang masih menggunakan pola tradisional Bali, Jero mau pun Puri.

4.1.3 Lokasi Warisan Budaya di Pusat Kota Denpasar

Untuk mengetahui lokasi atau letak warisan budaya tersebut di dalam pusat Kota Denpasar, dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

Keterangan gambar:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Patung Catur Muka | 10. Puri Satria |
| 2. Alun-alun Puputan Badung | 11. Puri Pemecutan |
| 3. Rumah Dinas Gubernur | 12. Jero Kuta |
| 4. Kantor Walikota | 13. Museum Bali |
| 5. Bank Dagang Bali | 14. Taman Budaya |
| 6. Patung Puputan Badung | 15. Bali Hotel |
| 7. Pura Jagatnatha | 16. Pasar Burung |
| 8. Pura Mahospahit | 17. Pasar Kereneng |
| 9. Pura Pengerebongan | 18. Permukiman Tradisional |

4.2 Kehidupan Berbudaya Masyarakat Pusat Kota Denpasar

Walaupun terletak di pusat kota dan Kota Denpasar sudah merupakan kota yang bersifat internasional, akan tetapi kehidupan berbudaya masyarakat pusat Kota Denpasar masih terasa kuat dan kental. Ini dapat dilihat dari keseharian yang terjadi, dimana setiap hari mereka tetap tekun menjalankan persembahyangan baik di rumah maupun di Pura. Begitu pula dapat dilihat dari banyaknya rumah atau permukiman tradisional yang terdapat di pusat Kota Denpasar, yang sampai kini masih bertahan walaupun harga tanah di pusat kota sudah semakin tinggi dan kebutuhan semakin meningkat pula.

Hal ini dapat terjadi karena ketaatan mereka dalam meneruskan warisan leluhur berupa tempat suci (*pemerajan*) yang terdapat di rumah tua mereka. Karena jika rumah tua itu mereka jual, mereka harus kehilangan tempat suci keluarga tersebut.

Kehidupan berbudaya (*living culture*) yang kuat di kalangan masyarakat pusat Kota Denpasar ini dapat terjadi karena masyarakat memahami konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan salah satu landasan dalam agama Hindu, yaitu menjaga keseimbangan antara: manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan sesamanya.

4.3 Fungsi-fungsi Modern di Pusat Kota Denpasar

Fungsi-fungsi modern berkembang di kawasan pusat Kota Denpasar seiring dengan semakin berkembangnya jaman dan kebutuhan. Keberadaan fungsi-fungsi modern ini memasuki kawasan fungsi-fungsi tradisional yang berada di pusat Kota Denpasar. Di satu sisi, keberadaan fungsi modern memang dibutuhkan tetapi keberadaan fungsi-fungsi tradisional juga harus tetap dipertahankan.

Fungsi-fungsi modern yang berkembang di pusat Kota Denpasar adalah:

1. Fungsi perdagangan dan jasa.

Fungsi perdagangan dan jasa yang paling berkembang adalah menjamurnya *mall-mall* dan ruko di setiap sudut kota. *Mall* atau *super market* merupakan salah satu tempat pilihan masyarakat untuk berbelanja. Hal ini menjadi pesaing bagi keberadaan pasar-pasar tradisional. Sedangkan ruko-ruko yang sedang *booming* di pusat kota sudah menggantikan fungsi bangunan sebelumnya, yang banyak merupakan peninggalan Belanda, seperti asrama militer dan penjara. Hal ini menjadi sorotan masyarakat terhadap aparat terkait dalam hal pemberian ijin operasi dan ijin membangun. Di sektor jasa, banyak bermunculan jasa yang bergerak di bidang kepariwisataan, seperti *travel*, *money changer*, *restaurant* serta hotel dan penginapan.

2. Fungsi perkantoran.

Pusat Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan Pemkot Denpasar. Kantor Walikota dan instansi Pemkot yang lain juga terletak disana. Begitu pula dengan pusat pemerintahan tingkat Propinsi. Selain fungsi perkantoran pemerintah juga terdapat fungsi perkantoran militer (Kantor Kodam) dan kantor-kantor swasta lainnya.

3. Fungsi permukiman.

Di pusat Kota Denpasar sudah dipenuhi dengan fungsi-fungsi permukiman yang berasal dari pendatang. Hal ini ditandai dengan banyak kawasan perumahan yang tumbuh, yang merupakan permukiman modern.

4. Fungsi rekreasi atau wisata..

Pusat Kota Denpasar tergolong tidak banyak memiliki fungsi rekreasi atau wisata modern. Fungsi rekreasi atau wisata modern yang ada, meliputi: bioskop, mall dan museum Bali. Obyek wisata lainnya adalah merupakan peninggalan-peninggalan sejarah, yang baik diarahkan ke *heritage tourism*.

5. Fungsi pendidikan.

Aktifitas pendidikan juga terdapat di pusat Kota Denpasar. Mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, yang merupakan fungsi modern di bidang pendidikan.

6. Fungsi kesehatan.

Keberadaan rumah sakit, baik rumah sakit umum pusat, rumah sakit swasta, rumah sakit khusus, merupakan fungsi-fungsi modern di bidang kesehatan yang berkembang di pusat Kota Denpasar.

4.4 Kriteria-kriteria Pemanfaatan Ruang Kota Berlandaskan Tata Nilai Tradisional Bali di Kawasan Warisan Budaya di Pusat Kota Denpasar

Dasar-dasar yang digunakan untuk memanfaatkan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar, adalah berupa kriteria-kriteria yang didapat dari hasil kuisener dengan menggunakan Metode Delphi.

Ada 10 (sepuluh) orang pakar yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini. Para pakar tersebut adalah:

TABEL IV.2
NAMA RESPONDEN

NO.	NAMA	KODE	PROFESI
1	Ir. I Putu Rumawan Salain, Msi	R-1	Dosen, Pengamat budaya
2	Ir. I.B. Wira Wibawa Mantra, MT	R-2	Dosen, Pengamat budaya
3	Ir. I Ketut Ali, MT	R-3	Dosen
4	Ir. Tjok Sayang Putera	R-4	Dosen
5	I Wayan Kastawan, SI. MA	R-5	Dosen, Pengamat budaya
6	Ni Made Yudiantini, ST. MSc	R-6	Dosen
7	Ir. I Gde Adi Suarsajaya	R-7	Kasubdin. Cipta Karya
8	Ir. A.A. Bgs. Budi Utama	R-8	Kasubdin Survey dan Pemetaan
9	Ir. Catrini Pratihari, M. Arch	R-9	LSM Bali Kuna
10	Ir. Komang Tri Bayu	R-10	LSM Bali Kuna

Sumber: Hasil Analisis, 2002

Di dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuisener sebanyak 4 babak untuk mendapatkan hasil yang benar-benar diharapkan. Dalam penyebaran kuisener babak I, diberikan sebanyak 7 (tujuh) buah kriteria kepada responden.

Responden lalu dimintai pendapat mengenai kriteria tersebut, boleh setuju, tidak setuju, menambah, mengurangi atau memberikan kriteria baru. Kriteria-kriteria tersebutlah yang berfungsi sebagai variabel dalam penelitian ini.

Kriteria-kriteria awal yang diberikan kepada responden adalah:

TABEL IV.3
KRITERIA-KRITERIA AWAL

KRITERIA	PENJELASAN
1. Zona <i>utama</i> difungsikan sebagai kawasan sakral.	Pada zona ini hanya diperuntukan bagi bangunan tempat suci (Pura).
2. Zona <i>madya</i> difungsikan sebagai kawasan pengembangan.	Pada zona ini diperuntukan bagi kawasan perumahan, perkantoran, pertokoan, sekolah dan kawasan sebagai aktifitas pengembangan
3. Zona <i>nista</i> difungsikan sebagai kawasan service.	Pada zona ini diperuntukan bagi kawasan yang bersifat service, seperti kuburan dan TPA.
4. Kawasan Pempatan Agung di daerah Patung Catur Muka harus dipertahankan.	Karena masih menggunakan pola catus patha maka kawasan pempatan agung harus dipertahankan.
5. Permukiman tradisional Bali yang masih banyak terdapat di pusat Kota Denpasar harus dipertahankan.	Keberadaan permukiman tradisional harus dipertahankan karena di dalamnya terdapat tempat suci keluarga dan merupakan warisan leluhur.
6. Warisan budaya di pusat Kota Denpasar harus tetap dipertahankan.	Keberadaan warisan budaya harus dipertahankan karena mengandung nilai filosofis agama dan historis tinggi.
7. Fungsi-fungsi tradisional yang terdapat di pusat Kota Denpasar harus dipertahankan.	Fungsi-fungsi modern yang berkembang di pusat Kota Denpasar tidak boleh mendesak keberadaan fungsi-fungsi tradisional.

Sumber: Hasil Analisis, 002

Dari hasil kuisener babak I dan II didapatkan 9 (sembilan) kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan ruang kota berlandaskan tata nilai tradisional Bali di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar. (Kuisener babak I dan II dapat dilihat pada lampiran). Kriteria-kriteria tersebut adalah:

TABEL IV.4
KRITERIA-KRITERIA HASIL BABAK I DAN II

KRITERIA	PENJELASAN
1. Pembangunan zona <i>utama, madya, nista</i> untuk pengembangan fungsi kawasan secara makro di pusat kota dimulai dari titik di pusat kota.	Kawasan titik pusat kota sebagai zona <i>utama</i> , radius luarnya sebagai zona <i>madya</i> dan dilanjutkan dengan zona <i>nista</i> pada radius berikutnya.
2. Untuk pembagian zona <i>utama, madya, nista</i> secara mikro, ditetapkan berdasarkan jumlah desa adat yang ada di pusat kota.	Dari desa adat yang ada dibagi menjadi zona <i>utama, madya, nista</i> berdasarkan <i>pola nyatur desa</i> yang berlaku.
3. Pembagian zona <i>utama, madya, nista</i> bersifat fleksibel dan tidak terlalu kaku.	Sifat fleksibel tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan <i>desa</i> (tempat), <i>kala</i> (waktu), <i>patra</i> (keadaan) yang berlaku di tiap-tiap desa adat tersebut.
4. Disediakan <i>ruang peralihan</i> untuk menampung fungsi-fungsi campuran atau perbatasan antara zona yang satu dengan yang lain.	Ruang peralihan tersebut merupakan ruang antara yang bukan merupakan suatu zona tersendiri.
5. Perlakuan konservasi tidak hanya berlaku bagi kawasan dan bangunan warisan budaya yang ada.	Perlakuan konservasi juga dilakukan pada kegiatan ritual yang terjadi, karena hal tersebut berkaitan penataan sirkulasi ruang kota.
6. Permukiman tradisional yang ada di pusat kota perlu dipertahankan keberadaannya.	Karena bertambahnya berbagai kebutuhan, permukiman tradisional boleh berkembang asalkan masih tetap mempertahankan pola serta bangunan tradisional yang terdapat di dalamnya.
7. Pemanfaatan ruang kota, dapat memasukkan fungsi-fungsi modern di dalamnya, tetapi harus tetap mempertahankan identitas kota, dalam hal ini Kota Denpasar sebagai kota budaya.	Jika fungsi-fungsi modern tersebut berkembang, harus tetap mempertahankan <i>pola catus patha</i> (jika berada pada perempatan), menggunakan <i>telajakan</i> , <i>penyenger</i> (pagar halaman) dan <i>kori</i> atau <i>candi bentar</i> sebagai pintu masuk.
8. Fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya tidak saja harus berdasarkan pembagian tata nilai tradisional (<i>utama, madya</i> dan <i>nista</i> saja).	Walaupun syarat utama adalah tata nilai tradisional, tetapi harus memperhatikan peningkatan SDM (masyarakat) dalam hal ini pendidikannya, kesadaran masyarakat, sosialisasi masyarakat serta kebijakan dari aparat terkait.
9. <i>Pempatan Agung</i> yang sekarang harus dipertahankan, karena selain merupakan titik pusat kota juga merupakan salah satu implementasi dari <i>pola catus patha</i> .	Harus diperhatikan elemen-elemen yang terdapat di dalamnya serta syarat-syarat dari <i>pempatan agung</i> itu sendiri.

Sumber: Hasil Kuisener Babak I dan II, 2002

Dari 9 kriteria yang telah didapat tersebut, dilempar kembali dalam bentuk kuisener babak III kepada responden untuk menentukan prioritasnya. Dengan menggunakan perhitungan statistik Delphi, didapatkan hasil untuk mendapatkan prioritas kriteria dalam babak III sebagai berikut:

1. Kriteria 1: pembangunan zona *utama, madya, nista* untuk pengembangan fungsi kawasan secara makro di pusat kota dimulai dari titik pusat kota.

Dari 10 orang responden: sebanyak 10 orang (100%) memilih kriteria 1 sebagai prioritas 1.

2. Kriteria 2: untuk pembangunan zona *utama, madya, nista* secara mikro ditetapkan berdasarkan jumlah desa adat yang ada di pusat kota.

Dari 10 orang responden sebanyak 10 orang (100%) memilih kriteria 2 sebagai prioritas 2.

3. Kriteria 3: pembagian zona *utama, madya, nista* bersifat fleksibel dan tidak terlalu kaku.

Dari 10 orang responden:

- 2 orang memilih kriteria 3 sebagai prioritas 3.
- 3 orang memilih kriteria 3 sebagai prioritas 5.
- 2 orang memilih kriteria 3 sebagai prioritas 6.
- 1 orang memilih kriteria 3 sebagai prioritas 7.
- 1 orang memilih kriteria 3 sebagai prioritas 8.
- 1 orang memilih kriteria 3 sebagai prioritas 9.

4. Kriteria 4: disediakan *ruang peralihan* untuk menampung fungsi-fungsi campuran atau perbatasan antara zona yang satu dengan yang lain.

Dari 10 orang responden:

- 1 orang memilih kriteria 4 sebagai prioritas 5.
- 9 orang memilih kriteria 4 sebagai prioritas 9.

5. Kriteria 5: perlakuan konservasi tidak hanya berlaku bagi kawasan dan bangunan warisan budaya yang ada.

Dari 10 orang responden:

- 3 orang memilih kriteria 5 sebagai prioritas 4.
- 2 orang memilih kriteria 5 sebagai prioritas 6.
- 3 orang memilih kriteria 5 sebagai prioritas 7.
- 2 orang memilih kriteria 5 sebagai prioritas 8.

6. Kriteria 6: permukiman tradisional yang ada di pusat kota perlu dipertahankan keberadaannya.

Dari 10 orang responden:

- 1 orang memilih kriteria 6 sebagai prioritas 5.
- 6 orang memilih kriteria 6 sebagai prioritas 6.
- 3 orang memilih kriteria 6 sebagai prioritas 7.

7. Kriteria 7: pemanfaatan ruang kota dapat memasukkan fungsi-fungsi modern di dalamnya tetapi harus tetap mempertahankan identitas kota, dalam hal ini Kota Denpasar sebagai kota budaya.

- 5 orang memilih kriteria 7 sebagai prioritas 4.
- 5 orang memilih kriteria 7 sebagai prioritas 5.

8. Kriteria 8: fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya tidak saja harus berdasarkan pembagian tata nilai tradisional (*utama, madya dan nista* saja).

Dari 10 orang responden:

- 3 orang memilih kriteria 8 sebagai prioritas 7.
- 7 orang memilih kriteria 8 sebagai prioritas 8.

9. Kriteria 9: *pempatan agung* yang sekarang harus dipertahankan, karena selain merupakan titik pusat kota juga merupakan salah satu implementasi dari pola *catus patha*.

Dari 10 orang responden:

- 8 orang memilih kriteria 9 sebagai prioritas 3.
- 2 orang memilih kriteria 9 sebagai prioritas 4.

Dan berdasarkan perhitungan hasil Mean (X), Median (Md), Inter Quartile Range (IQR), Range (R) dan Standar Deviasi (S) dari masing-masing kriteria sebagai berikut:

TABEL IV.5
PERHITUNGAN STATISTIK BABAK III

Kriteria	Mean (X)	Median (Md)	IQR	Range (R)	Standar Deviasi (S)
1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	4,30	4,50	2,00	6,00	1,95
4	1,40	1,00	0,00	4,00	1,26
5	3,90	3,50	3,00	4,00	1,60
6	3,80	4,00	1,00	2,00	0,63
7	5,50	5,50	1,00	1,00	0,53
8	2,30	2,00	1,00	1,00	0,48
9	6,80	7,00	0,00	1,00	0,42

Sumber: Hasil Analisis, 2002

Dari standar deviasi dapat kita lihat bahwa pada kriteria 3, 4 dan 5 merupakan angka terbesar. Hal ini berarti untuk kriteria 3, 4, dan 5 tersebut terdapat keragaman pendapat responden mengenai prioritas dari kriteria. Hal inilah yang akan diuji kembali pada babak IV sehingga akan didapatkan hasil yang lebih akurat.

Dan dari perhitungan nilai Mean (\bar{X}) akan diperoleh urutan prioritas dari masing-masing kriteria. Prioritas kriteria-kriteria dari hasil kuisener babak III, yaitu sebagai berikut:

TABEL IV.6
PRIORITAS KRITERIA BABAK III

KRITERIA	PRIORITAS
1. Pembangunan zona <i>utama, madya, nista</i> untuk pengembangan fungsi kawasan secara makro di pusat kota dimulai dari titik di pusat kota.	1
2. Untuk pembagian zona <i>utama, madya, nista</i> secara mikro, ditetapkan berdasarkan jumlah desa adat yang ada di pusat kota.	2
3. Pembagian zona <i>utama, madya, nista</i> bersifat fleksibel dan tidak terlalu kaku.	5
4. Disediakan <i>ruang peralihan</i> untuk menampung fungsi-fungsi campuran atau perbatasan antara zona yang satu dengan yang lain.	9
5. Perlakuan konservasi tidak hanya berlaku bagi kawasan dan bangunan warisan budaya yang ada.	6
6. Permukiman tradisional yang ada di pusat kota perlu dipertahankan keberadaannya.	7
7. Pemanfaatan ruang kota, dapat memasukkan fungsi-fungsi modern di dalamnya, tetapi harus tetap mempertahankan identitas kota, dalam hal ini Kota Denpasar sebagai kota budaya.	4
8. Fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya tidak saja harus berdasarkan pembagian tata nilai tradisional (<i>utama, madya dan nista</i> saja).	8
9. <i>Pempatan Agung</i> yang sekarang harus dipertahankan, karena selain merupakan titik pusat kota juga merupakan salah satu implementasi dari <i>pola catus patha</i> .	3

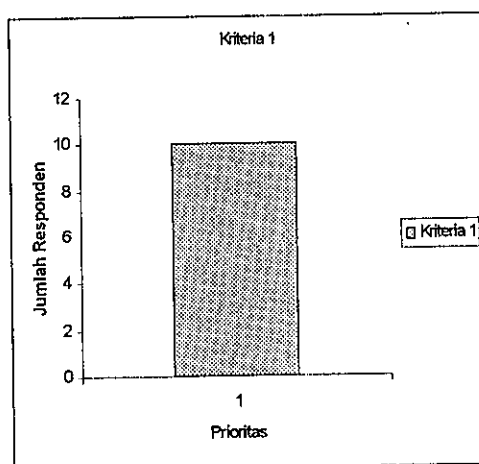
Sumber: Hasil Kuisener Babak III, 2002

Dari prioritas kriteria yang telah didapat dalam hasil kuisener babak III, hasil tersebut dilempar kembali kepada responden untuk memberi kesempatan terakhir di dalam menentukan prioritas dari kriteria-kriteria tersebut, sehingga hasil akhir berupa prioritas dari masing-masing kriteria dalam babak IV inilah yang akan digunakan sebagai dasar kriteria akhir dalam memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar. Hasil kuisener babak IV adalah sebagai berikut:

1. Kriteria 1: pembangunan zona *utama, madya, nista* untuk pengembangan fungsi kawasan secara makro di pusat kota dimulai dari titik pusat kota.

Kriteria 1.

URUTAN PRIORITAS	JUMLAH RESPONDEN	PROSENTASE
1	10	100
TOTAL	10	100



Dari 10 orang responden: 10 orang memilih kriteria 1 sebagai prioritas 1.

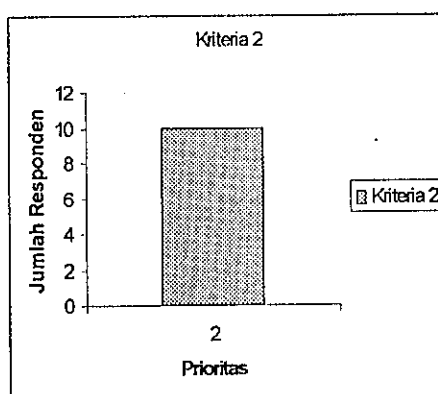
Pembagian pusat Kota Denpasar secara makro berdasarkan tata nilai tradisional Bali berawal dari titik pusat kota. Titik pusat Kota Denpasar adalah *Patung Catur Muka* dan kawasan di sekitar titik pusat kota tersebut merupakan kawasan

pempatan agung yang menggunakan *pola catus patha*. Radius di kawasan pempatan agung yang merupakan *core area* tersebutlah yang berfungsi sebagai zona *utama*, yang diperuntukan sebagai Pura, Puri, rumah pejabat dan kawasan perkantoran. Radius berikutnya berfungsi sebagai zona *madya*, yang diperuntukan sebagai wantilan, balai pertemuan dan tempat hiburan. Sedangkan radius terluar merupakan zona *nista*, yang diperuntukan sebagai pasar dan kawasan perdagangan.

2. Kriteria 2: untuk pembangunan zona *utama*, *madya*, *nista* secara mikro ditetapkan berdasarkan jumlah desa adat yang ada di pusat kota.

Kriteria 2.

URUTAN PRIORITAS	JUMLAH RESPONDEN	PROSENTASE
2	10	100
TOTAL	10	100



Dari 10 orang responden: 10 orang memilih kriteria 2 sebagai prioritas 2.

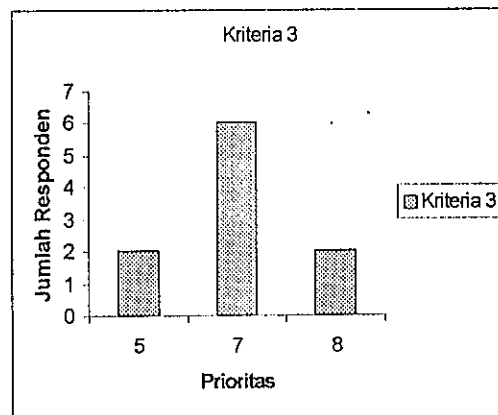
Pembagian tata ruang tradisional Bali secara mikro dibagi pada tiap-tiap desa adat dengan menggunakan *pola nyatur desa*. Dari 27 (dua puluh tujuh) desa adat

yang ada di pusat Kota Denpasar akan memiliki peruntukan Pura, permukiman, pasar, fasilitas sosial dan lain-lain.

3. Kriteria 3: pembagian zona *utama*, *madya*, *nista* bersifat fleksibel dan tidak terlalu kaku.

Kriteria 3.

URUTAN PRIORITAS	JUMLAH RESPONDEN	PROSENTASE
5	2	20
7	6	60
8	2	20
TOTAL	10	100



Dari 10 orang responden:

- 2 orang memilih kriteria 3 sebagai prioritas 5.
- 6 orang memilih kriteria 3 sebagai prioritas 7.
- 2 orang memilih kriteria 3 sebagai prioritas 8.

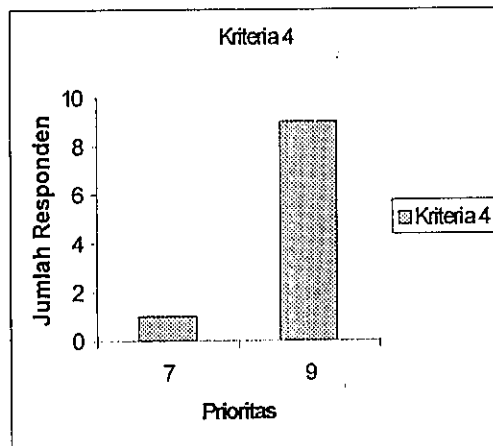
Pembagian zona-zona *utama*, *madya*, *nista* bersifat fleksibel. Hal ini sesuai dengan konsep *Tri Premana*, yaitu *desa*, *kala*, *patra* (situasi, kondisi dan toleransi), mengingat keadaan suatu daerah tidak sama dengan daerah yang lain.

Maka pembagian zona tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis serta adat istiadat suatu daerah.

4. Kriteria 4: disediakan *ruang peralihan* untuk menampung fungsi-fungsi campuran atau perbatasan antara zona yang satu dengan yang lain.

Kriteria 4.

URUTAN PRIORITAS	JUMLAH RESPONDEN	PROSENTASE
7	1	10
9	9	90
TOTAL	10	100



Dari 10 orang responden:

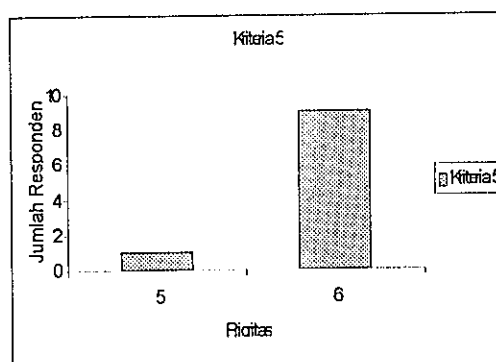
- 1 orang memilih kriteria 4 sebagai prioritas 7.
- 9 orang memilih kriteria 4 sebagai prioritas 9.

Dalam penerapan zona utama, madya dan nista ada suatu zona yang berada pada zona yang lain. Maka untuk mengatasinya dibuat suatu ruang peralihan atau ruang antara yang membatasinya. Ruang tersebut pada umumnya adalah berupa ruang kosong.

5. Kriteria 5: perlakuan konservasi tidak hanya berlaku bagi kawasan dan bangunan warisan budaya yang ada.

Kriteria 5.

URUTAN PRIORITAS	JUMLAH RESPONDEN	PROSENTASE
5	1	10
6	9	90
TOTAL	10	100



Dari 10 orang responden:

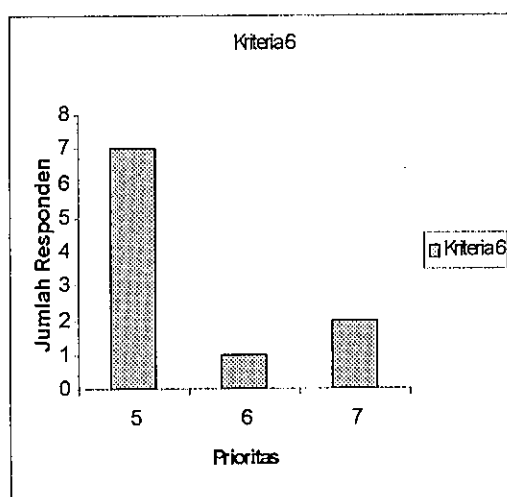
- 1 orang memilih kriteria 5 sebagai prioritas 5.
- 9 orang memilih kriteria 5 sebagai prioritas 6.

Kegiatan konservasi tidak saja hanya berlaku untuk warisan serta kawasan warisan budaya, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan ritual yang banyak terdapat di pusat kota. Selain memiliki nilai filosofis keagamaan, kegiatan tersebut harus dikonservasi karena berkaitan dengan penataan ruang kota, dalam hal ini adalah pada sirkulasi atau jalur lalu lintas kota, karena kegiatan ritual tersebut memiliki jalur-jalur prosesi khusus.

6. Kriteria 6: permukiman tradisional yang ada di pusat kota perlu dipertahankan keberadaannya.

Kriteria 6.

URUTAN PRIORITAS	JUMLAH RESPONDEN	PROSENTASE
5	7	70
6	1	10
7	2	30
TOTAL	10	100



Dari 10 orang responden:

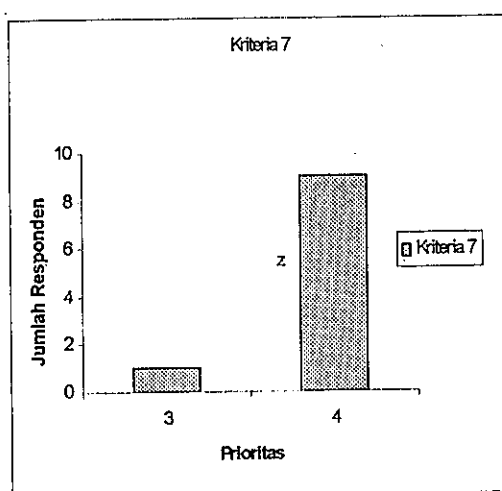
- 7 orang memilih kriteria 6 sebagai prioritas 5.
- 1 orang memilih kriteria 6 sebagai prioritas 6.
- 2 orang memilih kriteria 6 sebagai prioritas 7.

Permukiman tradisional yang ada di pusat kota harus tetap dipertahankan. Walaupun di dalamnya sudah dimasukkan fungsi-fungsi modern seperti toko atau kantor, tetapi tetap menggunakan pola permukiman tradisional.

7. Kriteria 7: pemanfaatan ruang kota dapat memasukkan fungsi-fungsi modern di dalamnya tetapi harus tetap mempertahankan identitas kota, dalam hal ini Kota Denpasar sebagai kota budaya.

Kriteria 7.

URUTAN PRIORITAS	JUMLAH RESPONDEN	PROSENTASE
3	1	10
4	9	90
TOTAL	10	100



Dari 10 orang responden:

- 1 orang memilih kriteria 7 sebagai prioritas 3.
- 9 orang memilih kriteria 7 sebagai prioritas 4.

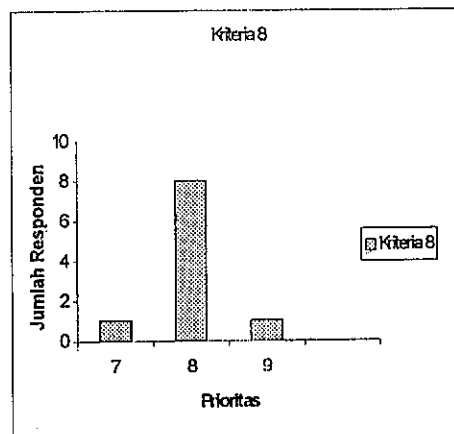
Fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar, di samping memenuhi kriteria tata nilai tradisional Bali tersebut juga harus memiliki ciri-ciri atau elemen yang merupakan *identitas kota*, khususnya Kota Denpasar sebagai kota budaya. Identitas tersebut adalah: menggunakan *pola catus patha* jika terletak pada perempatan jalan, menggunakan

telajakan pada bagian depan bangunan, menggunakan pagar pembatas dengan style Bali (*tembok penyengker*) serta menggunakan *candi bentar* atau *kori* sebagai pintu masuk.

8. Kriteria 8: fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya tidak saja harus berdasarkan pembagian tata nilai tradisional (*utama, madya dan nista* saja).

Kriteria 8.

URUTAN PRIORITAS	JUMLAH RESPONDEN	PROSENTASE
7	1	10
8	8	80
9	1	10
TOTAL	10	100



Dari 10 orang responden:

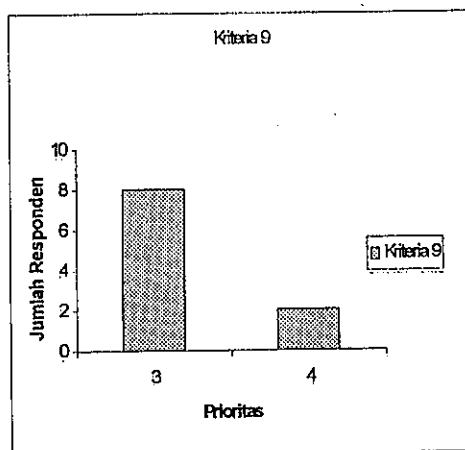
- 1 orang memilih kriteria 8 sebagai prioritas 7.
- 8 orang memilih kriteria 8 sebagai prioritas 8.
- 1 orang memilih kriteria 8 sebagai prioritas 9.

Fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya tidak saja berdasarkan kriteria tata nilai tradisional Bali tersebut. Tetapi juga harus disertai dengan keterlibatan atau peran serta masyarakat serta sosialisasinya dan peran dari aparat pemerintah terkait.

9. Kriteria 9: *pempatan agung* yang sekarang harus dipertahankan, karena selain merupakan titik pusat kota juga merupakan salah satu implementasi dari pola *catus patha*.

Kriteria 9.

URUTAN PRIORITAS	JUMLAH RESPONDEN	PROSENTASE
3	9	90
4	1	10
TOTAL	10	100



Dari 10 orang responden:

- 9 orang memilih kriteria 9 sebagai prioritas 3.
- 1 orang memilih kriteria 9 sebagai prioritas 4.

Keberadaan *pempatan agung* yang merupakan implementasi dari *pola catus patha* harus tetap dipertahankan, karena memiliki nilai *filosofis* agama dan sejarah

yang tinggi. Di samping itu, pempatan agung juga merupakan *down town* pusat kota. Elemen-elemen di sekitar pempatan agung juga harus dipertahankan.

Dan berdasarkan perhitungan hasil Mean (X), Median (Md), Inter Quartile Range (IQR), Range (R) dan Standar Deviasi (S) dari masing-masing kriteria dalam babak IV adalah sebagai berikut:

TABEL IV.7
PERHITUNGAN STATISTIK BABAK IV

Kriteria	Mean (X)	Median (Md)	IQR	Range (R)	Standar Deviasi (S)
1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	3,20	3,00	0,00	6,00	1,03
4	1,20	1,00	0,00	4,00	0,63
5	4,10	4,00	0,00	4,00	0,32
6	4,50	5,00	1,00	2,00	0,85
7	6,10	6,00	0,00	1,00	0,32
8	2,00	2,00	0,00	1,00	0,47
9	6,90	7,00	0,00	1,00	0,32

Sumber: Hasil Analisis, 2002

Sehingga dari perhitungan di atas, didapat prioritas kriteria-kriteria dari hasil kuisener babak IV, yaitu sebagai berikut:

TABEL IV.8
PRIORITAS KRITERIA BABAK IV

KRITERIA	PRIORITAS
1. Pembangunan zona <i>utama, madya, nista</i> untuk pengembangan fungsi kawasan secara makro di pusat kota dimulai dari titik di pusat kota.	1
2. Untuk pembagian zona <i>utama, madya, nista</i> secara mikro, ditetapkan berdasarkan jumlah desa adat yang ada di pusat kota.	2
3. Pembagian zona <i>utama, madya, nista</i> bersifat fleksibel dan tidak terlalu kaku.	7
4. Disediakan <i>ruang peralihan</i> untuk menampung fungsi-fungsi campuran atau perbatasan antara zona yang satu dengan yang lain.	9
5. Perlakuan konservasi tidak hanya berlaku bagi kawasan dan bangunan warisan budaya yang ada.	6
6. Permukiman tradisional yang ada di pusat kota perlu dipertahankan keberadaannya.	5
7. Pemanfaatan ruang kota, dapat memasukkan fungsi-fungsi modern di dalamnya, tetapi harus tetap mempertahankan identitas kota, dalam hal ini Kota Denpasar sebagai kota budaya.	4
8. Fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya tidak saja harus berdasarkan pembagian tata nilai tradisional (<i>utama, madya dan nista</i> saja).	8
9. <i>Pempatan Agung</i> yang sekarang harus dipertahankan, karena selain merupakan titik pusat kota juga merupakan salah satu implementasi dari <i>pola catus patha</i> .	3

Sumber: Hasil Kuisener Babak I, 2002

Maka dari hasil kuisener babak IV, yang merupakan babak terakhir dalam Metode Delphi dalam penelitian ini, didapat hasil akhir berupa urutan prioritas dari masing-masing kriteria yang dapat dijadikan dasar dalam memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Sehingga dari perhitungan di atas, didapat prioritas kriteria-kriteria dari hasil kuisener babak IV, yaitu sebagai berikut:

TABEL IV.8
PRIORITAS KRITERIA BABAK IV

KRITERIA	PRIORITAS
1. Pembangunan zona <i>utama, madya, nista</i> untuk pengembangan fungsi kawasan secara makro di pusat kota dimulai dari titik di pusat kota.	1
2. Untuk pembagian zona <i>utama, madya, nista</i> secara mikro, ditetapkan berdasarkan jumlah desa adat yang ada di pusat kota.	2
3. Pembagian zona <i>utama, madya, nista</i> bersifat fleksibel dan tidak terlalu kaku.	7
4. Disediakan <i>ruang peralihan</i> untuk menampung fungsi-fungsi campuran atau perbatasan antara zona yang satu dengan yang lain.	9
5. Perlakuan konservasi tidak hanya berlaku bagi kawasan dan bangunan warisan budaya yang ada.	6
6. Permukiman tradisional yang ada di pusat kota perlu dipertahankan keberadaannya.	5
7. Pemanfaatan ruang kota, dapat memasukkan fungsi-fungsi modern di dalamnya, tetapi harus tetap mempertahankan identitas kota, dalam hal ini Kota Denpasar sebagai kota budaya.	4
8. Fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya tidak saja harus berdasarkan pembagian tata nilai tradisional (<i>utama, madya dan nista</i> saja).	8
9. <i>Pempatan Agung</i> yang sekarang harus dipertahankan, karena selain merupakan titik pusat kota juga merupakan salah satu implementasi dari <i>pola catus patha</i> .	3

Sumber: Hasil Kuisener Babak IV

Maka dari hasil kuisener babak IV, yang merupakan babak terakhir dalam Metode Delphi dalam penelitian ini, didapat hasil akhir berupa urutan prioritas dari masing-masing kriteria yang dapat dijadikan dasar dalam memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat kota Denpasar adalah sebagai berikut:

TABEL IV.9
KRITERIA AKHIR PENELITIAN

KRITERIA
1. Pembangunan zona <i>utama</i> , <i>madya</i> , <i>nista</i> untuk pengembangan fungsi kawasan secara makro di pusat kota dimulai dari titik di pusat kota.
2. Untuk pembagian zona <i>utama</i> , <i>madya</i> , <i>nista</i> secara mikro, ditetapkan dalam desa adat yang ada di pusat kota.
3. <i>Pempatan Agung</i> yang sekarang harus dipertahankan, karena selain merupakan titik pusat kota juga merupakan salah satu implementasi dari <i>pola catus patha</i> .
4. Pemanfaatan ruang kota, dapat memasukkan fungsi-fungsi modern di dalamnya, tetapi harus tetap mempertahankan identitas kota, dalam hal ini Kota Denpasar sebagai kota budaya.
5. Permukiman tradisional yang ada di pusat kota perlu dipertahankan keberadaannya.
6. Perlakuan konservasi tidak hanya berlaku bagi kawasan dan bangunan warisan budaya yang ada.
7. Pembagian zona <i>utama</i> , <i>madya</i> , <i>nista</i> bersifat fleksibel dan tidak terlalu kaku.
8. Fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya tidak saja harus berdasarkan pembagian tata nilai tradisional (<i>utama</i> , <i>madya</i> dan <i>nista</i> saja).
9. Disediakan <i>ruang peralihan</i> untuk menampung fungsi-fungsi campuran atau perbatasan antara zona yang satu dengan yang lain.

Sumber: Hasil Kuisener Babak IV, 2002

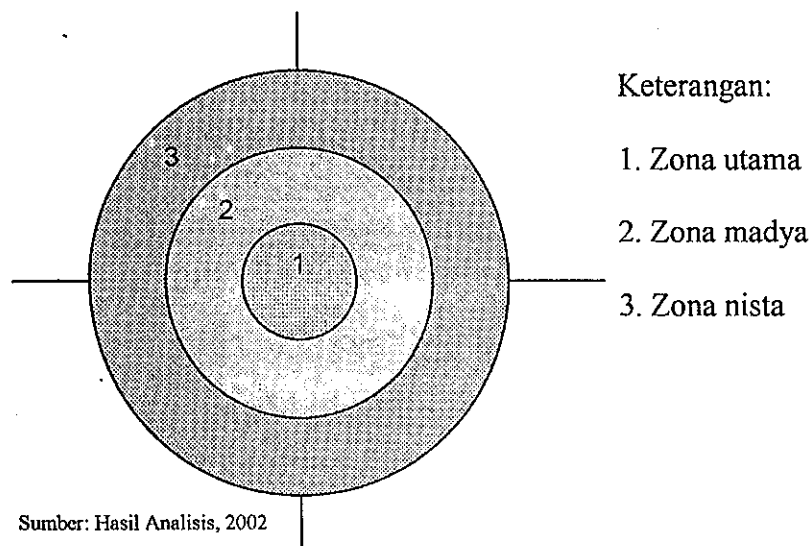
Sedangkan penjelasan untuk masing-masing kriteria tersebut adalah:

1. Pembagian secara makro.

Pembagian pusat Kota Denpasar secara makro berdasarkan tata nilai tradisional Bali berawal dari titik pusat kota. Titik pusat Kota Denpasar adalah *Patung Catur Muka* dan kawasan di sekitar titik pusat kota tersebut merupakan kawasan *pempatan agung* yang menggunakan *pola catus patha*. Radius di kawasan *pempatan agung* yang merupakan *core area* tersebutlah yang berfungsi sebagai

zona *utama*, yang diperuntukan sebagai Pura, Puri, rumah pejabat dan kawasan perkantoran. Radius berikutnya berfungsi sebagai zona *madya*, yang diperuntukan sebagai wantilan, balai pertemuan dan tempat hiburan. Sedangkan radius terluar merupakan zona *nista*, yang diperuntukan sebagai pasar dan kawasan perdagangan.

GAMBAR 4.2
PEMBAGIAN PUSAT KOTA SECARA MAKRO



Pembagian pusat kota secara makro, dibagi berdasarkan dari norma-norma dan prinsip *Asta Bumi* yang terkandung dalam tata cara mengatur pekarangan dan tata letak bangunan dalam suatu ruang atau areal permukiman dilatar belakangi oleh filosofis *Tri Hita Karana*, dengan konsep-konsepnya:

- Konsep wadah (*Tri Mandala*): *utama, madya, nista* (kepala, badan, kaki).
- Konsep *Tri Loka*: *bhur, bwah, swah* (bawah, tengah, atas).
- Konsep Hirarki Tata Nilai: *utama, madya, nista* (ulu, tengah, teben).
- Arah mata angin (*Dewata Nawa Sanga*).
- Sumbu bumi (*kaja-kelod*) dan sumbu relegi (*kangin-kauh*).
- Pengider-ider berupa *aksara suci*.

Maka berdasarkan konsep tata ruang secara mikro tersebutlah dianalogikan ke dalam pembagian pusat kota secara makro oleh para ahli seperti yang tercantum dalam kriteria pertama di atas.

2. Pembagian secara mikro.

Pembagian tata ruang tradisional Bali secara mikro dibagi pada tiap-tiap desa adat dengan menggunakan *pola nyatur desa*. Dari 27 (dua puluh tujuh) desa adat yang ada di pusat Kota Denpasar akan memiliki peruntukan Pura, permukiman, pasar, fasilitas sosial dan lain-lain.

3. *Pempatan Agung*.

Keberadaan *pempatan agung* yang merupakan implementasi dari *pola catus patha* harus tetap dipertahankan, karena memiliki nilai *filosofis* agama dan sejarah yang tinggi. Di samping itu, *pempatan agung* juga merupakan *down town* pusat kota. Elemen-elemen di sekitar *pempatan agung* juga harus dipertahankan.

4. Identitas kota.

Fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya di pusat Kota Denpasar, di samping memenuhi kriteria tata nilai tradisional Bali tersebut juga harus memiliki ciri-ciri atau elemen yang merupakan *identitas kota*, khususnya Kota Denpasar sebagai kota budaya. Identitas tersebut adalah: menggunakan *pola catus patha* jika terletak pada perempatan jalan, menggunakan *telajakan* pada bagian depan bangunan, menggunakan pagar pembatas dengan style Bali (*tembok penyengker*) serta menggunakan *candi bentar* atau *kori* sebagai pintu masuk.

5. Permukiman tradisional.

Permukiman tradisional yang ada di pusat kota harus tetap dipertahankan. Walaupun di dalamnya sudah dimasukkan fungsi-fungsi modern seperti toko atau kantor, tetapi tetap menggunakan pola permukiman tradisional.

6. Kegiatan ritual.

Kegiatan konservasi tidak saja hanya berlaku untuk warisan serta kawasan warisan budaya, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan ritual yang banyak terdapat di pusat kota. Selain memiliki nilai filosofis keagamaan, kegiatan tersebut harus dikonservasi karena berkaitan dengan penataan ruang kota, dalam hal ini adalah pada sirkulasi atau jalur lalu lintas kota, karena kegiatan ritual tersebut memiliki jalur-jalur prosesi khusus.

7. Pembagian zona bersifat fleksibel.

Pembagian zona-zona *utama*, *madya*, *nista* bersifat fleksibel. Hal ini sesuai dengan konsep *Tri Premana*, yaitu *desa*, *kala*, *patra* (situasi, kondisi dan toleransi), mengingat keadaan suatu daerah tidak sama dengan daerah yang lain. Maka pembagian zona tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis serta adat istiadat suatu daerah.

8. Peran serta masyarakat dan pemerintah.

Fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya tidak saja berdasarkan kriteria tata nilai tradisional Bali tersebut. Tetapi juga harus disertai dengan keterlibatan atau peran serta masyarakat serta sosialisasinya dan peran dari aparat pemerintah terkait.

9. Ruang peralihan.

Dalam penerapan zona utama, madya dan nista ada suatu zona yang berada pada zona yang lain. Maka untuk mengatasinya dibuat suatu ruang peralihan atau ruang antara yang membatasinya. Ruang tersebut pada umumnya adalah berupa ruang kosong.

4.5 Penerapan Pemanfaatan Ruang Kota

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah didapat.

Penerapan kriteria-kriteria yang telah didapat untuk dapat memanfaatkan ruang kota dapat dilihat dalam kawasan *pempatan agung*, karena kawasan pempatan agung termasuk di dalam satu buah desa adat yang menggunakan pola *nyatur desa*, *catus patha* dan memiliki nilai *historis* yang merupakan awal dari perkembangan kota.

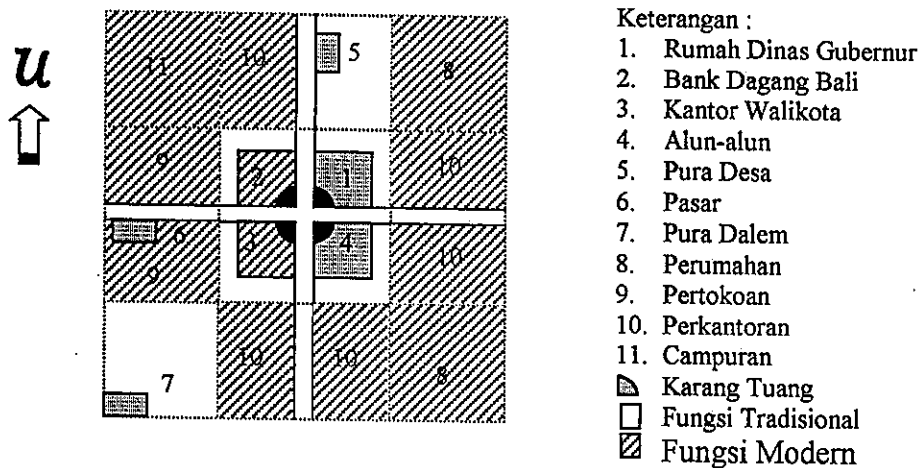
Pembagian ruang di kawasan pempatan agung tidak menggunakan pola *sanga mandala*, karena pola *sanga mandala* adalah pola penataan ruang yang digunakan untuk bangunan (rumah/perumahan, Pura, Puri, pasar, perkantoran dan lain-lain). Sedangkan untuk kawasan pempatan agung ditata dengan menggunakan pola *nyatur desa*. Dan untuk pempatan agung itu sendiri menggunakan konsep *catus patha*, yang merupakan bagian dari pola *nyatur desa* dan terletak pada zona *madya*.

Di pusat Kota Denpasar terdapat empat buah pempatan agung yang terbentuk dari *historis* pusat kota, yaitu diawali dengan berdirinya *Puri* sebagai pusat pemerintahan yang terletak di sudut Timur Laut pempatan agung dan diikuti dengan elemen-elemen pempatan

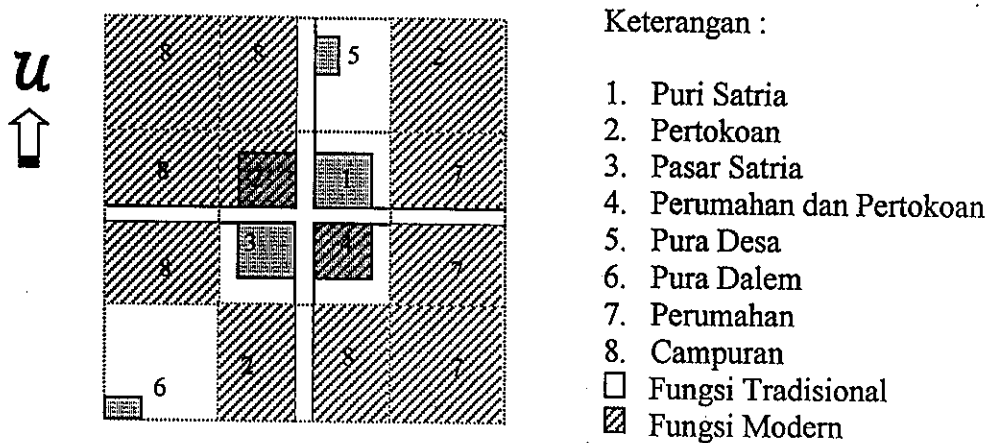
agung lainnya, yaitu pasar, wantilan dan alun-alun.

Pada saat ini, kondisi di kawasan pempatan-pempatan agung tersebut sudah mengalami perubahan dimana didalamnya sudah terdapat fungsi-fungsi modern, seperti pertokoan, perkantoran, perumahan dan penginapan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pempatan agung yang ada, yaitu:

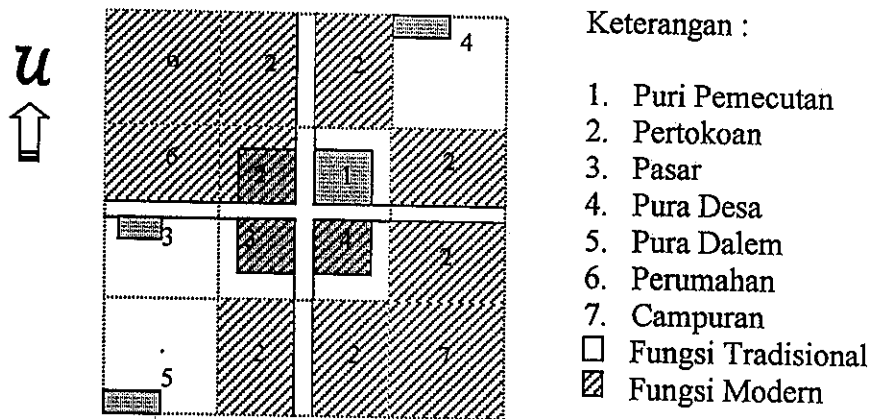
1. Pempatan Agung Catur Muka, terletak di perempatan Jalan Surapati, Veteran, Udayana dan Gajah Mada.



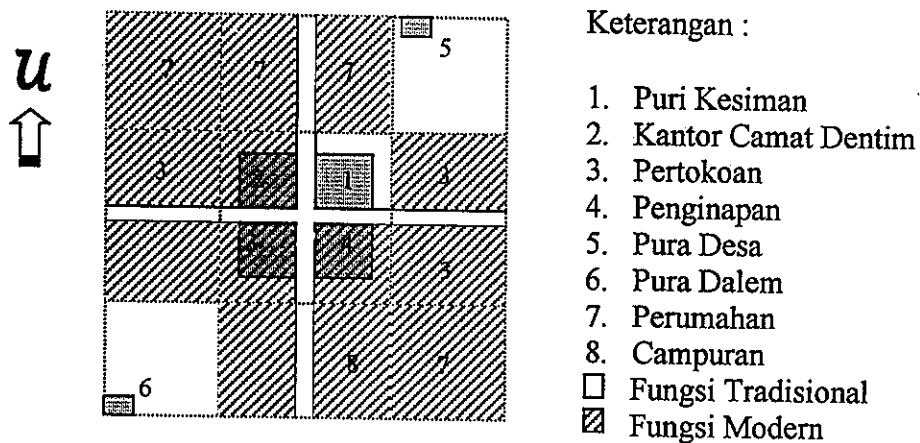
2. Pempatan Agung Puri Satria, terletak di perempatan Jalan Kedondong, Veteran dan Nakula.



3. Pempatan Agung Puri Pemecutan, terletak di perempatan Jalan Hasanudin, Imam Bonjol, Thamrin dan Wahidin.



4. Pempatan Agung Puri Kesiman, terletak di perempatan Jalan Supratman, Surabi dan Soka.



Dari kondisi kawasan pempatan agung tersebut dapat dilihat bahwa banyak fungsi tradisional yang berubah menjadi fungsi modern. Lokasi pempatan agung dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut.



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

KRITERIA - KRITERIA PEMANFAATAN RUANG KOTA
BERLANDASAKAN TATA NILAI TRADISIONAL BALI
DI KAWASAN WARISAN BUDAYA DI PUSAT KOTA DENPASAR

PETA : LOKASI PEMPATAN AGUNG

LEGENDA :

= BATAS WILAYAH PUSAT KOTA

= PEMPATAN AGUNG CATUR MUKA

= PEMPATAN AGUNG PURI SATRIA

= PEMPATAN AGUNG PURI PEMECUTAN

= PEMPATAN AGUNG PURI KESIMAN

SKALA

0.1 0.2 KM

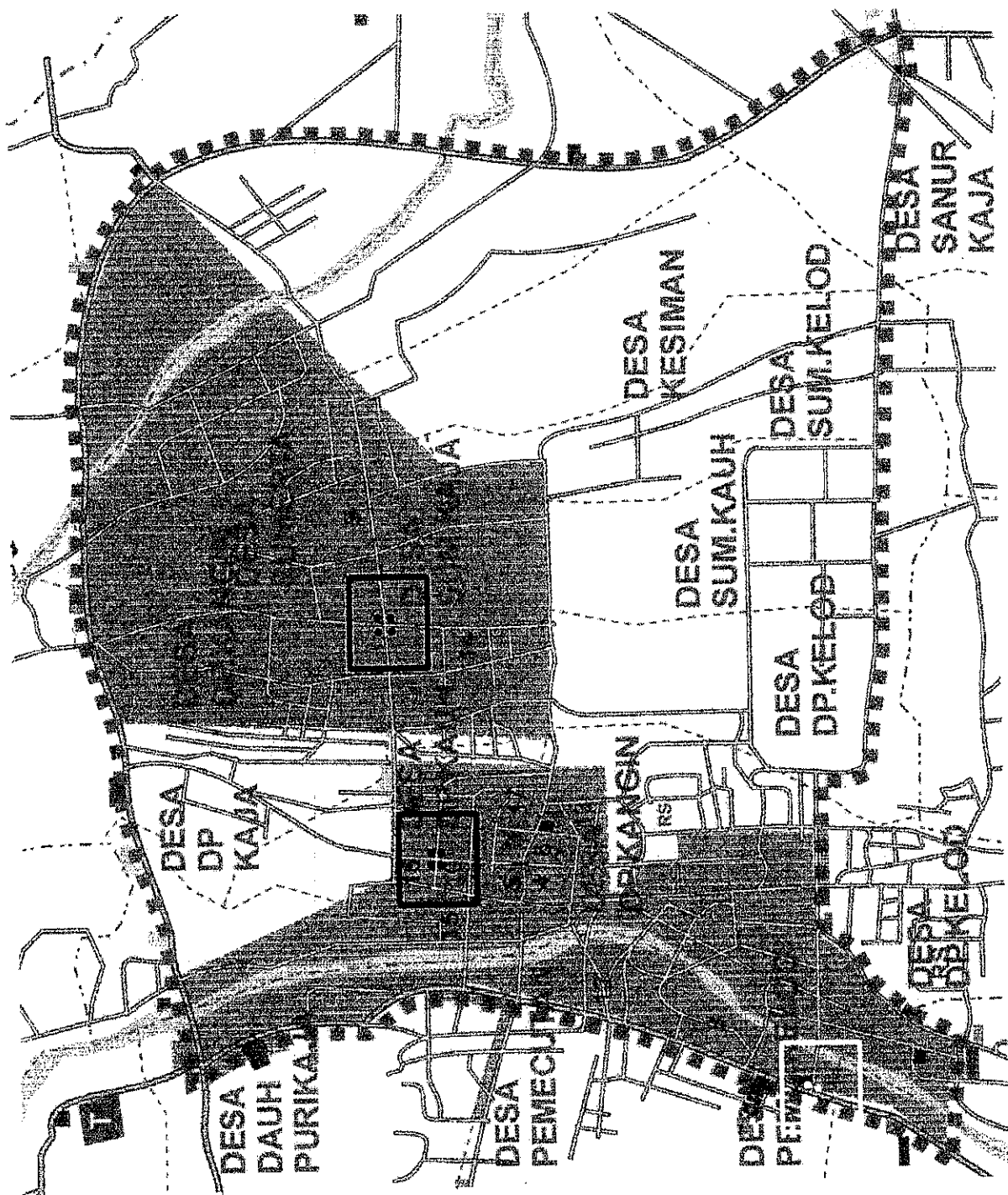


NO. GAMBAR

NO. HAL

SUMBER :

BAPPEDA KOTA DENPASAR



BAB V PENUTUP

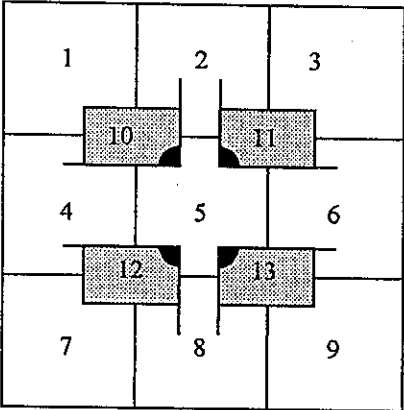
5.1 Temuan

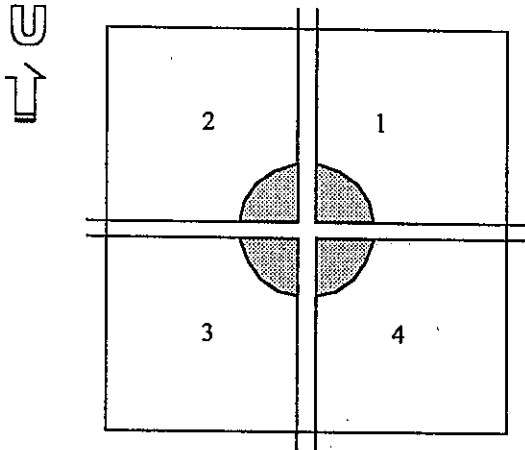
Setelah melakukan penelitian serta wawancara dengan para pakar tata ruang tradisional Bali, didapat kesimpulan bahwa Pusat Kota Denpasar berkembang dengan pesat, yang sebagian besar disebabkan oleh kaum *migran* atau pendatang.

Dan seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan masyarakat juga semakin beragam. Hal ini berakibat pada fungsi-fungsi ruang yang harus mewadahi segala fungsi modern tersebut. Tetapi di satu sisi, fungsi-fungsi tradisional masih tetap bertahan di pusat kota. Maka untuk mengantisipasi konflik tersebutlah dilakukan penelitian ini dengan maksud mencari kriteria-kriteria untuk dapat memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berlandaskan tata nilai tradisional Bali di pusat Kota Denpasar.

Fungsi-fungsi modern dapat berkembang di kawasan warisan budaya dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah didapat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fungsi modern yang telah berkembang di kawasan warisan budaya serta terjadinya perubahan-perubahan fungsi tradisional ke fungsi modern. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat pada kawasan *pempatan agung* yang ada di pusat Kota Denpasar yang telah mengalami perubahan dari pola *nyatur desa* dan *catus patha* yang berlaku, seperti pada tabel berikut:

TABEL V.1
KONDISI PEMPATAN AGUNG
DILIHAT DARI
POLA NYATUR DESA DAN CATUS PATHA

POLA TATA RUANG TRADISIONAL BALI	PEMPATAN AGUNG	KONDISI SEKARANG	
		NYATUR DESA	CATUS PATHA
<p>▪ POLA NYATUR DESA</p> <p style="text-align: center;">Gunung/Kaja (Utara)</p>  <p style="text-align: center;">Laut/Kelod (Selatan)</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nistaning Utama 2. Perumahan Madyaning Utama 3. Utamaning Utama (Pura Desa, Pura Puseh) 4. Nistaning Madya 5. Madyaning Madya 6. Utamaning Madya 7. Nistaning Nista (Pura Dalem) 8. Madyaning Nista 9. Utamaning Nista 10. Wantilan/tempat hiburan 11. Pura/puri Rumah Pejabat 12. Pasar/tempat perekonomian 13. Lapangan/Fasos/Fasum 	<p>Catur Muka</p> <p>Puri Satria</p>	<p>Pura Desa bergeser ke zona madya ning utama, tetapi masih termasuk zona utama</p> <p>Pura Desa bergeser ke zona madya ning utama, tetapi masih termasuk zona utama</p>	<p>Elemen-elemen pempatan agung yang berubah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puri berubah menjadi rumah dinas Gubernur ▪ Wantilan berubah menjadi Bank Dagang Bali ▪ Pasar berubah menjadi Kantor Walikota. Sedangkan pasar bergeser ke arah Barat <p>Elemen-elemen pempatan agung yang berubah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wantilan berubah menjadi pertokoan ▪ Alun-alun berubah menjadi perumahan dan pertokoan

<p>▪ POLA CATUS PATHA</p>  <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puri 2. Wantilan 3. Pasar 4. Alun-alun <p>◻ Karang Tuang</p>	Puri Pemecutan	Kawasan pempatan agung Puri Pemecutan sudah sesuai dengan pola nyatur desa.	<p>Elemen-elemen pempatan agung yang berubah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wantilan berubah menjadi pertokoan ▪ Alun-alun berubah menjadi pertokoan ▪ Pasar berubah menjadi pertokoan. Sedangkan pasar bergeser ke arah Barat
	Puri Kesiman	Kawasan pempatan agung Puri Kesiman sudah sesuai dengan pola nyatur desa.	<p>Elemen-elemen pempatan agung yang berubah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wantilan berubah menjadi Kantor Camat Dentim ▪ Alun-alun berubah menjadi penginapan ▪ Pasar berubah menjadi pertokoan.

Sumber: Hasil Analisis, 2002

5.2 Kesimpulan

Dengan semakin berkembangnya jaman dan kebutuhan manusia, mengakibatkan perubahan yang terjadi dari fungsi tradisional ke fungsi modern. Tetapi ada pula fungsi-fungsi tradisional yang harus tetap dipertahankan (*dikonservasi*) karena keberadaan fungsi-fungsi tersebut sangat berpengaruh terhadap keberadaan lingkungan atau kawasan sekitarnya.

Fungsi-fungsi tradisional yang harus tetap bertahan, yaitu: *Puri* (tempat tinggal kaum bangsawan), yang merupakan salah satu elemen dari pempatan agung serta *Pura* dalam satu kawasan desa adat, karena keberadaan *Pura* tersebut mengikat masyarakat yang menjadi anggota dalam desa adat tersebut.

Sedangkan fungsi-fungsi tradisional yang sudah berubah menjadi fungsi modern (sudah mengalami *konversi*), seperti misalnya:

- Wantilan berubah menjadi perkantoran atau bank.
- Pasar berubah menjadi perkantoran, kawasan perdagangan atau penginapan.
- Alun-alun sebagian besar telah mengalami perubahan menjadi pertokoan. Tetapi keberadaan alun-alun yang masih bertahan agar dipertahankan sebagai ruang terbuka kota.

Maka dapat disimpulkan bahwa, fungsi-fungsi tradisional dapat berubah menjadi fungsi modern, kecuali *Pura* dan *Puri*, karena keberadaannya menjadi tolok ukur atau prinsip dalam suatu kawasan.

5.3 Rekomendasi

Seperti telah diungkapkan di atas bahwa pusat Kota Denpasar semakin berkembang pesat, sedangkan fungsi-fungsi modern dapat berkembang di pusat kota asalkan telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada kawasan-kawasan tradisional. Misalkan yang terjadi pada kawasan *pempatan agung* di atas (lihat tabel V.1). Maka untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perubahan-perubahan yang semakin melebar, maka dalam penelitian ini akan diberikan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Kepada aparat Pemkot (Pemerintah Kota) Denpasar:

- Dari kriteria-kriteria pemanfaatan ruang kota yang didapat di atas, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun *urban design* (RTBL) pusat Kota Denpasar, dimana antara fungsi modern dan fungsi tradisional dapat berjalan secara bersama-sama.
- Kawasan-kawasan tradisional, dalam hal ini adalah *pempatan agung*, harus mempertahankan paling tidak salah satu dari elemennya, sehingga dapat tetap memberikan nilai tradisional maupun *historis* dari pempatan agung tersebut.
- Karena Pemkot telah mencanangkan Kota Denpasar sebagai *kota budaya*, maka identitas kota harus tetap dipertahankan.

2. Kepada masyarakat pusat Kota Denpasar:

- Menerapkan secara tertib aturan-aturan yang berlaku, baik yang bersifat tradisional mau pun modern (dari Pemerintah Kota Denpasar).
- Tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan.

3. Untuk pengembangan akademika (*science*):

- Dapat mensosialisasikan bagi pengembangan ilmu wilayah dan kota sehingga dapat menambah keilmuan dalam hal tata nilai tradisional, filosofi serta budaya Bali yang ada.
- Kepada pihak-pihak yang hendak melanjutkan penelitian ini, dimana dapat meneliti secara lebih spesifik kawasan pempatan agung yang ada di pusat kota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agung, Anak Agung Gede. 1989. *Bali Abad XIX, Perjuangan Rakyat dan Raja-raja Menentang Kolonialisme Belanda 1808-1908*. Denpasar; Penerbit Gajah Mada Univ. Press.
- Arthur B. Gallion dan Simon Eisner. 1996. *Pengantar Perancangan Kota, Desain dan Perencanaan Kota*. Jakarta; Penerbit Erlangga
- Bakker SJ, J.W.M. 1984. *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta; Penerbit Kanisius.
- Bidja, I Made. 2000. *Asta Kosala Kosali, Asta Bumi*. Singaraja; Penerbit Bali Post
- Budihardjo, Eko. 1986. *Architectural Conservation in Bali*. Penerbit Gajah Mada Univ. Press.
- 1997. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung; Penerbit Alumni
- 1997. *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*. Jakarta; Penerbit Djambatan
- 1997. *Arsitektur sebagai Warisan Budaya*. Semarang; Penerbit Djambatan
- 1999. *Kota Berkelanjutan*. Bandung; Penerbit Alumni
- 1999. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Semarang; Penerbit ANDI Yogyakarta
- 1997. *Preservation and Conservation of Cultural Heritage in Indonesia*. Semarang; Penerbit Gajah Mada Univ. Press.
- Catanese, Anthony; Snyder, James. 1979. *Introduction to Urban Planning*. Mc. Graw Hill. New York
- Cohen, Nahoum. *Urban Conservation*. 1999. Israel; Library of Congress Cataloging in Publication Data
- Dickey, John W. dan Watts, Thomas M. 1978. *Analytic Techniques in Urban and Regional Planning*. Amerika; Mc. Graw-Hill, Inc
- Dunn, William N. 1981. *An Introduction: Public Policy Analysis*. Prentice Hall; Inc Englewood Cliff

- Gallion dan Eisner, 1994. *Pengantar Perancangan Kota Jilid II*. Jakarta; Penerbit Erlangga
- Gelebet, I Nyoman, 1981/1982. *Arsitektur Tradisional Daerah Bali*. Denpasar; Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah
- Garnham, Harry Launce. 1984. *Maintaining The Spirit of Place, A Process for The Preservation of Town Character*. PDA Publishers Corp. Arizona
- Gibberd, Frederick. 1959. *Town Design*. Frederick A. Praeger, Inc. New York.
- Hadi Sabari Yunus. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta; Penerbit Pustaka Pelajar
- Konta Puri, A.A. Alit. 1977. *Puputan Badung-Bandana Pralaya*. Denpasar; Penerbit Dangin Kawwi.
- Lynch, Kevin. 1960. *The Image of The City*. Cambridge, MA; The MIT Press.
- Pitana, I Gde. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar; Penerbit Bali Post
- Rumawan Salain, Putu. 2001. *Ucapan, Pikiran dan Karya Robi Sularto Dalam Untaian Kenangan*. Denpasar; Penerbit PT. Cipta Paduraksa.
- Shirvani, Hamid. 1985. *Urban Design Process*. Van Nostrand Reinhold Co. New York.
- Siegel, Sidney. 1997. *Statistik Nonparametik Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta; Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- Suasthawa Dharmayuda, I Made. 2001. *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar; Penerbit Upada Sastra
- Sudjana. 1994. *Metode Statistika Edisi ke 5*, Bandung; Penerbit: Tarsito,.
- Supartha, Wayan. 1999. *Bali dan Masa Depan*. Denpasar; Penerbit Bali Post
- Tuan, Yi-Fu. 1977. *Space and Place*. University of Minnesota Press. USA
- Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta; Penerbit Avyrouz.
- Wiryomartono, Bagoes. 1995. *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia*. Jakarta; Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta; Penerbit Kanisius

TERBITAN:

- Bali Discovery Denpasar 2001*. Dinas Pariwisata Kota Denpasar. 2001
Denpasar Sane Mangkin. Bagian Humas Setwilda Tingkat II Kodya Denpasar. 1997
Hindu dalam Wacana Politik Lokal dan Nasional. Fakultas Sastra Universitas Udayana
Manggala Upacara, Sujana, I Made dan I Nyoman Susila. 2000. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha
Meganada, I Wayan, Ir. MS. *Ars. Arsitektur Pura di Bali*. Pesta Kesenian Bali 1994.
Memberikan Masa Depan bagi Masa Lalu, Bangunan Penerima Penghargaan Sadar Pemugaran Tahun 1993 dan 1996. Pemda Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Tata Bangunan dan Pemugaran
Rai Kalam, A.A. Drs. dkk. *Bangunan Bale Agung dan Wantilan*. Pesta Kesenian Bali. 1982
Reka Citra, PT. *Laporan Pendahuluan Konservasi Bangunan Kuno*. Semarang, Januari 1987.
Reka Citra, PT. *Inventarisasi dan Konservasi Bangunan Tua dan Lingkungannya di Kotamadya Dati II Semarang*, 1987.

TESIS:

- Anindya Putra I G.P. 1991. *Kajian Ke Arah Pendekatan Konsep Ruang Tradisional Bali dalam Penataan Ruang Kota dan Penelusuran Syarat-syarat Ruang dari Masyarakat sebagai Landasan Perwujudan Ruang Kota Berwawasan Identitas, Studi Kasus Kota Gianyar*. Tesis S2 PWK. ITB. Bandung.
Meganada, I Wayan. 1990. *Pola Tata Ruang Arsitektur Tradisional Dalam Perumahan KPR-BTN di Bali*. Tesis S2 Teknik Arsitektur ITB. Bandung.

UNDANG-UNDANG atau PERATURAN:

- Perda Propinsi Bali No. 4 Tahun 1974.
RDTR (*Rencana Detail Tata Ruang*) Kota Denpasar. 2000. Bappeda Kota Denpasar.
RTRW (*Rencana Tata Ruang Wilayah*) Kota Denpasar. 2000. Bappeda Kota Denpasar.

LAMPIRAN A

KUISENER